



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan dan berkat Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 ini merupakan laporan atas capaian penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil manfaat dan/atau dampak dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci sebagai Indikator Kinerja Utama.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021, serta diharapkan adanya imbal-balik (feedback) sebagai masukan untuk alternatif perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang pada masa yang akan datang..

Bengkayang, 29 Maret 2021

**BUPATI BENGKAYANG**

**SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	3
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah .....	3
b. Data Geografis Wilayah .....	4
c. Jumlah Penduduk .....	12
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan .....	14
e. Jumlah Perangkat daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .....	19
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	29
1.1.2 Perencanaan Pembangunan daerah .....	32
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	32
b. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	32
c. Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah .....	39
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	47
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	53
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	55
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	55
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan .....	56



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021**

2.2.1.Indikator Kinerja Keluaran	.....	56
2.2.2.Indikator Kinerja Kunci Hasil	.....	93
2.2.3.Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	.....	107
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	.....	109
<b>BAB III</b>		
<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	.....	159
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkayang	.....	159
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkayang	.....	160
3.2.1 Target Kinerja	.....	160
3.2.2 Realisasi	.....	161
3.3 Permasalahan dan kendala	.....	162
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	.....	162
<b>BAB IV</b>		
<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	.....	164
4.1 Urusan Pendidikan	.....	169
4.2 Urusan Kesehatan	.....	186
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	.....	231
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	.....	234
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	.....	238
4.6 Urusan Sosial	.....	249
4.7 Program dan Kegiatan	.....	256
<b>BAB V</b>		
<b>PENUTUP</b>	.....	263



## DAFTAR

			Halaman
Tabel 1.	1	Batas Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah 2019	6
Tabel 1.	2	Batas Administrasi Dan Panjang Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah 2019	7
Tabel 1.	3	Batas Garis Pantai Dan Panjang Perbatasan Negara Di Kabupaten Bengkulu Tengah 2019	7
Tabel 1.	4	Letak Geografis Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Kecamatan 2019	8
Tabel 1.	5	Batas-Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah 2019	9
Tabel 1.	6	Persentase Luas Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Kecamatan 2019	10
Tabel 1.	7	Jarak Ibu Kota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah 2019	11
Tabel 1.	8	Luas Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Kecamatan Dan Jenis Permukaan Tanah 2019	13
Tabel 1.	9	Luas Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Kecamatan Dan Kelas Lereng 2019	14
Tabel 1.	10	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Di Kabupaten Bengkulu Tengah	15
Tabel 1.	11	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Kecamatan Dibagi Perjenis Kelamin	18
Tabel 1.	12	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan	18
Tabel 1.	13	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Di Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin 2019	20



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

Tabel 1.	14	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Di Kabupaten Bengkayang Menurut Lapangan Pekerjaan Dan Jenis Kelamin 2019	.....	20
Tabel 1.	15	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkayang Atas Dasar Harga Konstan	.....	22
Tabel 1.	16	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/ Kota	.....	23
Tabel 1.	17	Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, Dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota	.....	26
Tabel 1.	18	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2016-2018	.....	27
Tabel 1.	19	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rupiah)	.....	28



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Bengkayang dibentuk dan ditetapkan sebagai Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Pemerintah



Kabupaten Bengkayang menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 ini sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya merupakan pelaporan atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan tolak ukur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 dengan visi jangka panjang “Terwujudnya Kabupaten Bengkayang sebagai beranda depan NKRI yang sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan berwawasan lingkungan”.

Adapun maksud penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.



### 1.1.1 Penjelasan Umum

#### a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Adapun Undang-undang Pembentukan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);



## b. Data Geografis Wilayah

### 1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Bengkayang berada pada posisi 108,39<sup>00</sup>" Bujur Timur sampai 110<sup>0</sup>10'00" Bujur Timur dan antara 0,33<sup>0</sup>00 Lintang Utara sampai 1<sup>0</sup>30'00" Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur).
- 2) Sebelah selatan dengan Kabupaten Mempawah
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.
- 4) Sebelah Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Laut Natuna.

Dengan letak geografis sebagaimana di atas Kabupaten Bengkayang mempunyai panjang garis pantai sepanjang 36,5 Km, dan panjang garis perbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) 89,5 Km, dan memiliki 12 (dua belas ) buah pulau, yang diantaranya 6 buah pulau belum berpenghuni.

**TABEL 1.1**  
**BATAS ADMINISTRASI**  
**KABUPATEN BENGKAYANG 2021**

<b>Batas Administrasi</b> <i>Administration Border</i>	<b>Berbatasan dengan</b> <i>Border On</i>
(1)	(2)
Sebelah Utara	Kabupaten Sambas Serawak (Malaysia Timur)
Sebelah Selatan	Kabupaten Mempawah
Sebelah Timur	Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau
Sebelah Barat	Kota Singkawang Laut Natuna

*Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021*



**TABEL 1.2**  
**BATAS ADMINISTRASI DAN PANJANG PERBATASAN**  
**KABUPATEN BENGKAYANG 2021**

<b>Batas Administrasi</b> <i>Administration Border</i>	<b>Panjang Perbatasan</b> <i>Border Length</i> <b>(Km)</b>
(1)	(2)
Kabupaten Sambas	126
Kabupaten Landak	168
Kabupaten Mempawah	54
Kabupaten Sanggau	31
Kota Singkawang	59

*Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021*

**TABEL 1.3**  
**BATAS GARIS PANTAI DAN PANJANG PERBATASAN NEGARA**  
**DI KABUPATEN BENGKAYANG 2021**

<b>Uraian</b> <i>Description</i>	<b>Panjang Perbatasan</b> <i>Border Length</i> <b>(Km)</b>
(1)	(2)
Panjang Garis Pantai	36
Panjang Perbatasan Negara	89,5

*Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021*



**TABEL 1.4**  
**LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN BENGKAYANG**  
**MENURUT KECAMATAN 2021**

<b>Kecamatan District</b>	<b>Garis Lintang Latitude</b>	<b>Garis Bujur Longitude</b>
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	$0^{\circ}33'00''$ LU- $0^{\circ}50'81''$ LU	$108^{\circ}39'00''$ BT- $109^{\circ}04'76''$ BT
2. Capkala	$0^{\circ}34'19''$ LU- $0^{\circ}42'02''$ LU	$108^{\circ}17'74''$ BT- $109^{\circ}06'21''$ BT
3. Sungai Raya Kepulauan	$0^{\circ}38'39''$ LU- $0^{\circ}51'21''$ LU	$108^{\circ}18'14''$ BT- $108^{\circ}59'02''$ BT
4. Samalantan	$0^{\circ}42'42''$ LU- $1^{\circ}03'14''$ LU	$109^{\circ}07'98''$ BT- $109^{\circ}23'14''$ BT
5. Monterado	$0^{\circ}37'10''$ LU- $0^{\circ}55'00''$ LU	$109^{\circ}04'35''$ BT- $109^{\circ}13'47''$ BT
6. Lembah Bawang	$0^{\circ}50'46''$ LU- $1^{\circ}03'14''$ LU	$109^{\circ}08'59''$ BT- $109^{\circ}23'14''$ BT
7. Bengkayang	$0^{\circ}45'56''$ LU- $0^{\circ}54'27''$ LU	$109^{\circ}25'32''$ BT- $109^{\circ}35'72''$ BT
8. Teriak	$0^{\circ}45'56''$ LU- $0^{\circ}54'27''$ LU	$109^{\circ}25'32''$ BT- $109^{\circ}35'72''$ BT
9. Sungai Betung	$0^{\circ}44'35''$ LU- $0^{\circ}54'60''$ LU	$109^{\circ}19'35''$ BT- $109^{\circ}27'18''$ BT
10. Ledo	$0^{\circ}52'74''$ LU- $1^{\circ}08'95''$ LU	$109^{\circ}30'16''$ BT- $109^{\circ}50'89''$ BT
11. Suti Semarang	$0^{\circ}50'64''$ LU- $1^{\circ}00'24''$ LU	$109^{\circ}36'69''$ BT- $109^{\circ}56'21''$ BT
12. Lumar	$0^{\circ}52'10''$ LU- $1^{\circ}02'56''$ LU	$109^{\circ}18'71''$ BT- $109^{\circ}32'10''$ BT
13. Sanggau Ledo	$0^{\circ}58'55''$ LU- $1^{\circ}16'45''$ LU	$109^{\circ}32'58''$ BT- $109^{\circ}56'29''$ BT
14. Tujuh Belas	$0^{\circ}58'55''$ LU- $1^{\circ}08'48''$ LU	$109^{\circ}40'54''$ BT- $109^{\circ}56'29''$ BT
15. Seluas	$1^{\circ}01'61''$ LU- $1^{\circ}21'21''$ LU	$109^{\circ}37'98''$ BT- $110^{\circ}02'26''$ BT
16. Jagoi Babang	$1^{\circ}15'16''$ LU- $1^{\circ}30'00''$ LU	$109^{\circ}33'95''$ BT- $110^{\circ}10'00''$ BT
17. Siding	$1^{\circ}33'00''$ LU- $1^{\circ}30'00''$ LU	$109^{\circ}39'00''$ BT- $110^{\circ}10'00''$ BT
<b>Kabupaten Bengkayang</b>	<b><math>0^{\circ}33'00''</math> LU-<math>1^{\circ}30'00''</math> LU</b>	<b><math>108^{\circ}39'00''</math>BT-<math>110^{\circ}10'00''</math>BT</b>

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021



**TABEL 1.5**  
**BATAS-BATAS WILAYAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG 2021**

<b>Kecamatan District</b>	<b>Utara North</b>	<b>Timur East</b>	<b>Selatan South</b>	<b>Barat West</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sungai Raya	S Raya Kep.	Capkala	Kab Mempawah	Laut Natuna
2. Capkala	S. Raya Kep.	Monterado	Kab Mempawah	Sungai Raya
3. Sungai Raya Kep.	Kota Singkawang	Monterado	Sungai Raya	Laut Natuna
4. Samalantan	Lembah Bawang	Sungai Betung	Kab Landak	Monterado
5. Monterado	Kota Singkawang	Samalantan & Lembah Bawang	Kab Mempawah	Capkala
6. Lembah Bawang	Kab Sambas	Lumar	Samalantan	Monterado
7. Bengkayang	Lumar	Teriak	Kab Landak	Sungai Betung
8. Teriak	Suti Semarang	Kab Landak	Kab Landak	Bengkayang
9. Sungai Betung	Lumar	Bengkayang	Kab Landak	Samalantan
10. Ledo	Kab Sambas	Sanggau Ledo	Suti Semarang	Lumar
11. Suti Semarang	Tujuh Belas	Kab Landak	Teriak	Ledo
12. Lumar	Kab Sambas	Ledo	Bengkayang	Lembah Bawang
13. Sanggau Ledo	Kab Sambas	Seluas & Tujuh Belas	Ledo	Kab Sambas
14. Tujuh Belas	Seluas	Kab Landak	Suti Semarang	Sanggau Ledo
15. Seluas	Jagoi Babang	Siding	Tujuh Belas	Kab Sambas
16. Jagoi Babang	Serawak	Siding	Seluas	Kab Sambas
17. Siding	Serawak	Kab Sanggau	Kab Landak	Seluas

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

## 2. Luas Wilayah

Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, memiliki topografi sangat bervariasi sebagian tanah datar, sebagian bergelombang



namun ada beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Jenis tanah yang dimiliki mempunyai sifat dan ciri jenis Organosol, Alluvial, Padsolid Merah Kuning, Podsol dan Latosol.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

**TABEL 1.6**  
**PERSENTASE LUAS KABUPATEN BENGKAYANG**  
**MENURUT KECAMATAN**  
**2021**

<b>Kecamatan District</b>	<b>Luas Area (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Percentage (%)</b>
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	75,85	1,41
2. Capkala	46,35	0,86
3. Sungai Raya Kepulauan	394,00	7,30
4. Samalantan	420,50	7,79
5. Monterado	291,00	5,39
6. Lembah Bawang	188,00	3,48
7. Bengkayang	167,04	3,10
8. Teriak	231,51	4,29
9. Sungai Betung	205,95	3,82
10. Ledo	481,75	8,93



Kecamatan <i>District</i>	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase Percentage (%)
11. Suti Semarang	280,84	5,20
12. Lumar	275,21	5,10
13. Sanggau Ledo	392,50	7,27
14. Tujuh Belas	221,00	4,10
15. Seluas	506,50	9,39
16. Jagoi Babang	655,00	12,14
17. Siding	563,30	10,44
<b>Jumlah/Total</b>	<b>5 396,30</b>	<b>100,00</b>

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

**TABEL 1.7**  
**JARAK IBU KOTA KECAMATAN KE IBUKOTA**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**  
**2021**

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	Sungai Durik	89,56
2. Capkala	Capkala	72,32
3. Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	72,56
4. Samalantan	Samalantan	37,39
5. Monterado	Monterado	53,18
6. Lembah Bawang	Papan Uduk	57,39
7. Bengkayang	Bengkayang	0
8. Teriak	Bana	13,76
9. Sungai Betung	Suka Maju	14,84
10. Ledo	Ledo	31,01
11. Suti Semarang	Suti Semarang	67,03



Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km <sup>2</sup> )
12. Lumar	Lumar	16,94
13. Sanggau Ledo	Lembang	49,60
14. Tujuh Belas	Pisak	61,60
15. Seluas	Seluas	76,08
16. Jagoi Babang	Jagoi	89,96
17. Siding	Siding	103,68

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

### 3. Topografis

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Bengkayang adalah jenis tanah podsolik merah kuning, yaitu sebesar 3.223,47 kilometer persegi dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 67 kilometer persegi.

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40 % dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 %. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 3.430,23 kilometer persegi. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar 360,20 kilometer persegi dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 5.036,10 kilometer persegi.

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki



sejumlah pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.

**TABEL 1.8**  
**LUAS KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT KECAMATAN**  
**DAN JENIS PERMUKAAN TANAH 2021**

Kecamatan <i>District</i>	OGH (km <sup>2</sup> )	Aluvial (km <sup>2</sup> )	Regosol (km <sup>2</sup> )	PMK* (km <sup>2</sup> )	Podso I (km <sup>2</sup> )	Latoso (km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sungai Raya	6,32	26,45	0	0	9,26	33,82
2. Capkala	3,86	16,16	0	0	5,66	20,67
3. Sungai Raya Kep.	32,82	137,39	0	0	48,09	175,7
4. Samalantan	11,22	0	0	409,28	0	0
5. Monterado	7,76	0	0	283,24	0	0
6. Lembah Bawang	5,02	0	0	182,98	0	0
7. Bengkayang	0	0	0	133,33	0	33,71
8. Teriak	0	0	0	184,79	0	46,72
9. Sungai Betung	0	0	0	164,39	0	41,56
10. Ledo	0	0	0	396,34	0	85,41
11. Suti Semarang	0	0	0	231,05	0	49,79
12. Lumar	0	0	0	226,42	0	48,79
13. Sanggau Ledo	0	0	0	53,09	0	339,41
14. Tujuh Belas	0	0	0	29,90	0	191,1
15. Seluas	0	0	0	272,71	216,01	17,78
16. Jagoi Babang	0	0	0	352,66	279,34	23,00
17. Siding	0	0	0	303,29	240,23	19,78
<b>Jumlah/Total</b>	<b>67,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>3223,47</b>	<b>798,59</b>	<b>1127,24</b>

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021



**TABEL 1.9**  
**LUAS KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT KECAMATAN**  
**DAN KELAS LERENG 2021**

Kecamatan <i>District</i>	Luas per kelas lereng/ <i>Elevation Class's Area</i>				Jumlah <i>Total</i> (km <sup>2</sup> )
	0-2 % (km <sup>2</sup> )	2-14 % (km <sup>2</sup> )	15-40 % (km <sup>2</sup> )	> 40 % (km <sup>2</sup> )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sungai Raya	66,89	1,65	6,39	0,92	75,85
2. Capkala	40,87	1,01	3,91	0,56	46,35
3. Sungai Raya Kepulauan	347,44	8,59	33,2	4,77	394
4. Samalantan	43,87	119,79	189,64	67,2	420,5
5. Monterado	30,36	82,9	131,23	46,51	291
6. Lembah Bawang	19,62	53,56	84,78	30,04	188
7. Bengkayang	0	0	144,57	22,47	167,04
8. Teriak	0	0	200,37	31,14	231,51
9. Sungai Betung	0	0	178,25	27,7	205,95
10. Ledo	0	42,85	324,92	113,98	481,75
11. Suti Semarang	0	24,98	189,42	66,44	280,84
12. Lumar	0	24,48	185,61	65,12	275,21
13. Sanggau Ledo	148,11	228,24	8,38	7,77	392,5
14. Tujuh Belas	83,39	128,51	4,72	4,38	221
15. Seluas	231,5	200	0	75	506,5
16. Jagoi Babang	279,41	261,33	6,73	107,53	655
17. Siding	240,29	224,76	5,78	92,47	563,3
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1531,75</b>	<b>1402,65</b>	<b>1697,9</b>	<b>764</b>	<b>5396,3</b>

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

### C. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin



Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang dari sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang mencapai 289.875 jiwa yang terdiri dari 139.341 perempuan dan 150.534 laki-laki.

Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Monterado sebanyak 34.232 Jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang sebanyak 6.163 jiwa.

Berikut adalah jumlah penduduk menurut struktur usia berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang:

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
PER KECAMATAN SEMESTER II 2021**

KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH LK+PR
SUNGAI RAYA	12.204	11.554	23.758
SAMALANTAN	12.477	11.238	23.715
LEDO	7.858	7.250	15.108
BENGKAYANG	17.189	16.389	33.578
SELUAS	10.788	9.903	20.691
SANGGAU LEDO	7.972	7.683	15.655
JAGOI BABANG	4.810	4.445	9.255
MONTERADO	17.905	16.327	34.232
TERIAK	9.294	8.350	17.644
SUTI SEMARANG	3.255	2.908	6.163
CAPKALA	5.188	4.648	9.836
SIDING	4.401	4.030	8.431
LUMAR	4.268	3.939	8.207
SUNGAI BETUNG	6.572	6.023	12.595
SUNGAI RAYA KEPULAUAN	14.845	14.095	28.940
LEMBAH BAWANG	3.499	3.072	6.571
TUJUH BELAS	8.009	7.487	15.496
<b>KAB BENGKAYANG</b>	<b>150.534</b>	<b>139.341</b>	<b>289.875</b>

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021



**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Adapun Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang adalah 17 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	KECAMATAN
1	SUNGAI RAYA
2	SAMALANTAN
3	LEDO
4	BENGKAYANG
5	SELUAS
6	SANGGAU LEDO
7	JAGOI BABANG
8	MONTERADO
9	TERIAK
10	SUTI SEMARANG
11	CAPKALA
12	SIDING
13	LUMAR
14	SUNGAI BETUNG
15	SUNGAI RAYA KEPULAUAN
16	LEMBAH BAWANG
17	TUJUH BELAS
	<b>KAB BENGKAYANG</b>

Adapun Jumlah Desa di Kabupaten Bengkayang sebanyak 122 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA DESA
1	<b>Bengkayang</b>	Thirta Kencana
		Bhakti Mulia
		Bani Amas
		Setia Budi



2	<b>Ledo</b>	Lesabela
		Semangat
		Serangkat
		Rodaya
		Dayung
		Jesape
		Lomba Karya
		Sidai
		Seles
		Tebuah Marong
		Suka Damai
		Suka Jaya
		3
Gua		
Bange		
Danti		
Sango		
4	<b>Tujuh Belas</b>	Pisak
		Kamuh
		Bengkilu
		Sinar Tebudak
5	<b>Suti Semarang</b>	Nangka
		Muhi Bersatu
		Suka Maju
		Cempaka Putih
		Kiung
		Kelayu



		Suti Semarang
		Tapen
6	<b>Jagoi Babang</b>	Jagoi
		Kumba
		Sekida
		Gersik
		Sinar Baru
		Semunying Jaya
7	<b>Seluas</b>	Seluas
		Mayak
		Sahan
		Kalon
		Sentangau Jaya
		Bengkawan
8	<b>Siding</b>	Siding
		Tamong
		Tawang
		Tangguh
		Sungkung I
		Sungkung II
		Sungkung III
		Hli Buei
9	<b>Lumar</b>	Magmagan Karya
		Tiga Berkat
		Seren Selimbau
		Belimbing
		Lamolda



10	<b>Teriak</b>	Dharma Bhakti
		Sumber Karya
		Setia Jaya
		Bangun Sari
		Sebetung Menyala
		Molo Jelayan
		Ampar Benteng
		Tanjung
		Telidik
		Puteng
		Sekaruh
		Tubajur
		Lulang
		Benteng
		Sebente
		Teriak
		Temia Sio
Kades Bana		
11	<b>Sungai Betung</b>	Cipta Karya
		Suka Bangun
		Karya Bhakti
		Suka Maju
12	<b>Samalantan</b>	Samalantan
		Saba'u
		Marunsu
		Bukit Serayan
		Babane



		Pasti Jaya
		Tumiang
13	<b>Lembah Bawang</b>	Saka Taru
		Lembah Bawang
		Janyat
		Tempapan
		Papan Uduk
		Papan Tembawang
		Godang Damar
		Kinande
14	<b>Monterado</b>	Gerantung
		Monterado
		Goa Boma
		Siaga
		Nek Nginap
		Beringin Baru
		Rantau
		Sendoreng
		Mekar Baru
		Jahandung
		Serindu
15	<b>Capkala</b>	Capkala
		Mandor
		Setanduk
		Aris
		Sebadut
		Pawangi



16	<b>Sungai Raya</b>	Sungai Jaga A
		Sungai Jaga B
		Sungai Duri
		Sungai Pangkalan I
		Sungai Pangkalan I
17	<b>Sungai Raya Kepulauan</b>	Rukma Jaya
		Sungai Keran
		Sungai Raya
		Karimunting
		Pulau Lemukutan

Adapun kelurahan sebanyak 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Bengkayang yaitu :

No	KELURAHAN
1	BUMI EMAS
2	SEBALO

**e. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah**

1. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah beberapa kali menyesuaikan SOPD-nya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

Adapun susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019** tersebut sebagai berikut :

**1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;**

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan tipe A terdiri 3 (tiga) asisten, yaitu :

- ASISTEN I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) yang membawahi Tiga (3) Bagian yaitu: Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ASISTEN II (Perekonomian dan Pembangunan) yang membawahi Tiga (3) Bagian yaitu: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- ASISTEN III (Administrasi Umum) yang membawahi Empat (4) Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**2. Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tipe B**

**3. Dinas Daerah yang terdiri dari :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A.
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Tipe B.



7. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Tipe A.
8. Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe C.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B.
10. Dinas Perhubungan Tipe C.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B.
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tipe B.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C.
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B.
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tipe B.
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.

**4. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :**

1. Inspektorat Daerah Tipe A.
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B.
5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B.

**5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.**

**6. Kecamatan Tipe A terdiri dari :**

- 1) Kecamatan Samalantan.
- 2) Kecamatan Bengkayang.
- 3) Kecamatan Ledo.
- 4) Kecamatan Sanggau Ledo.
- 5) Kecamatan Seluas.
- 6) Kecamatan Sungai Raya.
- 7) Kecamatan Jagoi Babang.
- 8) Kecamatan Teriak.



- 9) Kecamatan Monterado.
- 10) Kecamatan Suti Semarang.
- 11) Kecamatan Capkala.
- 12) Kecamatan Siding.
- 13) Kecamatan Sungai Betung.
- 14) Kecamatan Lumar.
- 15) Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- 16) Kecamatan Lembah Bawang.
- 17) Kecamatan Tujuh Belas.

#### 7. Kelurahan

- 1) Kelurahan Sebalu.
- 2) Kelurahan Bumi Emas.

### 2. Jumlah Pegawai Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

#### Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

No	INSTANSI	GOLONGAN				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	24	72	13	<b>110</b>
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	13	15	5	<b>33</b>
3	INSPEKTORAT	1	1	25	6	<b>33</b>
4	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH	0	1	0	0	<b>1</b>
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	3	21	4	<b>28</b>



6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	7	36	4	<b>47</b>
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	9	21	4	<b>34</b>
8	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0	3	13	3	<b>19</b>
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3	11	7	<b>21</b>
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2	8	1	<b>11</b>
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	8	12	5	<b>25</b>
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	7	22	7	<b>36</b>
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	6	17	5	<b>28</b>
14	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	5	19	4	<b>28</b>
15	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	0	22	69	9	<b>100</b>
16	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	0	3	16	3	<b>22</b>
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	6	13	3	<b>23</b>
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	14	32	4	<b>50</b>
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	5	15	3	<b>23</b>
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	5	9	3	<b>18</b>
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	7	18	14	<b>39</b>
22	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	0	3	45	7	<b>55</b>
23	DINAS PERHUBUNGAN	0	5	17	2	<b>24</b>
24	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0	8	20	4	<b>32</b>



25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4	19	4	<b>27</b>
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	0	7	12	6	<b>25</b>
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	8	11	4	<b>24</b>
28	KANTOR CAMAT BENGKAYANG	0	5	6	1	<b>12</b>
29	KANTOR CAMAT CAPKALA	1	2	9	1	<b>13</b>
30	KANTOR CAMAT JAGOI BABANG	0	3	6	2	<b>11</b>
31	KANTOR CAMAT LEDO	0	8	8	1	<b>17</b>
32	KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG	1	6	5	2	<b>14</b>
33	KANTOR CAMAT LUMAR	2	2	7	2	<b>13</b>
34	KANTOR CAMAT MONTERADO	0	8	9	2	<b>19</b>
35	KANTOR CAMAT SAMALANTAN	1	6	12	1	<b>20</b>
36	KANTOR CAMAT SANGGAU LEDO	1	7	8	1	<b>17</b>
37	KANTOR CAMAT SELUAS	0	3	6	1	<b>10</b>
38	KANTOR CAMAT SIDING	0	2	7	1	<b>10</b>
39	KANTOR CAMAT SUNGAI BETUNG	0	3	8	1	<b>12</b>
40	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	0	8	8	2	<b>18</b>
41	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA KEPULAUAN	0	4	12	1	<b>17</b>
42	KANTOR CAMAT SUTI SEMARANG	0	2	7	2	<b>11</b>
43	KANTOR CAMAT TERIAK	0	8	7	2	<b>17</b>



44	KANTOR CAMAT TUJUH BELAS	2	3	7	1	13
45	KANTOR LURAH BUMI EMAS	1	4	6	0	11
46	KANTOR LURAH SEBALO	0	2	5	0	7
47	UPTD RSUD BENGKAYANG	3	28	120	9	160
48	GUDANG FARMASI KABUPATEN BENGKAYANG	0	2	2	0	4
49	PUSKESMAS BENGKAYANG	0	5	35	2	42
50	PUSKESMAS CAPKALA	0	10	19	0	29
51	PUSKESMAS JAGOI BABANG	0	11	26	0	37
52	PUSKESMAS LEDO	0	4	37	0	41
53	PUSKESMAS LEMBAH BAWANG	0	10	28	0	38
54	PUSKESMAS LUMAR	0	8	27	1	36
55	PUSKESMAS MONTERADO	0	5	36	0	41
56	PUSKESMAS SAMALANTAN	0	12	40	0	52
57	PUSKESMAS SANGGAU LEDO	0	9	30	0	39
58	PUSKESMAS SELUAS	0	9	27	0	36
59	PUSKESMAS SIDING	0	11	22	0	33
60	PUSKESMAS SUNGAI BETUNG	0	6	30	0	36
61	PUSKESMAS SUNGAI RAYA	1	13	37	1	53
62	PUSKESMAS SUNGAI RAYA KEPULAUAN	0	3	15	0	18
63	PUSKESMAS SUTI SEMARANG	0	6	20	0	26



64	PUSKESMAS TERIAK	0	13	24	0	<b>37</b>
65	PUSKESMAS TUJUH BELAS	0	6	19	0	<b>25</b>
66	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN BENGKAYANG	0	3	1	2	<b>6</b>
67	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN CAPKALA	0	1	0	0	<b>1</b>
68	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN JAGOI BABANG	0	0	1	0	<b>1</b>
69	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN LEDO	0	1	6	3	<b>10</b>
70	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN LEMBAH BAWANG	0	0	0	0	<b>0</b>
71	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN LUMAR	0	1	0	0	<b>1</b>
72	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MONTERADO	0	2	3	0	<b>5</b>
73	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SAMALANTAN	0	1	4	0	<b>5</b>
74	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAU LEDO	0	2	1	3	<b>6</b>
75	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SELUAS	0	0	0	0	<b>0</b>
76	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SIDING	0	0	0	1	<b>1</b>
77	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SUNGAI BETUNG	0	1	0	0	<b>1</b>
78	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SUNGAI RAYA	0	1	3	2	<b>6</b>
79	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	0	1	2	2	<b>5</b>
80	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SUTI SEMARANG	0	0	0	0	<b>0</b>



81	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN TERIAK	0	1	0	0	1
82	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN TUJUH BELAS	0	2	0	1	3
83	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BENGKAYANG	0	0	0	0	0
84	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN CAPKALA	0	1	2	0	3
85	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN JAGOI BABANG	0	1	0	0	1
86	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LEDO	0	0	2	0	2
87	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LEMBAH BAWANG	0	1	0	0	1
88	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LUMAR	0	0	0	0	0
89	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MONTERADO	0	1	0	0	1
90	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SAMALANTAN	0	2	1	0	3
91	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SANGGAU LEDO	0	1	0	0	1
92	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SELUAS	0	0	3	0	3
93	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SIDING	0	0	0	0	0
94	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SUNGAI BETUNG	0	1	0	0	1



95	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SUNGAI RAYA	0	1	1	0	2
96	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	0	0	2	0	2
97	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SUTI SEMARANG	0	0	0	0	0
98	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TERIAK	0	4	0	0	4
99	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TUJUH BELAS	0	0	0	0	0
100	SEKOLAH DI UPTD BENGKAYANG	1	16	141	45	203
101	SEKOLAH DI UPTD CAPKALA	0	5	54	2	61
102	SEKOLAH DI UPTD JAGOI BABANG	0	15	99	8	122
103	SEKOLAH DI UPTD LEDO	0	17	85	13	115
104	SEKOLAH DI UPTD LEMBAH BAWANG	0	5	34	4	43
105	SEKOLAH DI UPTD LUMAR	0	7	46	14	67
106	SEKOLAH DI UPTD MONTERADO	0	16	134	30	180
107	SEKOLAH DI UPTD SAMALANTAN	0	17	112	23	152
108	SEKOLAH DI UPTD SANGGAU LEDO	0	11	86	40	137
109	SEKOLAH DI UPTD SELUAS	1	15	123	20	159
110	SEKOLAH DI UPTD SIDING	0	17	62	3	82
111	SEKOLAH DI UPTD SUNGAI BETUNG	0	4	68	9	81



112	SEKOLAH DI UPTD SUNGAI RAYA	0	13	81	57	<b>151</b>
113	SEKOLAH DI UPTD SUNGAI RAYA KEPULAUAN	0	8	99	57	<b>164</b>
114	SEKOLAH DI UPTD SUTI SEMARANG	0	6	48	5	<b>59</b>
115	SEKOLAH DI UPTD TERIAK	0	18	138	26	<b>182</b>
116	SEKOLAH DI UPTD TUJUH BELAS	1	9	57	17	<b>84</b>
<b>TOTAL</b>		21	676	2824	558	<b>4079</b>

Sumber data : Data Pegawai BKPSDM Tahun 2021

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagaimana Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.068.465.241.615,00 dan terealisasi sebesar Rp. 974.709.738.944,74 Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021**

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.068.465.241.615,00</b>	<b>1.057.228.530.299,50</b>	<b>(11.236.711.315,50)</b>	<b>98,95</b>
A	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	62.981.408.348,00	54.944.247.131,91	(8.037.161.216,09)	87,24
	Pajak Daerah	17.309.650.000,00	16.866.270.060,42	(443.379.939,58)	97,44
	Retribusi Daerah	3.899.633.660,00	3.047.880.372,50	(851.753.287,50)	78,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.504.381.110,00	5.504.381.099,93	(10,07)	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.267.743.578,00	29.525.715.599,06	(6.742.027.978,94)	81,41
B	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	946.539.203.267,00	939.173.286.569,86	(7.365.916.697,14)	99,22
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.414.292.000,00	884.358.559.102,00	(12.055.732.898,00)	98,66
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.124.911.267,00	54.814.727.467,86	4.689.816.200,86	109,36
C	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	58.944.630.000,00	63.110.996.597,73	4.166.366.597,73	107,07
	Pendapatan Hibah	0,00	8.223.950.597,73	0,00	0,00
D	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.427.873.898.426,00	1.070.035.923.296,31	(357.837.975.129,69)	74,94
	Belanja Tidak langsung	817.335.839.623	738.564.054.332,31	(78.771.785.290,69)	90,36
	Belanja Pegawai	433.715.069.433,00	421.975.718.861,18	(11.739.350.571,82)	97,29
	Belanja Hibah	20.699.551.679,00	11.215.743.750,00	(9.483.807.929,00)	54,18
	Belanja Bantuan Sosial	5.713.668.000,00	4.764.887.714,00	(948.780.286,00)	83,39
	Belanja Tidak Terduga	3.297.118.014,00	778.517.426,00	(2.518.600.588,00)	23,61
	Belanja Bagi Hasil	2.120.928.366,00	2.120.928.366,00	0,00	100
	Belanja Bantuan Keuangan	172.039.191.398,00	171.908.440.253,00	(130.751.145,00)	99,92
E	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	790.288.371.536,00	386.969.828.108,00	(403.318.543.428,00)	0,49
	Belanja Barang dan Jasa	357.207.550.511,00	300.607.704.007,13	(56.599.846.503,87)	84,15



	Belanja Modal Tanah	385.658.000,00	134.650.000,00	(251.008.000,00)	34,91
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.425.593.062,00	41.277.403.124,00	2.851.810.062,00	107,42
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.157.587.250,00	33.076.683.820,00	(17.080.903.430,00)	65,95
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	333.300.692.713,00	77.226.407.886,00	(256.074.284.827,00)	23,17
	Belanja Modal aset Tetap Lainnya	10.811.290.000,00	4.948.838.089,00	(5.862.451.911)	45,77
F	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	359.408.656.811,00	0,00	(359.408.656.811,00)	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.408.656.811,00	108.549.341.110,85	(859.315.700,15)	99,21
	Penerima Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	37.500.000.000,00	(212.500.000.000,00)	15,00
G	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021



### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan kondisi pembangunan beberapa tahun sebelumnya dan mempertimbangkan informasi terkait kondisi Kabupaten Bengkayang saat ini dan pandemi Covid-19 dengan perangkat pendekatan analisis (faktor eksternal dan internal), terdapat beberapa pokok permasalahan yang masih menjadi perhatian utama yakni :

1. Masih kurangnya akses terdapat infrastruktur Dasar;
2. Masih lemahnya pengembangan sektor ekonomi berdasarkan potensi ekonomi kewilyahan;
3. Kurang penataan wilayah serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan tingginya persentase kemiskinan;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

#### b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan memgerakkan seluruh stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *takeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, yaitu:



**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN  
BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG  
BERSIH DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Maju : diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021–2026 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas), smart technology (pemanfaatan teknologi yg cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), smart energy (pemanfaatan energi yg cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan smart citizenz (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas



pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

**Mandiri** : diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yag lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Sejahtera** : diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupate Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka



harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

**Berdaya Saing** : diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

**Pemerintahan yang bersih** : diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public.



Pemerintahan yang terbuka : diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik. Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Bengkayang berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua. Visi Kabupaten Bengkayang juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



## Penjabaran Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bengkayang(2021-2026)

### Visi

1. Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang 2021-2026: “Terwujudnya Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan berdaya saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka”

### Misi

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas



ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status



desa menjadi desa mandiri.

6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

**c. Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Visi Kabupaten Bengkayang adalah “Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka”. Visi ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program- program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam



pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9. Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
10. Program Perlindungan Perempuan;
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
12. Program Perlindungan Khusus Anak;
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
15. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
16. Program Pembinaan Perpustakaan;
17. Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan;



18. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Pendidikan Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
19. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta
21. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial.

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja;
2. Program Hubungan Industrial;
3. Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pendaftaran Penduduk;
6. Program Pencatatan Sipil;
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
9. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
10. Program Aplikasi Informatika;
11. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;



12. Program Promosi Penanaman Modal;
13. Program Pelayanan Penanaman Modal;
14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
16. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
17. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
18. Program Pengelolaan Arsip;
19. Program Perlindungan dan Penyelematan Arsip;
20. Program Perizinan Penggunaan Arsip;
21. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
22. Program Perizinan Usaha Pertanian;
23. Program Penegndalian Izin Usaha Industri;
24. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
25. Program Perekonomian dan Pembangunan
26. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
27. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
28. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
29. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanana Pembangunan Daerah;
30. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Program Kepegawaian Daerah;
32. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;



34. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
35. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
37. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
38. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
39. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
40. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
41. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sekaligus Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Pengembangan Permukiman;
6. Program Penyelenggaraan Jalan;
7. Program Pemeberdayaan Sosial;
8. Program Rehabilitasi Sosial;
9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;



11. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
13. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
14. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
15. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
16. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
17. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
18. Program Pengembangan UMKM;
19. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
20. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
21. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
22. Program Perekonomian Dan Pembangunan; dan
23. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Maju Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;



5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
6. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan;
7. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Program Pengembangan Ekspor;
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
11. Program Pemasaran Pariwisata;
12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
6. Program Penyuluhan Pertanian.
7. Program Penataan Desa;

Misi 6: Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Optimal

Misi diatas didukung oleh program:



1. Program Penyelenggaraan Jalan; dan
2. Program Pengelolaan Perbatasan.

Misi 7: Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Penataan Bangunan Gedung;
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Penanggulangan Bencana;
6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
7. Program Penanganan Bencana;
8. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan;
9. Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan;
10. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
11. Program Penatagunaan Tanah;
12. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
13. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
15. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
16. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);



17. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
19. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
20. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
21. Program Pengelolaan Persampahan; dan
22. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan membutuhkan arah kebijakan agar pencapaian pembangunan selama 5 tahun dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan dalam RPJMD 2021-2026 diarahkan pada:

1. Tahun Pertama (2021): Tahap Pemulihan, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar -1,99 persen pada tahun 2020. Tahap pemulihan ini



merupakan upaya mengatasi pandemi Covid-19 di daerah agar kondisi kesehatan masyarakat terus membaik. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah pembangunan pada tahun pertama ini fokus pada upaya perbaikan *RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026* kesehatan melalui beberapa program seperti sosialisasi penerapan protokol kesehatan, distribusi vaksin gratis, penyediaan obat dan oksigen, peningkatan fasilitas dan alat kesehatan termasuk kamar pasien Covid dan alat untuk pengujian PCR/antigen, penambahan ruang isolasi, tambahan insentif tenaga kesehatan, pemantapan kordinasi dengan instansi vertikal (TNI dan Polri) untuk mengatasi Covid-19, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu perbaikan ekonomi masyarakat juga harus menjadi fokus perhatian, terutama di wilayah tertentu yang paling terdampak. Perbaikan ekonomi dilakukan melalui perbaikan data penduduk miskin dan data tenaga kerja terdampak *by name by address* (nama dan alamat yang jelas), alokasi bantuan untuk masyarakat terdampak bisa melalui bantuan kebutuhan pokok dan atau melalui bantuan langsung tunai, subsidi bagi tenaga kerja, subsidi modal kerja, subsidi bunga pinjaman untuk pekerja informal terdampak covid, pelatihan tenaga kerja sebagai kebijakan antisipasi pasca covid, kebijakan relaksasi (keringanan atau penghapusan) pajak daerah untuk menggerakkan kembali perekonomian, realokasi dan refocusing anggaran daerah, dan lain-lain. Kunci utama keberhasilan tahapan ini adalah pada kebijakan fiskal daerah khususnya terkait dengan kebijakan penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBD dan juga pada birokrasi daerah atau tata kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan upaya perbaikan kesehatan dan sekaligus perbaikan ekonomi masyarakat pada tahapan ini (tahun 2021) akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah pada tahapan (tahun) selanjutnya.



2. Tahun Kedua (2022): Tahap Pemantapan, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini membutuhkan upaya maksimal terutama dari aspek regulasi daerah, perencanaan, dan penganggaran. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar mengharuskan ketersediaan anggaran yang relatif besar, mengingat adanya perlambatan pembangunan infrastruktur selama pandemi di tahun 2020-2021. Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat untuk menarik investasi dan mendorong kembali normalnya pertumbuhan ekonomi di sekitar angka 5 persen hingga tahun 2026. Banyak kajian yang telah membuktikan bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Sementara perbaikan tata kelola pemerintahan (birokrasi) membutuhkan penyesuaian regulasi dan manajemen pemerintahan. Terkait dengan pemantapan pemulihan ekonomi dibutuhkan birokrasi yang ramah pada pasar (investasi), yaitu birokrasi yang sederhana, melayani, dan memudahkan. Untuk itu diperlukan penyesuaian berbagai peraturan di daerah serta dibutuhkan pula mekanisme kerja baru yang lebih mengandalkan penggunaan teknologi informasi (infrastruktur). Artinya, pada tahapan ini sasaran utama pembangunan daerah mengarah pada terwujudnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang akan membantu pemantapan pemulihan ekonomi daerah.
3. Tahun Ketiga (2023): Tahap Pemantapan Lanjutan, yaitu tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan infrastruktur dasar dan birokrasi yang ramah pada pasar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi terutama produksi sektor primer yang merupakan sektor unggulan daerah, seperti pertanian,



perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bahkan peningkatan ekonomi tidak hanya terjadi pada produksi tetapi juga pada nilai tambah-nya (*value added*) karena percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor Industri dan perdagangan. Dengan demikian pada tahapan ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekaligus nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang umumnya berada di perdesaan dan juga di kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Artinya, tahap pemantapan lanjutan ini sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang pada proses berikutnya akan membantu meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun, juga akan mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan. Disamping itu tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana percepatan penyediaan infrastruktur dasar akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sehingga membantu *RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026* peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahapan ketiga ini sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan status desa, peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Tahun Keempat (2024): Tahap Penguatan, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Tahap penguatan ini merupakan peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata sehingga pada tahapan ini kondisi perekonomian kabupaten Bengkayang betul-betul pulih dan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan



pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,14 persen. Perekonomian daerah yang pulih ini diharapkan tidak sekedar menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kembali tinggi di atas 5 persen seperti sebelum adanya pandemi covid, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran secara signifikan. Dengan demikian, sasaran utama pada tahapan ini adalah penguatan proses pemulihan ekonomi daerah sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang berkualitas, yaitu kondisi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan dimana pendapatan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, dan kesempatan kerja bertambah.

5. Tahun Kelima (2025): Tahap Pencapaian, yaitu mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka. Tahap pencapaian ini merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya yang mengarah pada terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah: (a) terwujudnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan *RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026* Yang Maha Esa; (b) terwujudnya kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha; (c) terwujudnya penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan



ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; (d) terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat; (e) terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri; (f) terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan; dan (g) terwujudnya proses pembangunan daerah melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

6. Tahun keenam (2026): Tahap Transisi, yaitu mempersiapkan transisi kepemimpinan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh kepercayaan rakyat Kabupaten Bengkayang pada lima tahun berikutnya (2026-2031). Tahap transisi ini akan meninggalkan capaian berupa kondisi masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing kepada pemimpin Kabupaten Bengkayang lima tahun berikutnya untuk dikelola menuju visi baru jangka menengah 2026-2031. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah berjalannya proses transisi kepemimpinan daerah dengan baik dan berkualitas yang ditandai oleh terwujudnya visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka.



### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Perencanaan Pembangunan Daerah

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, yaitu : Pertama, SPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat, SPM dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum pelaksanaan SPM di Kabupaten Bengkayang adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang. Rencana Pencapaian SPM dalam dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKP). Target Tahunan Pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan



Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun 6 (enam) bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Bidang Urusan pendidikan, Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Urusan Sosial, Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Urusan Kesehatan.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAY

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasip

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	67,87	68,04	0,17
2	Angka Kemiskinan	%	6,62	6,48	-0,14
3	Angka Pengangguran	%	3,91	4,42	0,51
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,99	4,33	6,32
5	PDRB Per Kapita	Rp/Tahun	30.285.488	32.028.706	1.743.218
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		0,274	0,263	-0,011

**ANG**

garaan  
arakan  
onal.

an (%)
)
7
14
i1
2
743.218
11

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO (1)	URUSAN (2)	NO. (3)	IKK (4)	RUMUS/PERSAMAAN (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SUMBER DATA	KETETERANGAN (7)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	3.866	73,33%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					5.272			
		7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten}} \times 100\%$	33.625	119,68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					28.095			
		8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}} \times 100\%$	13.522	121,92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					11.091			
		27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten}} \times 100\%$	1.232	2,61%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					47.147			
2	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	2	5,88%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					34			

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO (1)	URUSAN (2)	NO. (3)	IKK (4)	RUMUS/PERSAMAAN (5)	CAPAIAN KINERJA (6)		SUMBER DATA	KETETERANGAN (7)
3	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$	207	0,07%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					289.688			
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$	2	100,00%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					2			
		4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	4.789	84,87%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					5.643			
		5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	4.183	77,56%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					5.393			
		6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	4.275	98,01%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					4.362			
		7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$	10.153	50,98%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					19.917			

		8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	10.413 29.069	35,82%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		9	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-29 tahun di Kabupaten	17.935 167.605	10,70%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	16.331 21.309	76,64%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	9.695 58.807	16,49%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	1.903 2.282	83,39%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	463 545	84,95%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	908 2.507	36,22%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	1.316 5.995	21,95%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka Kelahiran Total	4.362		Dinas Kesehatan dan Keluarga	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100%	32.356	68,37%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
				Jumlah Pasangan Usia Subur	47.327			
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	4.605 47.327	9,73%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO (1)	URUSAN (2)	NO. (3)	IKK (4)	RUMUS/PERSAMAAN (5)	CAPAIAN KINERJA (6)	SUMBER DATA	KETETERANGAN (7)
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Tingkat Kemantapan jalan Kab/Kota	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	684,07	53,44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				$\frac{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$	1.280,00		
		2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	175,586	20,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100 \%$	877,930		
		3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)	7.038	39,10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100 \%$	18.000		
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	49.496	93,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		$\frac{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.}} \times 100 \%$	53.112				
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	36.876	45,16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		$\frac{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Bengkayang}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Bengkayang}} \times 100 \%$	81.651				
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	33	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		$\frac{\text{jumlah IMB yang berlaku}}{\text{jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$	33				
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		$\frac{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$	0				
		Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	0				
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		$\frac{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	121				
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	6.646,78	56,2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		$\frac{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100 \%$	11.818,13				

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 %	7	100%	DPRPLH	
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	7			
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penvediaan Rumah Lavak Huni ----- x 100 %	0	0%	DPRPLH	SUKET
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0			
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 %	7,96	85,13%	DPRPLH	
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	9,35			
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- x 100 %	5.561	7,68%	DPRPLH			
		Jumlah total unit rumah Kabupaten	72.397					
5	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 %	180	0,25%	DPRPLH			
		Jumlah unit rumah kabupaten	72.397					
7	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ----- x 100%	358.152	100%	DPRPLH	
				seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	358.152			
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100%	0	0%	DPRPLH	SUKET
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0			
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100%	0	0%	DPRPLH	SUKET
Luas izin lokasi yang diterbitkan	0							
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL); ----- x 100%	0	0%	DPRPLH	SUKET		
		Jumlah penerima tanah obyek landreform	0					
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100%	0	0%	DPRPLH	SUKET		
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0					
		7	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100%	0		DPRPLH	SUKET
				jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0			

8	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	$\frac{IKA \times 30\% + IKU \times 30\% + IKTL \times 40\%}{\dots\dots\dots} \times 100\%$ $\dots\dots\dots \times 30\% + \dots\dots\dots \times 30\% + \dots\dots\dots \times 40\% =$	18,8+36,95+7,53	63,28	DPRPLH		
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	26,367 m3/tahun	11,21%	DPRPLH		
				Total vol timbunan sampah Kabupaten	235,178 m3/tahun				
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	----- x 100%	9	40,91%	DPRPLH	
					Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	22			

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
9	Ketentraman, k	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100%	16		1 Satpol-PP	
					16			
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100%	2	13,33%	Satpol-PP	
					15			

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	
10	BENCANA	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	249.338		BPBD		
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.100		BPBD		
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.569		BPBD		
		4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ Perangkat Daerah ----- x 100 %	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	6	33%	BPBD	
						18			
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10-15 MENIT			BPBD	suket		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	
11	Sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 %	79	11,30%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	699				
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 %	14.145	100,00%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	14.145				

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100%	348.606.000	0,033%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD	1.068.465.241.615			
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ----- x 100%	54	0,052%		
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	102.928			
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000	9	0,0065%		
				Jumlah penduduk perempuan	139.258			

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		
13	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100%	3	100%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	3					
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100%	0	0%			Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	suket
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0					
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100%	4,33		BPS				

			Jumlah tenaga kerja	126.749		
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak -----X 100%	205	32,85%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan	624		
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten		----- x 100%	72		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah pencari yang terdaftar	153		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
14	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan ass	43	0,43	Dinas Koperasi, UK
				Jumlah seluruh koperasi	100		
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausa	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausa	493	0,135738	Dinas Koperasi, UK
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	3632		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
15	Transmigrasi	1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya =	1		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  keputusan bupati bengkayang nomor : 197/Dinkopnakertrans /tahun /2018 tentang penetapan status bagi 70 (tujuh puluh) kepala keluarga trnsmigrasi yang menempati unit permukiman transmigrasi di satuan permukiman desa semunying jaya kecamatan jagoi babang kabupaten bengkayang

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
16	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan (Ton) ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	55 55	100%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
17	Administrasi Kependudukan dan Catatan	1	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran ----- x 100%	94.389	95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	98.955		
		2	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100%	171.741	84%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	204.245		
		3	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA ----- x 100%	24.093	28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				jumlah anak usia 01-7 tahun	86.361		
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100%	9	41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				jumlah OPD	22		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
18	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100%	7	22,58%	DPMPDDT
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	31		
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100%	12	18,75%	DPMPDDT
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	64		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
19	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut)</p> <p>o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)</p> <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</li> <li>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</li> <li>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</li> </ol>	0,68		
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	<p>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota</p> <p>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten dan Kota</p>	73	14,60%	
					500		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	
20	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	2,17%	Diskominfo		
				----- x 100%	46				
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	0,00%	Diskominfo		suket
				----- x 100%	46				
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	180.846	62,45%	Diskominfo		
				----- x 100%	289.587				
			Jumlah penduduk						

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	NO	RUSA	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	TETERANG
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
21	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	33.502,00	15,76%	DPMPSTP		
				----- x 100 %	212.637,00				
		2	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	33	100%	DPMPSTP		
				----- x 100 %	33				
				Jumlah IMB yang berlaku					

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
22	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	125	0,17%	Disporapar	
				74.037				
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten ----- x 100 % jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	340	0,46%	Disporapar	
		74.037						
		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	0	Disporapar	SUKET
23	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	0	0,00%	Disporapar	SUKET
				0				
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	14.251	10,6%	Disporapar	
				135.076				
		3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	26.725	13,07%	Disporapar	
		204.480						
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB	333.256.800	3,84%	Disporapar			
		8.674.234.000						
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100% Jumlah total PAD	2.991.468.670	7,83%	Disporapar			
		38.184.465.289						

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
24	Statistik	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	43	100%	BPS	
				43				
		2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD	43	100%	BPS	
				43				

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
25	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi - Jumlah area penilaian x 100%	0	0%	Diskominfo	SUKET
					5			

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	
26	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	1308		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{\sum UPLM}{\sum ALM} \times 100$	0		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SUKET	
27	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. $T = (a + i + s + j) / 4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	75,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
					100				100
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0	32,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
				0	0				0

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
----	--------	-----	-----	-----------------	-----------------	--	-------------	--------------

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
28	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP) -	8.399,613	Dinas Perikanan dan Kelautan	

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
29	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (TON)	68.353	284%	Dnas Pangan, Pertanian dan Perkebunan
				Luas Panen (Ha)	24.091		
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	491-436	13%	Dnas Pangan, Pertanian dan Perkebunan
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	436		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
30	perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	132	4,60%	Disperindag
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten	2.872		
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	11.686,20	23,09%	Disperindag
				RDKK	50.622,02		
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	45	4,50%	Disperindag
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	1000		

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
----	--------	-----	-----	-----------------	-----------------	-------------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$	90	15,13%	Disperindag
				595			
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	<p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%  Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%  Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>	4	50,00%	Disperindag
				8			
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	25	21,7%	Disperindag
				115			
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0	0%	Disperindag	SUKET	
		0					
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0	0%	Disperindag	SUKET	
		0					
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1) Keterkinian informasi industri :  - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)  - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</p> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :  - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)  - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)  Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>		85%	Disperindag

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)

32	TRANSKRIPSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100 % Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	0	0,00%	BPKPAD	
					0			
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100 % total jumlah dokumen yang telah dirinci	10	100,00%	Diskominfo	
					10			

### INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
33	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100 % jumlah kontrak keseluruhan tahun n	6	85,714286	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					7			
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	101	2,65%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					3810			
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100 % Total belanja langsung	591.458.486.392,00	75,83%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					780.001.750.341,00			

### INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
34	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	1.216.357.833.592,00	113,84%	BPKPAD	
					1.068.465.241.615,00			
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- x 100 % Jumlah PDRB non migas	62.981.408.348,00	675873%	BPKPAD	
					9.318.527,80			
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2		INSPEKTORAT	
		4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- x 100 % jumlah belanja APBD	709.501.482.920,31	66,40%	BPKPAD	
			1.068.465.241.615,00					
		5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3		INSPEKTORAT	
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	10		INSPEKTORAT	

### INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETETERANGAN
----	--------	-----	-----	-----------------	-----------------	--	-------------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
35	Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- x 100 % Total belanja APBD dikurangi satu	1.070.035.923.296,31 1.427.873.898.426,00	-0,25	BPKPAD
2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- x 100 % Total PAD dalam APBD dikurangi satu	54.944.247.131,91 62.981.408.348,00	-0,13	BPKPAD	
3		Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4	4	BPKPAD	
4		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA ----- x 100 % Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	133.241.948.114,04 -	12,08%	BPKPAD	
						1.103.305.077.600,00	

#### INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
36	INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	74	5,91%	BKDPSDM
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1252			
		Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	74	5,91%	BKDPSDM
				Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1252		
		Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	3357	465%	BKDPSDM
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	722		

28095

11091





92,05





















211.516.064.834,00

1.216.357.833.592,00











































































































































































































































































































































## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Bab Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagai dasar rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD, APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Pengukuran target kinerja dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.

### A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Pengukuran Realisasi Kerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang	- Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang (Juta Rupiah)	17.309.650.000	16.866.270.060,42	97,52
		- Penerimaan Retribusi Daerah (Juta Rupiah)	3.899.633.660	3.047.880.372,50	78,16
2.	Meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Bengkayang	- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,00%	16,23%	95,47
		- Kontribusi sektor pertanian, perkebunan hadap PDRB	80%	70,00%	87,50



		- Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB	80%	65,00%	81,25
		- PDRB Sektor Pariwisata	3,83 %	3,84%	100,26
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	- Pengeluaran per kapita	Rp.960.000	Rp.510.824	53,21
4.	Meningkatkan kualitas pendidikan	- Angka rata-rata lama sekolah	9,5	6,82	71,79
		- Penduduk melek huruf	96%	81,35%	84,74
		- Angka Kelulusan Sekolah	6,75 %	6,75 %	100
5.	Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama	- Jumlah konflik horizontal akibat SARA	Tidak Ada	Tidak Ada	100
		- Jumlah konflik kepentingan	Tidak Ada	Tidak Ada	100
6.	Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	- Angka kriminalitas yang terselesaikan	50 Kasus	50 Kasus	100
7.	Meningkatnya derajat/kualitas kesehatan masyarakat	- Angka harapan hidup	75 Tahun	73,84 Tahun	98,45
8.	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga	- Jumlah pemuda / atlit yang berprestasi	8 Orang	7 Orang	87,50
		- Jumlah Cabor yang berprestasi	6 Orang	4 Orang	66,67
9.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	- Opini BPK	WTP	WDP	-
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	60 (B)	58,89 (CC)	98,15
		- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00 (B)	83,38 (B)	98,09
		- Nilai LPPD	3.003	2,090	69,60
10.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi	- Indeks kualitas air	52,5 %	51,50%	98,10
		- Indek kualitas udara	90,62%	92,10%	101,63
		- Indeks kualitas tutupan lahan	38,27%	36,12%	94,38
		- Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak huni	73,34%	58,58%	79,87
		- Luas Kawasan Kumuh	65,00%	113,29%	174,29
11.	Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	- Rasio ruas jalan dalam kondisi baik	70,00%	53,44%	76,34
12.	Meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan	- Rasio Desa yang terhubung dengan pusat Kecamatan dan Kabupaten	75,00%	100,00%	133,33
13.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	- Ketersediaan air bersih	50,00%	60,62%	121,24
		- Rasio Elektrifikasi	88,70%	81,96%	92,40%



## B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang
  - a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 1**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang	1. Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rupiah)	17.309.650.000	16.866.270.060,42	97,52
		2. Penerimaan retribusi Daerah (Juta Rupiah)	3.899.633.660	3.047.880.372,50	78,16
Capaian Kinerja					87,20
<b>Memuaskan</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis 'meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang' ditahun 2021 sebesar 87,20%, hal ini didasari dengan adanya pencapaian dari 2 (dua) indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu capaian penerimaan pajak daerah sebesar 97,52% dari hasil penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 17.309.650.000 dapat terrealisasinya sebesar Rp. 16.866.270.060,42 dan capaian Penerimaan Detribusi Daerah sebesar 78,16% dari hasil Penerimaan Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 3.899.633.660, terealisasinya sebesar Rp. 3.047.880.372,50.

Dalam hal ini pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang tahun 2021 di kategorikan “ memuaskan”.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	804.830.000	804.830.000	100	87,20	N/a
		2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	897.386.500	897.386.500	100		
		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	879.680.025	833.780.025	94,78		
		Total	2.581.896.525	2.535.996.525	98,22		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,22% dan realisasi capaian kinerja sebesar 87,20%, maka dengan ini pencapaian sasaran strategis meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya n/a.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang di dukung oleh adanya ketersediaan anggaran sebesar Rp. 2.581.896.525, realisasi Rp. 2.535.996.525 dengan penyerapan anggaran sebesar 98,22%. Dalam hal ini sangatlah didukung oleh beberapa program dalam pelaksanaan kegiatannya diantaranya adalah:

1. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 804.830.000, terrealisasi sebesar Rp. 804.830.000 penyerapannya sebesar 100%;
2. Program pengelolaan keuangan daerah anggaran sebesar Rp. 897.386.500, terrealisasi sebesar Rp. 897.386.500 dan penyerapan anggaran sebesar 100%;
3. Program pengelolaan barang milik daerah dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 879.680.025, terrealisasi sebesar Rp. 833.780.025 penyerapan anggarannya sebesar 94,78%.



- d. Tabel 2.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2021 dan target RPJMD  
Sasaran Strategis 1**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang	1. Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rp)	12.237.000	16.868.913	17.309.650	4.642.913
		2. Penerimaan Retribusi Daerah (Juta Rp)	2.092.000.	2.997.567	3.899.633	905.567.
			14.329.000	19.877.480		5.548.480

Perbandingan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan ditahun 2021 sebesar Rp. 5.548.480.830 yang di dapat dari hasil penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 4.642.913.015 dan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 905.567.815. Hal tersebut menunjukkan adanya modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.

- e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan /kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang tahun 2021 meningkat dikarenakan adanya sumber-sumber PAD yang



sudah berjalan dengan maksimal yakni penarikan pajak daerah, retribusi daerah dan sektor pasar telah mencapai target yang telah di tetapkan sehingga sistem pengelolaan komponen PAD berjalan dengan optimal.

Hambatan / Kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang tahun 2021 adalah :

1. Tidak diketahuinya potensi PAD menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.
2. Komunikasi antara OPD penghasil perlu dimaksimalkan serta dukungan DPRD sangat diperlukan
3. Lemahnya basis data pajak dan retribusi daerah disebabkan pendataan pajak dan retribusi daerah tidak dimaksimalkan
4. Pemutakhiran data dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah tidak dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh
5. Masih banyak OPD yang memprioritaskan penyerapan anggaran belanja dibanding mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
6. Terjadi fenomena plypaper effect (suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah) dimana Pemerintah Daerah merespon belanja daerah lebih banyak menggunakan dana transfer pusat : DAU, DAK dan DBH untuk kepentingan belanja daerah dari pada menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
  - ✓ dentifikasi Jumlah OP/OR yang sudah terdaftar dengan Jumlah OP/OR yang belum terdaftar menjadi *POTENSI* untuk dilakukan pendataan dan penagihan
  - ✓ Verifikasi Lapangan / Pendataan secara berkala
  - ✓ Pemutakhiran data Pajak dan Retribusi Daerah
  - ✓ Membangun sistem pelayanan dan pembayaran berbasis teknologi
2. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah :



- ✓ Mewajibkan Perusahaan untuk mengurus HGU Perkebunan yang menjadi potensi penerimaan BPHTB.
- ✓ Optimaliasi Objek Pajak Baru : Pajak Sarang Burung Walet Pajak Parkir, Pajak Air Tanah (Perbup Pajak Air Tanah Masih dalam Proses).
- ✓ Memberikan Ijin Hotel Bagi Pelaku usaha yg memiliki Kamar diatas 10 (agar Pajak Hotel dapat terjaring).
- ✓ Melakukan Pemeriksaan Pajak atas Laporan yang tidak Benar.
- ✓ Optimalisasi retribusi kekayaan daerah yang menjadi potensi PAD BKY : sewa mess, sewa lahan milik Pemda, sewa tiang reklame milik Pemda, alat berat, ret rekreasi dan olahraga, sewa mess dll.
- ✓ Penegakan Hukum bagi penunggak Pajak.

➤ **Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bengkayang( sector strategis)

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 2**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama ( IKU)	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Bengkayang	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB)	17,00%	16,23%	95,47
		Kontribusi sektor pertanian, perkebunan hadap PDRB	80,00%	70,00%	87,50%
		Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB	80,00%	60,00%	81,25%
		PDRB Sektor Pariwisata	3,83 %	3,84%	100,26
Capaian Kinerja					91,12
<b>Sangat memuaskan</b>					



Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 sebesar 91,12 %. Pencapaian kinerja sasaran strategisnya di dukung oleh capaian kinerja dari ke 4 (empat) indikator kinerja utama pemerintah kabupaten bengkayang yang terdiri meliputi indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 95,47% dari yang ditargetkan 17,00% realisasinya 16,23%, indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan hadap PDRB capaian kinerjanya 87,57% dari target 80,00% dan realisasi 70,00% indikator kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB capaian kinerjanya sebesar 81,25% dari yang ditargetkan 80,00% dan terealisasinya 81,25% serta indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 100,26% dari yang ditargetkan 3,83 % dan realisasinya 3,84%. Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 dikategorikan “sangat memuaskan”.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target Rp.	Realisasi Rp	%		
1.	Meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Bengkayang	1. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	71.197.600	71.197.600	100	91,12	
		2. Program Pembangunan Prasarana Pertanian	9.178.188.492	9.178.188.492	100		
		3. Program Pengembangan Prasarana Pertanian	255..501.965	255.501.965	100		
		4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.930.289.200	1.930.289.200	100		
		5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.499.789.416	2.347.126.400	93,89		
		6. Program	30.000.000	30.000.000	100		



		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
		7. Program Pemasaran Pariwisata	208.323.450	208.323.450	100		
		8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	578.916.841	378.916.841	65,45		
		Total	14.752.296.964	14.399.543.948	97,61		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 97,61% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 91,12 % maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya n/a (lazim).

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bengkayang (sektor strategis) sangatlah dipengaruhi oleh beberapa program kerja seperti:

1. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ketersediaan anggaran sebesar Rp. 71.197.600, realisasi Rp. 71.197.600 penyerapan anggaran sebesar 100.
2. Program pembangunan prasarana pertanian ketersediaan anggaran sebesar Rp. 9.178.188.492,realisasi Rp. 9.178.188.492 penyerapan anggaran sebesar 100%.
3. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB Ketersediaan anggaran sebesar Rp. 255..501.965, realisasi Rp. 255.501.965 penyerapan anggaran sebesar 100%.
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ketersediaan anggarannya sebesar Rp. 1.930.289.200, realisasinya sebesar Rp. 1.930.289.200 penyerapan anggaran sebesar 100 %.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan ketersediaan anggarannya sebesar Rp. 2.499.789.416, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.347.126.400 dengan penyerapan anggarannya sebesar 93,89%.



6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 30.000.000, realisasinya Rp. 30.000.000 penyerapan anggaran sebesar 100%.
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ketersediaan anggaran Rp.208.323.450, realisasi Rp. 208.323.450 dengan penyerapannya sebesar 100%.
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi ketersediaan anggaran Rp. 578.916.841, realisasi Rp. 378.916.841 penyerapan anggaran sebesar 65,45%.

### C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

a. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.7. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2021 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Bengkayang	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,60%	16,23%	0	10,63%
		Kontribusi sektor pertanian, perkebunan hadap PDRB	0	70,00%	33,63	Tidak ada
		Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB	0	60,00%	0	Tidak ada
		PDRB Sektor Pariwisata	3,38, %	3,84%	0	0,46%

Perbandingan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,45% dari tahun sebelumnya (2020) hal ini dikarenakan ke 2 (dua) indikator kinerja utama pada sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang tidak ada angka untuk dijadikan perbandingan dan ke tiga (3) indikator pendukung yang ada diperjanjian kinerja



pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak terkaper dalam indikator RPJMD dikarenakan adanya kekeliruan dalam penetapan IKU sebelumnya ketiga indikator tersebut antara lain kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB serta PDRB Sektor Pariwisata.

b. Analisis penyebab / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan jumlah penduduk terhadap permintaan atas barang dan jasa menurun serta sektor pariwisata banyak yang ditutup yang mengakibatkan sejumlah produksi ikut menurun.

Hambatan dan kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang 2021 antara lain:

1. Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan saat ini sehingga menyebabkan terburuknya sektor pariwisata dan menurunnya pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang, keterbatasan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik dalam manajemen;
2. Keterbatasan kemampuan teknis dalam pemenuhan bahan baku / bahan penolong industri dan penguasaan industri teknologi di Kabupaten Bengkayang.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Bengkayang 2021 telah dilakukan

1. Pembinaan terhadap sektor pariwisata yang terkena dampak pandemi covid-19 sehingga sektor pariwisata tersebut dapat kembali beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
2. Peningkatan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkayang;
3. Peningkatan kemampuan teknologi industri di Kabupaten Bengkayang dengan cara meningkatkan investasi di kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan



dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

➤ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 3**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp)	960.000	510.824	53,21
<b>Cukup Berhasil</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada indikator pengeluaran perkapita tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 960.000 dengan realisasi sebesar Rp. 510.824 sehingga capaian kinerja pada indikator pengeluaran perkapita sebesar 53,21 %. Pencapaian kinerja sasaran strategis dikategorikan “cukup berhasil”.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi(%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	170.831.300	170831300	100	53,21	N/A



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi capaian Kinerjanya sebesar 53,21%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya pada sasaran ini sebesar N/A.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkayang belum didukung sepenuhnya oleh program standarisasi dan perlindungan konsumen dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 170.831.300, realisasi anggaran sebesar Rp. 170.831.300 hingga capaian kinerjanya sebesar 100% karna anggaran yang tersedia belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan yang secara maksimal.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.10. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp)	<b>758.500</b>	510.824	960.000	-247.676

pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan sebesar Rp. 247.676 dari tahun sebelumnya.

e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Penurunan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkayang disebabkan menurunnya konsumsi rumah tangga atas barang makanan dan non makanan.



Hambatan / Kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 adalah terbatasnya infrastruktur transportasi yang berdampak pada kurang lancarnya arus keluar masuk barang

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 dengan memastikan ketersediaan barang dan jasa ditingkat pasar di wilayah Kabupaten Bengkayang.

➤ **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan**

**D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 4**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah (nilai)	9,5	6,82	71,79
		2. Penduduk melek huruf (%)	96	81,35	84,74
		3. Angka Kelulusan Sekolah (%)	6,75	6,75	100
Capaian Kinerja					85,51
<b>Memuaskan</b>					



Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang sebesar 85,51% hal ini didasari dengan pencapaian dari ketiga (3) indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 71,79 % dari yang ditargetkan 9,50 dalam hal ini satuan adalah nilai, realisasi sebesar 6,82 dan capaian penduduk melek huruf sebesar 84,74% dari yang ditargetkan sebesar 96%, realisasi 81,35% serta capaian angka kelulusan sekolah sebesar 100% dari target 6,75% , realisasi 6,75%. Pencapaian kinerja sasaran di kategorikan 'memuaskan'.

#### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang telah dicapai

##### a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan non formal/keselarasan	12.6104.446014	548.968.275	0,44	85,51	41,51
		Total	12.6104.446014	548.968.275	0,44	85,51	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 0,44 % dan realisasi capaian Kinerjanya sebesar 85,51 %, maka tingkat efisiensi sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **41,51%**.

##### b. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang didukung oleh program pengelolaan pendidikan non



formal / keselarasan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 126.104.446.014, realisasi sebesar Rp. 548.968.275 penyerapan anggaran sebesar 0,44%.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.13. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah	6,53	6,82	6,82	0,29
		2. Penduduk melek huruf	76,12	81,35	81,35	5,23
		3. Angka Kelulusan Sekolah	99,44	6,75	6,75	- 92,69
			182,09	94,92		

Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 87,17%.

d. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Penurunan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang dikarenakan Covid yang menyerang dunia telah membawa dampak yang begitu besar terhadap berbagai aspek kehidupan dimulai dari aspek kesehatan, sosial kemasyarakatan dan aspek pendidikan. Sehingga dampak yang terjadi pun beragam, mulai dari dampak positif yang sifatnya konstruktif hingga dampak negatif yang sifatnya destruktif. Salah satu dampak negatif covid yang terjadi pada aspek pendidikan ialah terjadinya penurunan kualitas pembelajaran yang disebabkan adanya peralihan KBM daring ke KBM luring.

Hambatan / Kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang adalah belum meratanya akses jaringan internet, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam



mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang adalah pemerintah mensubsidikan kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahal biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh, meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru.

➤ **Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 5**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama	Jumlah konflik horizontal akibat SARA	Tidak Ada	Tidak Ada	100
		Jumlah konflik kepentingan	Tidak Ada	Tidak Ada	100
Capaian Kinerja					100
<b>Sangat memuaskan</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama di Kabupaten Bengkayang dikategorikan “sangat memuaskan”, dengan capaian kerjanya sebesar 100%.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	138.979.500	138.979.500	100	100	0%



	yang harmoni antar umat beragama	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi capaian Kinerjanya sebesar 100%, maka sasaran ini terjadi penghematan dalam penggunaan sumber dayanya.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama di Kabupaten Bengkayang didukung oleh program kegiatan yaitu: **program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial** dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 138.979.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.979.500 sehingga pencapaian penyerapan anggaran sebesar 100%.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.16. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama	- Jumlah konflik horizontal akibat SARA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%
		- Jumlah konflik kepentingan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%

Berdasarkan data diatas pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama di Kabupaten Bengkayang dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tergolong masih aman.



- e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama di Kabupaten Bengkayang dikarenakan meningkatnya rasa toleransi antar umat beragama masyarakat di Kabupaten Bengkayang dengan pemerintah dalam hal berkoordinasi dan bekerja sama yang baik dalam menjaga Kantibmas di Kabupaten Bengkayang terkait dengan kegiatan pengamanan dan penertiban di Kabupaten Bengkayang.

Hal ini sangat menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi di Kabupaten Bengkayang tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kondisi yang masih sangat diharapkan oleh setiap masyarakat maupun para calon investor yang masih ingin menanamkan investasinya serta dapat menjalankan usahanya di Kabupaten Bengkayang dengan baik.

Hambatan dan kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama di Kabupaten Bengkayang antara lain kurang komunikasi, karna sulitnya menjangkau daerah pedalaman diwilayah Kabupaten Bengkayang.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis ini, strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan serta monitoring ke daerah – daerah wilayah pedalaman di Kabupaten Bengkayang.

- **Sasaran Strategis 6 : Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat**  
a. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

**Tabel 2.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 6**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Angka kriminalitas yang terselesaikan	50 Kasus	50 Kasus	100%
<b>Sangat memuaskan</b>					



Pencapaian kinerja sasaran strategis terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bengkayang mengacu pada indikator angka kriminalitas yang terselesaikan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 50 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 50 kasus dan pencapaian kinerja sasaran strategis dikategorikan “**sangat memuaskan**”.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.265.213.190	2.088.702.950	63,97	100	36,03

Persentase realisasi anggaran pada sasaran strategis terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bengkayang sebesar 63,97 % dan realisasi pencapaian sasaran kinerjanya sebesar 100% dalam hal ini sasaran kinerja terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat, efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 36,03%.

**F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Pencapaian kinerja sasaran strategis terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bengkayang didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan besaran anggaran sebesar Rp. 3.265.213.190 Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.088.702.950 hingga penyerapan anggaran sebesar 63,97%.

**Tabel 2.19. Tindakan kriminal yang ditangani tahun 2021 (sumber data Polres)**

No	Polres Bengkayang	Lapor	Selesai	Tunggakan	%
1.	Curanmor	30	12	18	40
2.	Curat	2	0	2	0



3.	Kejahatan jabatan/pungli	1	1	0	100
4.	Kebakaran	1	1	0	100
5.	Melarikan anak	1	1	0	100
6.	Melarikan anak dan persetujuan	1	1	0	100
7.	<i>Pemeriksaan</i>	2	2	0	100
8.	Penemuan mayat	1	1	0	100
9.	Pemalsuan Dokumen	1	1	0	100
10.	Pencabulan	1	0	1	100
11.	Pencurian	7	6	1	86
12.	Pencurian Ringan	2	2	0	0
13.	Penganiayaan	5	5	0	100
14.	Penganiayaan dan perampasan	1	1	0	100
15.	Penganiayaan dan percobaan pemeriksaan	1	1	0	100
16.	Penggelapan	4	4	0	100
17.	Penggelapan dalam Jabatan	1	0	1	0
18.	Pengerusakan	2	0	2	0
19.	Penipuan	2	0	1	50
20.	Perjudian	10	9	1	90
21.	Persetubuhan	21	20	1	95
22.	Informasi transaksi Elektronik (ITE)	4	2	2	50
23.	Miras / Perda (Tipiring)	1	1	0	
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>71</b>
<b>Kejahatan Trans Nasional</b>					
1.	Narkoba	32	30	2	
2.	Perlindungan Konsumen	1	1	0	
3.	Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia	1	1	0	
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>94</b>
<b>Kejahatan terhadap Kekayaan Negara</b>					
4.	Korupsi	4	3	1	
5.	Kehutanan	1	1	0	
6.	<i>Karhutla ( PERGUB dan PERBUB)</i>	11	11	0	
7.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Peti)	7	7	0	
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>96</b>
<b>Kejahatan Berimplikasi Kontijensi</b>					
8.	Rusuh Massal	0	0	0	
9.	Konflik Horizontal	0	0	0	
10.	Konflik Vertikal	0	0	0	
11.	Konflik TNI / Polri	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Apabila dilihat dari tabel diatas terlihat jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres diwilayah Kabupaten Bengkayang di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditahun 2021 berdasarkan tabel di atas bahwa tindakan kriminal yang dilaporkan sebanyak 156 laporan dan tindakan yang dapat diselesaikan 126 kasus. Jika dibandingkan dengan target untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditahun 2021 yaitu 50 Kasus. maka persentase angka kriminalitas yang diselesaikan sebesar 252%.

a. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.20. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan (%)
			2020	2021		
1.	Terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas yang terselesaikan (Kasus)	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat pada indikator angka kriminalitas yang terselesaikan ditahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

b. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bengkayang didukung adanya koordinasi yang baik dan harmoni antara Pemerintah, Polres dan Masyarakat terkait dengan kegiatan pengamanan dan penertiban masyarakat di Kabupaten Bengkayang, sehingga perencanaan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal.

Kendala dan hambatan yang di hadapi proses penangkapan dan penyidikan tindak pidana (clearance rate) di daerah hukum Polres Bengkayang adalah:



1. Kurangnya jumlah penyidik/penyidik pembantu, saat penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal;
2. Rendahnya pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan dan tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO).

Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka dan tidak kalah krusial masalah Pandemi Covid-19 ini menghambat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Upaya nyata yang dilakukan fungsi reskrim jajaran polres Bengkayang guna meningkatkan kinerja fungsi reskrim dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah:

1. Meningkatkan kemampuan/kapabilitas penyidik melalui pelatihan dan Dikjur; Mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara, lingkungan hidup, korupsi, narkoba, dan tindak pidana pencucian uang serta siber;
2. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi criminal untuk masyarakat;
3. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak; Melaksanakan penindakan tindak pidana perdagangan orang dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas;
4. Melakukan Penindakan Preman dan Premanisme melalui KRYD; Melakukan Penyelidikan terhadap kasus ilegal yang ada di Kabupaten Bengkayang.

➤ **Sasaran Strategis 7. Meningkatnya derajat/ kualitas kesehatan masyarakat**

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021



**Tabel 2.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 7**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya derajat/ kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup (tahun)	75	73,84	98,45
Capaian Kinerja					98,45
<b>Sangat memuaskan</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat / kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang di tahun 2021 sebesar 98,45 % dari angka harapan hidup yang ditargetkan 75 tahun, realisasinya sebesar 73,84 Tahun berdasarkan data yang di release oleh Badan Statistik Kabupaten Bengkayang ditahun 2021 sehingga capaian kinerja pada sasaran meningkatnya derajat / kualitas kesehatan masyarakat dikategorikan “**Sangat memuaskan**’.

Dengan Usia harapan hidup pada umur tahun tersebut maka rata-rata hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai usia tersebut dalam situasi mobilitas yang berlaku di Kabupaten Bengkayang saat ini adalah rata – rata bayi yang baru lahir pada tahun tersebut.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.22 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat yang harmoni antar umat beragama	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.027.774. 516	113.027.774. 516	100	98,45	N/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 100 % dan realisasi capaian kinerjanya 98,45% sehingga tingkat efisiensi mencapai **N/a**.



c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat / kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang didukung oleh program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 113.027.774.516 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.979.500 sehingga pencapaian penyerapan anggaran sebesar 100%.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.23 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama Kinerja (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya derajat/kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup (tahun)	73,83	73,84	75	0,01

Angka harapan hidup di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan sebesar 0,01 % dari tahun sebelumnya dari angka harapan hidup 73,83 tahun meningkat menjadi 73,84 tahun di tahun 2021.

e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat/ kualitas kesehatan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya penerapan paradigma sehat yang berfokus pada penguatan promotif-preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat dan adanya peningkatan kualitas dan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Kabupaten Bengkayang.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat/ kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang tahun 2021, pemerintah melakukan imunisasi pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak, memberi pengobatan pada masyarakat yang sakit melalui pelayanan medis, pencegahan, pengalihan, dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup.



➤ **Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 8**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga	- Jumlah pemuda / atlit yang berprestasi (org)	8	7	87,50
		- Jumlah Cabor yang berprestasi (org)	6	4	66,67
Capaian Kinerja					77,08
<b>Sangat baik</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 **sebesar 77,08%**, hal ini di dapatkan dari hasil pencapaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja utama dalam rangka mendukung sasaran strategis kinerja pemerintah yaitu indikator kinerja utama terhadap jumlah pemuda / atlit yang berprestasi di Kabupaten Bengkayang sebesar 87,50% dari yang target 8 (delapan) orang realisasi sebanyak 7 (tujuh) orang dan indikator kinerja utama pada jumlah cabor yang berprestasi di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 mencapai sebesar 66,67% dari target calon yang berprestasi 6 orang dan terealisasinya sebanyak 4 orang sehingga pencapaian kinerja sasaran strategis **meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga** di Kabupaten Bengkayang di kategorikan '**Sangat baik**'.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	15.000.000	15.000.000	100	77,08	n/a
		2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.990.000	14.990.000	100		
			<b>29.990.000</b>	<b>29.990.000</b>	<b>100</b>		

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran strategis **meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan dan prestasi olahraga** di Kabupaten Bengkayang sebesar 100%, realisasi pencapaian kinerjanya 77,08%. Tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **n/a (lazim)**.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Penyerapan anggaran pencapaian kinerja sasaran **strategis meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan prestasi olahraga sebesar 100%** dengan ketersediaan anggarannya **sebesar Rp. 29.990.000 realisasi Rp. 29.990.000** dengan dukungan program kegiatan yaitu program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan penyerapan anggarannya masing – masing sebesar 100%.



d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.26 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan prestasi olahraga	- Jumlah pemuda / atlit yang berprestasi	7	7	8	100
		- Jumlah Cabor yang berprestasi	5	4	6	-1
			12	11		-1

Perbandingan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan prestasi olahraga di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020.

e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan prestasi olahraga di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 di karnakan **adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan event olahraga tidak boleh diadakan sehingga nilai capaian 0 (nol) dan sebagai perbandingan capaian digunakan angka capaian tahun 2019.**

Hambatan dan kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan prestasi olahraga di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 **covid-19** sehingga menyebabkan kegiatan event olahraga. Walaupun bisa diadakan dan dilaksanakan namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis **meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan prestasi olahraga** di Kabupaten Bengkayang tahun 2021, pemerintah memberikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terarah, sistematis dan



berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang olahraga ke depan dalam peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi serta pemerintah mengirimkan atlet yang berprestasi untuk mengikuti event olahraga yang diadakan.

➤ **Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 9**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	1. Opini BPK	WTP	WDP	50,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	60 (B)	58,89 (CC)	98,15
		3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31 (A)	83,38 (B)	94,42
		4. Nilai LPPD	3.003	2.090	69,60
Capaian Kinerja					78,04
<b>Sangat baik</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis **meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan** di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 **sebesar 78,04%**, hal ini di dapatkan dari hasil capaian kinerja di 4 (empat) indikator kinerja utama dalam rangka mendukung sasaran strategis kinerja pemerintah yaitu:

1. Indikator kinerja utama Opini BPK **sebesar 50,00%** yang ditargetkan wajar tanpa pengecualian (WTP) namun realisasi pengecualian (WDP) sehingga opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang masih belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan TLHP yang telah ditindaklanjuti belum selesai sampai saat ini;



2. Indikator kinerja utama nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dimana nilai SAKIP tahun 2021 sampai saat laporan ini disusun belum diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh karna itu pada pencapaiannya masih menggunakan nilai sakip tahun 2020 dengan capaian kinerjanya **sebesar 98,15%**, realisasinya 58,89 (CC) dari yang ditargetkan 60 (baik);
3. Indikator kinerja utama indek kepuasan masyarakat **sebesar 94,42%**, realisasi 83,38 (B) dari nilai yang ditargetkan 88,31 (A);
4. Indikator kinerja utama nilai LPPD Kabupaten Bengkayang sebesar 69,60 %, realisasi 2.090 dari yang ditargetkan sebesar 3.003.

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 di kategorikan **“Sangat baik”**.

Komponen – komponen yang dinilai pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

**Tabel 2.28 Rincian penilaian capaian kinerja pada SAKIP Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dan tahun 2020**

No	Komponen Yang di nilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,00	18,13
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,95	13,01
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,06	10,08
d.	Evaluasi Internal	10	5,96	5,96
e.	Capaian Kinerja	20	11,70	11,71
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<b>58,67</b>	<b>58,89</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

**Tabel 2.29 Tingkat penilaian AKIP sesuai Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2015**

No.	Nilai	Kategori
1	90-100	Sangat memuaskan
2	80-90	Memuaskan, mempunyai perubahan kinerja tinggi, dan sangat Akuntabel
No.	Nilai	Kategori
3	70-80	Sangat Baik, Akuntabel berkinerja baik, dan memiliki



		sistem manajemen kinerja yang andal
4	60-70	Baik, Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk dipertanggung jawabkan, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	30-50	Kurang ( sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	0-30	Sangat Kurang (sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan Manajemen Kinerja. Perlu perbaikan yang mendasar

Pencapaian indikator kinerja utama indikator kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 93,89 %, dilakukan melalui pelaksanaan pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan yang terdiri dari :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan

**Tabel 2.30 Nilai mutu pelayanan dan katagori yang diberikan**

No.	Mutu Pelayanan	Kategori
1.	81,26 – 100,00	A ( Sangat Baik )
2.	62,51 – 81,25	B ( Baik )
3.	43,76 – 62,50	C (Kurang Baik)
4.	25,00 – 43,75	D (Tidak Baik)

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran yang telah dilakukan pada periode maret sampai nopember 2021 telah diperoleh hasil survey kepuasan



masyarakat terhadap 17 (tujuh belas) Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

**Tabel 2.31 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 17 (tujuh belas) Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

No.	Unit Pelayanan Publik	SKM
1.	Kecamatan Bengkayang	86,03
2.	Kecamatan Lumar	88,25
3.	Kecamatan Ledo	88,80
4.	Kecamatan Sanggau Ledo	86,91
5.	Kecamatan Tujuh belas	73,82
6.	Kecamatan Seluas	86,80
7.	Kecamatan Jagoi Babang	77,26
8.	Kecamatan Samalantan	82,14
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,70
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,81
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,58
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,03
13.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90,47
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan SDM	85,47
15.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	82,81
16.	UPTD Rumah Sakit Daerah	79,81
17.	Bagian Organisasi Setda	83,82
<b>Jumlah Nilai Rata - Rata</b>		<b>83,38</b>
<b>Tingkat Pelayanan Publik</b>		<b>Sangat baik</b>



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	Penataan Organisasi	734.645.950	734.645.950	100	77,91	4,79
		Administrasi Tata Pemerintahan	1.274.075.500	73.4645.950	57,66		
			2.008.721.450	1.469.291.900	73,15		

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkayang tahun 2021 sebesar 73,15 % dan realisasi capaian kerjanya sebesar 77,91% tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan sebesar 4,79 %.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan didukung anggaran sebesar Rp. 2.008.721.450, realisasi Rp. 1.469.291.900 dengan penyerapan anggarannya sebesar 73,15% yang meliputi kegiatan penataan organisasi dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 734.645.950,realisasi Rp. 734.645.950 penyerapan anggaran sebesar 100% dan kegiatan administrasi Tata Pemerintahan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 1.274.075.500, realisasi Rp. 73.4645.950 penyerapan anggaran sebesar 57,66%.



d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.33 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	1. Opini BPK	WDP	WDP	WTP	N/a
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	58,67 (CC)	58,89 (CC)	<b>60 (B)</b>	0,22
		3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,98 (B)	83,38 (B)	88,31 (A)	1,4
		4. Nilai LPPD	-	2.090	3.003	N/a
					0,405	

Perbandingan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari tahun sebelumnya.

e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan / kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 meningkat hal ini disebabkan adanya perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen.

Sistem manajemen pemerintahan telah berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), juga pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Hambatan dan kendala pencapaian kinerja sasaran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja pemerintah di Kabupaten Bengkayang diantaranya adalah;

1. Masih belum optimalnya perangkat daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang berorientasi pada hasil;
2. Belum optimalnya perangkat daerah dalam menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan/sasaran;
3. Belum optimalnya perangkat daerah menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran;
4. Belum optimalnya perangkat daerah menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran.

Salah satu upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dengan mendorong perangkat daerah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Secara efektif berarti Pemerintah dapat memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran berdaya guna dan berdampak pada target - target pembangunan.

Secara efisien berarti pemerintah telah memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional.

➤ **Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 10**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi	1. Indeks kualitas air	52,50 %	51,50%	98,10
		2. Indek kualitas udara	90,62%	92,10%	101,63
		3. Indeks kualitas	38,27%	36,12%	94,38



		tutupan lahan			
		4. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak huni	73,34%	36,12%	79,87
		5. Luas Kawasan Kumuh	65 Ha	113,29 Ha	174,29
Capaian Kinerja					109,65
<b>Sangat memuaskan</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang mencapai sebesar 109,65%. Ini dihasilkan dari pengukuran dari ke lima (5) indikator kinerja utama yaitu indikator pada Indeks kualitas air di Kabupaten Bengkayang mencapai 98,10 % , realisasinya 51,50 % dari targetnya sebesar 52,50% hal ini masih belum dapat mencapai sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penurunan kualitas air sungai yang disebabkan adanya pencemaran limbah domestik (sampah rumah tangga,pasar) dan kegiatan PETI (penambangan tanpa izin).dengan adanya persediaan anggaran belum memungkinkan adanya upaya pemulihan yang optimal tapi hanya sebatas pemantauan kualitas air sungai saja. Indek kualitas udara di Kabupaten Bengkayang mencapai 101,63 %, realisasi 92,10% dari targetnya 90,62% hal ini dilakukan dengan kegiatan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler yang merupakan kegiatan yang bersumber dari dana APBN melalui kementerian LHK. Indek kualitas tutupan lahan mencapai 94,38%,realisasi 36,12% dari targetnya sebesar 38,27% hal ini mengalami pencapaian yang sangat memuaskan dikarenakan ketersediaan data IKL merupakan data tutupan lahan dari pusat secara kewenangan pemda dan untuk menambah data IKL tersebut perlu mengoptimalkan database ruang terbuka hijau yang secara existing masih sangat terbatas. Persentase penanganan rumah tidak layak huni mencapai 79,87%, realisasi 36,12% dari targetnya sebesar 73,34 % hal ini mengalami pencapaian yang baik. Indikator luas Kawasan permukiman kumuh mengalami pencapaian yang sangat buruk hal ini disebabkan semakin meningkatnya kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Bengkayang semakin tinggi meski demikian ke 5 (lima) indikator kinerja utama dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan



lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 di kategorikan 'sangat memuaskan'

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi	1. Program Kawasan Permukiman	310.000.000	310.000.000	100	109,65	16,65%.
		2. Program Pengembangan Perumahan	315.961400	315.961400	100		
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.311.757.645	8.311.757.645	100		
		Total	8.937.719.045	8.311.757.645	93		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93% dan realisasi capaian kinerjanya 109,65% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 16,65%.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang di dukung oleh program kawasan permukiman, program pengembangan perumahan serta program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 8.937.719.045, realisasi sebesar Rp. 8.311.757.645 dengan penyerapan anggaran sebesar 93%.



d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.36 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2020	2021		
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi	1. Indeks kualitas air	50%	51,50%		1,50%
		2. Indek kualitas udara	91,31%	92,10%		0,79%
		3. Indeks kualitas tutupan lahan	35,81%	36,12%		0,31%
		4. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak huni	-	36,12%		36,12%
		5. Luas Kawasan Kumuh	116,14 Ha	113,29 Ha		-2,85%
						35,87%

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan sebesar 35,87% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarnakan realisasi Indeks kualitas air meningkat menjadi 1,50% dari tahun 2020, Indek kualitas udara meningkat 0,79%, Indek kualitas tutupan lahan meningkat 0,31%, namun persentase penanganan rumah tidak layak huni tidak ada perbandingan dari tahun sebelumnya karna untuk penanganan tdk dapat dilaksanakan faktor tidak dianggarkan dalam perencanaan penganggaran di tahun tersebut, sementara pada Indikator luas Kawasan permukiman kumuh mengalami penurunan sebesar 2,85%.

e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan/kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Penurunan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang dikarnakan anggaran pelaksanaan program kegiatan tidak mencukupi dalam penanganan luas



kawasan permukiman kumuh diwilayah Kabupaten Bengkayang serta sumber daya manusia laboratorium lingkungan masih sangat minim dan belum memadai.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang antara lain ketersediaan anggaran masih belum memadai, belum tersedianya dokumen – dokumen pendukung serta tidak adanya kebijakan yang benar-benar strategis dalam menangani Kawasan permukiman kumuh.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bengkayang perlu dukungan APBD dan SDM yang memadai dan peningkatan koordinasi sinkronisasi data bersama teknis terkait dalam informasi data.

➤ **Sasaran Strategis 11. Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 11**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Rasio ruas jalan dalam kondisi baik	70,00	53,44	76,34
Capaian Kinerja					76,34
<b>Sangat baik</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 sebesar 76,34% yang dicapai melalui indikator kinerja utama pemerintah kabupaten bengkayang terhadap rasio ruas jalan yang di pelihara dalam kondisi baik dengan realisasi kinerjanya sebesar 53,44% dari yang ditargetkan sebesar 70,00% . Pencapaian sasaran strategis di kategorikan “**sangat baik**”.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.38. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Program Penyelenggaraan Jalan	344.431.261.657	344.431.261.657	100	76,34	N/a
Total			9.362.851.550	3.576.115.300			

Perbandingan antara persentase realisasi pencapaian anggaran meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata sebesar 38,19% dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 76,34%. Efisiensi penggunaan sumber dayanya **N/a (lazim / tidak ada)**.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bengkayang didukung oleh program penyelenggaraan jalan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp 344.431.261.657, realisasi anggaran sebesar Rp. 344.431.261.657 penyerapan anggaran sebesar 100%.

**Tabel 2.39 ruas jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2020 s/d 2021**

No.	Keadaan Jalan	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	Jenis Permukaan		2020	2021
	1. Aspal	Km	565,599	432,444
	2. Kerikil	Km	436,904	633,592
	3. Tanah	Km	257,635	193,679



	4. Tidak terinci	Km	19,862	20,285
	Jumlah		1.280	1.280
<b>No.</b>	<b>Kondisi Jalan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun</b>	
1.	<b>Keadaan Jalan dalam kondisi baik</b>		2020	2021
	1. Baik	Km	56,823	26,50
	2. Sedang	Km	656,704	647,45
	3. Rusak Ringan	Km	308,931	254,12
	4. Rusak Berat		257,542	351.93
<b>Jumlah Panjang Jalan</b>			<b>1.280</b>	<b>1.280</b>

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

**Tabel 2.40 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan (%)
			2020	2021		
1.	Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Rasio ruas jalan dalam kondisi baik	56,00	53,44	70,00	- 2,56

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,56 % dari tahun 2020.

e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan , hambatan / kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bengkayang, mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya terjadi perubahan target ditahun 2021 dengan angkanya



yang sangat tinggi sehingga dengan persediaan anggaran yang ada belum mampu untuk menangani jalan secara maksimal dan tidak terlaksananya beberapa pekerjaan konstruksi yaitu berupa pemeliharaan dan peningkatan jalan akibat ketersediaan anggaran yang belum maksimal tersebut.

Hambatan dan Kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bengkayang secara maksimal ada terjadinya refocusing anggaran yang bersumber dari DAU.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 adalah pemerintah telah melakukan penanganan jalan berupa pemeliharaan dan penambahan alokasi anggaran agar kinerja dapat berjalan sesuai dengan perencanaan secara maksimal.

➤ **Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 12**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan	Rasio Desa yang terhubung dengan pusat Kecamatan dan Kabupaten	75,00%	100%	133,33%
Capaian Kinerja					133,33%
<b>Sangat memuaskan</b>					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkayang tahun 2021 sebesar 133,33% yang dihasilkan dari terlaksananya Indikator Kinerja Utama pemerintah terhadap rasio desa yang terhubung dengan pusat kecamatan dan kabupaten terrealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan 75,00%. Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatkan aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkayang dikategorikan ‘Sangat memuaskan’.



b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.42 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan	Pogram Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.362851.550	3.576.115.300	38,19	133,33	95,14

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran sasaran strategis meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan sebesar 38,19% dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 133,33% hal ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan sebesar 95,14%.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkayang didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 9.362.851.550, realisasinya sebesar Rp. 3.576.115.300 dengan penyerapan anggaran sebesar 38,19%.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target

**Tabel 3.44. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan (%)
			2020	2021		
1.	Meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan	Rasio Desa yang terhubung dengan pusat Kecamatan dan Kabupaten	133,33	133,33	75	100



Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021 menetap sebesar 100% dari tahun 2020.

- e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan / kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan” di Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan wilayah perbatasan sudah terkoneksi semua hanya kondisi jalan yang menjadi faktor utama.

Hambatan dan Kendala dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2021 adalah terjadinya refocusing anggaran yang bersumber dari DAU.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya aksibilitas dan konektivitas wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021 pemerintah melakukan penganggaran kembali untuk penanganan kinerja jalan yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya.

➤ **Sasaran Strategis 13: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 13**

Sumber data Dinas pekerjaan Umum dan penata ruang					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Ketersediaan air bersih	50,00%	60,62%	121,24
		Rasio Elektrifikasi	88,70%	81,96%	92,40
Capaian Kinerja					106,82
Sangat memuaskan					

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebesar 106,82% yang dihasilkan dari 2 (dua)



capaian kinerja indikator kinerja utama pemerintah yaitu indikator ketersediaan air bersihnya sebesar 121,24 %, realisasi sebesar 60,62% dari yang ditargetkan sebesar 50,00%, dan indikator rasio elektrifikasinya sebesar 92,40% realisasi kinerjanya sebesar 81,96% dari target 88,70% pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kategorikan ‘sangat memuaskan’.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 2.46. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.727.842.050	2.727.842.050	100	106,82	6,82

Perbandingan antara nilai realisasi anggaran sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebesar 100% dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 106,82 % maka tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 6,82%.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat didukung oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Bengkayang dengan ketersediaan anggarannya sebesar Rp. 2.727.842.050, realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.727.842.050 dengan penyerapan anggarannya sebesar 100%.



### Daftar Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

Sumber data Dinas pekerjaan Umum dan penata ruang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jlh Rumah Tangga	Jumlah Penduduk berakses air minum	Jumlah Rumah tangg berakses Air Minum
1.	Siding	8.431	2.231	2.951	706
2.	Jagoi Babang	9.255	2.633	6.016	1.550
3.	Seluas	20.691	5.779	11.380	2.965
4.	Sanggau Ledo	15.655	4.667	9.393	2.695
5.	Tujuh Belas	15.496	4.832	11.132	3.275
6.	Ledo	15.108	4.256	10.576	2.468
7.	Suti Semarang	6.163	1.640	3.698	909
8.	Lumar	8.207	2.365	5.335	1.384
9.	Bengkayang	33.578	9.161	30.915	7.829
10.	Teriak	17.644	4.591	10.586	2.650
11.	Sungai Betung	12.595	3.365	8.817	2.248
12.	Lembah Bawang	6.571	1.909	4.271	1.262
13.	Samalantan	23.715	6.459	17.511	3.933
14.	Monterado	34.232	9.421	22.039	5.925
15.	Capkala	9.836	2.802	5.410	1.531
16.	Sungai raya	23.758	6.940	13.067	3.170
17.	Sungai Raya Kepulauan	28.940	8.600	17.364	4.996
	Total	289.875	81.651	190.460	49.496

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target

Tabel 2.47. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target RPJMD	Tingkat Kemajuan (%)
			2020	2021		
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Ketersediaan air bersih	61,00	60,62	50,00	0,93
		Rasio Elektrifikasi	80,65	81,96	88,70	
			141,65	142,58		

Perbandingan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,93 % dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada perbandingan di 2 (dua) indikator kinerja utama pemerintah



yaitu indikator ketersediaan air bersih tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,62% dari tahun 2020 sementara indikator kinerja utama rasio elektrifikasi mengalami peningkatan sebesar 1,31 % dari sebelumnya namun hal ini dapat menyebabkan peningkatan terhadap sasaran strategis pemerintah.

### RISPAM di Kabupaten Bengkayang

#### Sumber data Dinas pekerjaan Umum dan penata ruang

No	Kecamatan	Tahun Penyusunan	Sumber Dana
1.	Bengkayang	2017	APBD
2.	Lumar	2017	APBD
3.	Teriak	2017	APBD
4.	Sungai Betung	2017	APBD
5.	Samalantan	2017	APBD
6.	Monterado	2019	APBD
7.	Tujuh Belas	2019	APBD
8.	Sungai Raya Kepulauan	2019	APBD
9.	Seluas	2019	APBD
10.	Jagoi Babang	2020	APBD
11.	Sanggau Ledo	2020	APBD
12.	Ledo	2020	APBD
13.	Lembah Bawang	2020	APBD
14.	Capkala	2020	APBD
15.	Siding	2021	APBD
16.	Suti Semarang	2021	APBD
17.	Sungai raya	2021	APBD

- e. Analisis penyebab peningkatan / penurunan, hambatan / kendala dan solusi pencapaian sasaran kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bengkayang dikarenakan bertambahnya jumlah penerima sambungan rumah (SR) yang mengakses air bersih dan adanya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam masalah ketenagalistrikan.

Hambatan dan kendala pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah masalah ketenagalistrikan tidak masuk dalam urusan DPUPR Pemerintah Kabupaten Bengkayang.



Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Bengkayang pemerintah telah melakukan;

1. Peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
2. Pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional,
4. Penyediaan sumber - sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

### 1.1. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan anggaran belanja langsung sesuai sasaran strategis dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 599.849.785.188 dan terealisasi sebesar Rp.131.570.558.286 yang berarti penyerapan anggaran mencapai sebesar 21,93%.

**Tabel 2.48 Realisasi program kerja pendukung sasaran strategis setelah perubahan tahun 2021**

Sasaran Strategis		Program Kerja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian (%)
1	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	804.830..000	804.830..000	100
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	897.386..500	897.386.500	100
	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	879.680.025	833.780.025	94,78
2	1	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	71.197.600	71.197.600	100
	2	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	9178..188.492	9178..188.492	100



	3	Program Pengembangan Prasarana Pertanian	255.501.965	255.501.965	100
	4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.930.289.200	1.930.289.200	100
	5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.499.789.416	2.347.126.400	93,89
	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	30.000.000	30.000.000	100
	7	Program Pemasaran Pariwisata	208.323.450	208.323.450	<b>100</b>
	8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	578.916.841	378.916.841	65,45
3	1	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	170.831.300	170.831.300	100
4	1	Program Pengelolaan Pendidikan non formal/keselarasan	126.104.446.014	548.968.275	0,44
5	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	138.979.500	138.979.500	100
6	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	326.5213.190	2.088.702.950	63,97
7	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.027.774.516	113.027.774.516	100
8	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	15.000.000	15.000.000	100
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.990.000	14.990.000	100
9	1	Penataan Organisasi	734.645.950	734.645.950	100
	2	Administrasi Tata Pemerintahan	1.274.075.500	734.645.950	57,66
10	1	Program Kawasan Permukiman	310.000.000	310.000.000	100
	2	Program Pengembangan Perumahan	315.961.400	315.961.400	100
	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.311.757.645	8.311.757.645	100
11	1	Pogram Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.362.851.550	3.576.115.300	38,19



12	1	Program Penyelenggaraan Jalan	344.431.261.657	344.431.261.657	100
13	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.727.842.050	2.727.842.050	100
		Total	599.849.785.188	131.570.558.286	21,93



## BAB III

# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelum dimiliki pemerintah pusat kemudian menjadi milik pemerintah daerah.

Sedangkan dalam asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pada asas Tugas Pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah



Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugaskan pembantuannya adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun tujuan asas tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik di lingkungan daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas Pembantuan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Pusat, namun jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Daerah Provinsi maka pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

Adapun Tugas Pembantuan Pusat yang diterima oleh Kabupaten Bengkayang yakni di Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Bengkayang dari Kementerian Pertanian berupa barang :

- Bantuan budidaya padi produktivitas rendah seluas 2.415 hektar berupa bantuan benih (25 kg/Ha), pupuk NPK (100 kg/Ha), Pupuk Hayati (3 kg/Ha) dan Pestisida (1 liter/Ha);
- Bantuan benih jagung (15 kg/Ha) seluas 5.000 hektar;
- Bantuan benih padi inbrida seluas 800 hektar

### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkayang**

#### **3.2.1 Target Kinerja**



Sesuai dengan DIPA-

018.03.4.139125/2021 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, target kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian adalah adanya pengembangan pengendalian karagam konsumsi dan keamanan pangan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Bengkayang.

### 3.2.2 Realisasi

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten dilaksanakan melalui 2 Program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.271.950.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 1.271.563.500,- atau sebesar 99,97%.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi Pangan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.190.800.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 1.190.537.500,- atau sebesar 99,98%, dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan, dengan melaksanakan koordinasi sebagai penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Sereal dan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sereal.  
Selain itu melaksanakan kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan berupa bantuan budidaya padi rawa seluas 100 Ha seperti:
    - Bantuan Benih padi 50 kg/Ha
    - Bantuan NPK Non Subsidi 100 kg/Ha
    - Bantuan Herbisida 3 liter/Ha
    - Bantuan Pupuk Hayati 2 liter/Ha
  - b. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan melaksanakan koordinasi dan identifikasi CPCL; Sarana bidang Pertanian,



Kehutan dan Lingkungan Hidup berupa pengembangan perbenihan padi inbrida berbasis korporasi petani seluas 50 Ha; Sarana pengembangan Kawasan berupa bantuan benih padi inbrida  $800 \text{ ha} \times 25 \text{ kg} = 20.000 \text{ kg}$  dan bantuan benih jagung hibrida  $1000 \text{ ha} \times 15 \text{ kg} = 15.000 \text{ kg}$ .

- 2) Program Dukungan Manajemen, dengan total anggaran Rp.81.150.000 dengan realisasi Rp. 81.026.000 atau 99,85%.

### 3.3 Kendala

**Hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan yaitu :**

Kendala / hambatan adalah :

- ✓ Untuk memenuhi persyaratan administrasi pengadaan barang dan jasa sehingga sarana produksi data tidak sesuai dengan kondisi iklim dan cuaca yang mendukung pertumbuhan padi rawa.
- ✓ Tingkat kesuburan yang rendah dan variatif.
- ✓ Kadar keasaman tinggi dengan potensi keracunan pirit yang cukup besar.
- ✓ Iklim dan cuaca yang fluktuatif sehingga tinggi air pada lokasi rawa sangat sulit di kontrol.
- ✓ Kegiatan budidaya hanya bisa dilaksanakan pada musim kemarau.
- ✓ Kondisi sumber daya manusia petani masih lemah baik dari segi kemampuan teknologi budidaya dan permodalan.
- ✓ Serangan OPT dilokasi rawa relatif tinggi.
- ✓ Kurangnya dukungan pembiayaan untuk pelatihan dan pendampingan petani dalam upaya memperluas akses terhadap teknologi dan pembiayaan.

### 3.4 Saran dan Tindak Lanjut :



- ✓ Agar proses administrasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada awal tahun.
- ✓ Pembuatan long storagen, pengaturan sistim pengairan, pengelolaan lahan, pembuatan petakan, pengapuran dan pemupukan.
- ✓ Memanfaatkan kalender tanam dan pengaturan sistem drainage.
- ✓ Perlu aplikasi pestisida yang ramah lingkungan.
- ✓ Perlu adanya dukungan dana melalui sharing APBD Kabupaten Bengkayang.



## BAB IV

# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Beberapa pertimbangan bagi penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain:

1. Menentukan jumlah anggaran yang berbasis kinerja, karena SPM terdiri dari indikator dan perhitungan anggaran yang jelas dan mengarah dan berorientasi pada pelayanan;
2. Untuk mengevaluasi dan menentukan alokasi anggaran daerah yang lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan yang lebih terukur;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kinerja OPD Pengampu SPM pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.



Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

#### A. Kebijakan Umum

Kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (RPJMD) adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dimana kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam mencapai sasaran yang terukur dari masing – masing misi yang menjadi sasaran RPJMD :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan duniausaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi



sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari



## B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Misi dan arah kebijakan sehingga menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan membutuhkan arah kebijakan agar pencapaian pembangunan selama 5 tahun dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang.

Adapun Arah kebijakan yang menjelaskan misi dalam Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan angka melek huruf lebih dari 95% melalui Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
2. optimalisasi PKBM;
3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas Pendidikan;
4. Menurunkan angka Putus Sekolah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit menuju akreditasi utama;
6. Meningkatkan usia harapan hidup mendekati 73 tahun;
7. Menurunkan angka Kematian Bayi per 1000 KH di bawah rata-rata provinsi;
8. Menurunkan angka Kematian Ibu melahirkan dibawah rata-rata provinsi;
9. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di atas 85%;
10. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi 2 anak;



11. Meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
12. Pemantapan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
13. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan;
14. Penambahan panjang jalan (jalan baru);
15. Peningkatan akses jalan desa ke jalan kabupaten;
16. Peningkatan akses jalan kabupaten ke jalan provinsi dan jalan nasional;
17. Peningkatan pengawasan jalur sungai;
18. Peningkatan pengawasan jalur darat;
19. Rehabilitasi kondisi air irigasi existing;
20. Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;
21. Inventarisasi dan pemanfaatan sumber air baku;
22. Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah;
23. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL;
24. Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan;
25. Pengembangan sistem drainase lingkungan perumahan;
26. Pendataan kondisi perumahan dan permukiman;
27. Peningkatan ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan;
28. Optimalisasi pengembangan kawasan permukiman terpadu;
29. Renovasi rumah rusak/tidak layak huni;
30. Pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh;
31. Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan;
32. Peningkatan mesin pelayanan air minum;
33. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum;
34. Meningkatnya layanan informasi di kawasan rawan bencana;
35. Meningkatnya kesiapsiagaan Desa di kawasan rawan bencana.



Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan 6 (enam) bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelaksanaan 6 (enam) bidang urusan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 dijabarkan sebagai berikut :

#### 4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

(OPD Pemangku : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan maka SPM bidang Pendidikan ini mengatur Jenis dan penerima Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota dan Provinsi, yaitu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan oleh Kabupaten/Kota dan pelayanan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) serta Pendidikan Khusus oleh Pemerintah Provinsi. Berikut ini adalah Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota :

1. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar, SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan Peserta Didik berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Berikut ini adalah Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan oleh Kabupaten/Kota :

NO	INDIKATOR
1	2
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalandarat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil



2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
3.	Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4.	Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
5.	Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6.	Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7.	Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
9.	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan
10.	Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
11.	Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
12.	Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
13.	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan



Sedangkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR
1	2
1.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia ( <i>globe</i> ), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I – II : 18 jam per minggu; Kelas III : 24 jam per minggu; Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12.	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas



	Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;
13.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menerapkan standar tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis pelayanan minimal pendidikan dan untuk mencapai pemenuhan dan penerapan dari SPM Pendidikan maka ditetapkan beberapa standar mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yang mencakup

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah menyusun Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bengkulu Tengah. Target Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Target Pencapaian SPM bidang Pendidikan pada Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalandarat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	85	90	95	100



2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	85	90	95	100
3.	Setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	55	75	85	95
4.	Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	65	75	80	85
5.	Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	80	90	95	100
6.	Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	80	90	100	100
7.	Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	75	85	100	100
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	60	80	100	100
9.	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran	80	90	100	100



	Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan				
10.	Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	80	90	100	100
11.	Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	90	95	98	100
12.	Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100
13.	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	85	95	100	100
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	80	90	100	100

b. Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar pada tingkat Satuan Pendidikan.

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	75	85	100	100
2.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	75	85	100	100
3.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model	70	85	100	100



	kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia ( <i>globe</i> ), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;				
4.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	75	85	90	95
5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	90	95	100	100
6.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I – II : 18 jam per minggu; Kelas III : 24 jam per minggu; Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	85	95	100	100
7.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	100	100	100	100
8.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	90	100	100	100
9.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	90	100	100	100
10.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	95	100	100	100
11.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	100	100	100	100
12.	Kepala sekolah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan	100	100	100	100



	Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;				
13.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	85	100	100	100

#### 4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Bengkayang

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten Bengkayang pada akhir Tahun 2021.

##### 1. Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Bengkayang :

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Capaian (%)
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	SD	1	Permukiman	1	100%
		SMP	1	Permukiman	1	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	274	Sekolah	193	70,43 %
		SMP	81	Sekolah	71	87,65%



No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Capaian (%)
3	Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	81	Sekolah	41	50,61%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD	274	Sekolah	254	92,70%
		SMP	81	Sekolah	70	86,41%
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	274	Sekolah	176	64,23%
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	81	Sekolah	44	54,32%
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	274	Sekolah	246	89,78%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-	SMP	81	Sekolah	76	93,82%



No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Capaian (%)
	masing sebanyak 40% dan 20%.					
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	81	Sekolah	46	56,79%
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	274	Sekolah	245	89.41 %
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	83	Sekolah	83	98,90%
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		39	Kab/Kota	39	100%
13	Pemerintah Kabupaten/Kotamemilikirencanadan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.		1	Kab/Kota	1	100%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	SD	274	Sekolah	274	100%
		SMP	81	Sekolah	81	100%



Ketercapaian target tersebut didukung karena adanya beberapa kegiatan seperti:

1. Pemerataan akses pendidikan
2. Pembangunan ruang kelas;
3. Pengadaan meubeler;
4. Rehab sedang/berat bangunan sekolah;
5. Pemerataan dan rekrut menguru kontrak daerah untuk jenjang SD dan SMP;
6. Program sertifikasi guru/pengawasSD dan SMP serta diklat Calon Kepala sekolah;
7. Pelatihan RAKS dan pelatihan kurikulum.

## 2. Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Satuan Pendidikan

Adapun realisasi SPM bidang pendidikan oleh satuan pendidikan yang terdiri dari 13 item memiliki realisasi capaian seperti di bawah ini :

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Total	Satuan	Capai SPM	Capaian (%)
1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SD	274	Sekolah	232	84.67 %
2	Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SMP	81	Sekolah	68	83,95%
3	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	SD	274	Sekolah	132	48,17%



No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Total	Satuan	Capai SPM	Capaian (%)
4	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	SD	274	Sekolah	112	40,87%
		SMP	81	Sekolah	64	79,01 %
5	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	SD	274	Sekolah	254	92,70%
		SMP	81	Sekolah	46	56,79%
6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu Kelas 3 : 24 Jam per minggu Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu	SD	274	Sekolah	263	95,98%
		SMP	81	Sekolah	78	96,29 %
7	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	274	Sekolah	274	100 %
		SMP	81	Sekolah	81	100 %
8	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	SD	274	Sekolah	274	100%
		SMP	81	Sekolah	81	100%
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	274	Sekolah	215	78,46%
		SMP	81	Sekolah	76	93,82%
10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD	274	Sekolah	274	100%
		SMP	81	Sekolah	81	100%
11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar	SD	274	Sekolah	254	92,70%
		SMP	84	Sekolah	84	100%



No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Total	Satuan	Capai SPM	Capaian (%)
12	Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	SD	274	Sekolah	274	100%
		SMP	81	Sekolah	81	100%
13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	SD	273	Sekolah	253	92,67%
		SMP	84	Sekolah	80	97,34%

Ketercapaian target tersebut didukung karena adanya beberapa kegiatan seperti:

1. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
2. Peningkatan sarana pendidikan dasar
3. Pengadaan perlengkapan sekolah
4. Program sertifikasi guru/ pengawas SD/, SMP.
5. Penilaian Angka Kredit
6. Penilaian kinerja guru
7. Penilaian kinerja kepala sekolah
8. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
9. Peningkatan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
10. Pembinaan KKG/MGMP
11. Pelatihan penyusunan kurikulum
12. Pelatihan Manajemen pendidikan pengelolaan aset, keuangan, kepegawaian dan kelembagaan

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang

Pencapaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.348.333.602.223,- untuk 7 program dan 20 kegiatan.

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>50.075.770.156,00</b>	<b>35.848.526.137,00</b>
1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	458.126.000,00	14.488.000,00
1.2	Pembangunan Laboratorium	1.273.693.310,00	728.108.807,00
1.3	Pembangunan Asrama Sekolah	205.800.000,00	-
1.4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/penjaga Sekolah	67.927.950,00	-
1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	1.165.116.990,00	-



	Sekolah		
1.6	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.934.621.730,00	9.437.512.860,00
1.7	Pengadaan Mebel Sekolah	415.345.250,00	-
1.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	443.819.292,00	401.708.542,00
1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48.292.800,00	47.722.800,00
1.10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	10.714.971.137,00	4.105.930.128,00
1.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP	189.999.600,00	102.615.000,00
1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21.097.616.097,00	20.950.000.000,00
1.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	60.440.000,00	60.440.000,00
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>4.636.940.976,00</b>	<b>3.687.722.940,00</b>
2.1	Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD	220.340.500,00	7.963.880,00
2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	30.999.800,00	-
2.3	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	485.002.000,00	398.306.188,00
2.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	105.661.292,00	105.661.292,00
2.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	984.632.384,00	965.078.580,00
2.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.805.000,00	28.513.000,00
2.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.779.500.000,00	2.182.200.000,00
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>1.770.017.275,00</b>	<b>859.349.800,00</b>
3.1	Pembanguna Gedung /Ruang Kelas /Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	35.000.000,00	-
3.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal	15.000.000,00	-



	/Kesetaraan		
3.4	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa Nonformal /Kesetaraan	624.747.275,00	-
3.5	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan	7.850.000,00	-
3.6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal /Ke	7.650.000,00	-
3.7	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non	10.870.000,00	1.049.800,00
3.8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.068.900.000,00	858.300.000,00
3.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	7.650.000,00	-
3.10	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Kesetaraan	10.870.000,00	1.049.800,00
3.11	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.068.900.000,00	858.300.000,00
<b>4.</b>	<b>Pengolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>69.621.717.607,00</b>	<b>60.248.518.720,47</b>
4.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.358.930.840,00	3.086.655.417,00
4.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	250.313.480,00	-
4.3	Pembangunan Saranan , Prasaranan dan Utilitas Sekolah	2.589.989.260,00	59.701.000,00
4.4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	18.341.370,00	-
4.5	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas	14.234.712.000,00	10.388.709.778,00
4.6	Pengadaan Mebel Sekolah	575.945.000,00	-
4.7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	37.432.500,00	34.235.500,00
4.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	31.792.292,00	29.658.292,00



4.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	72.305.000,00	56.905.900.00
4.10	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.712.874.084,00	3.477.039.104,00
4.11	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	310.764.900,00	240.549.200,00
4.12	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	43.418.716.881,00	240.549.200,00
4.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	9.600.000,00	9.6000,00

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Bulan Desember 2021 didukung oleh 52 orang pegawai organik dan 36 Orang Pengawas Sekolah SD dan SMP (tidak termasuk guru) dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 76 orang.

Terdiri dari :

• Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- a). Eselon II = 1 Orang
- b). Eselon III = 4 Orang
- c). Eselon IV = 18 Orang
- d). Fungsional/Non Eselon = 53 Orang

b. Tenaga Honor Daerah dengan jumlah 2 orang.

c. Tenaga Harian Lepas Kantor dengan jumlah 10 orang.

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang di hadapi dalam ranga pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun ini baik itu yang menyangkut Pelayanan Dasar oleh satuan Pendidikan adalah keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Bengkayang untuk memenuhi semua target pencapaian SPM tersebut sehingga untuk tahun berikutnya lebih berusaha secara intensif mencari terobosan dan inovasi bantuan dana baik dari APBD Provinsi Kalimantan



Barat maupun APBN terutama yang terkait dengan kekurangan ruang kelas, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, kekurangan meubeluer, kekurangan ruang laboratorium dan perangkatnya ( meubeluer dan peralatan praktek IPA), kekurangan ruang Kepala Sekolah kekurangan buku teks untuk setiap siswa, buku pengayaan dan alat praktek dan peraga siswa serta bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk Guru PAUD, SD, SMP dan Tutor Pendidikan Non Formal.

Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan pengaturan Tenaga Pendidikan di Jenjang Pendidikan Dasar, salah satunya adalah Penempatan Guru bersertifikasi dan berkualifikasi kurang merata pada semua Lembaga Pendidikan Dasar sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dari pengambilan kebijakan dari Kabupaten Bengkayang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dan Kementerian Agama tentang Pengaturan Tenaga Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, sedangkan untuk lembaga-lembaga Sekolah Dasar ( SD ) yang berada di bawah pengelolaan Yayasan membutuhkan komitmen dari pengambilan kebijakan di masing-masing yayasan tersebut tentang penerimaan guru dan pemerataan guru di lembaganya.

Begitu juga dengan hasil pengukuran SPM tersebut belum mampu memenuhi target tahunan Kabupaten Bengkayang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkayang juga perlu adanya revisi Peraturan Tersebut yang di sesuaikan dengan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupeten Bengkayang Tahun 2021-2026.



## 4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

(OPD Pemangku : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana)

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah Kabupaten Bengkayang

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapat layanan kesehat	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan	100%	Setiap tahun



		Kesehatan		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan Kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan Kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan	Jumlah warga negara	100%	Setiap tahun



	Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan	dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan		
--	--	--	--	--

#### 4.2.3 Indikator, Nilai SPM dan Realisasi Capaian

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 merupakan data kumulatif yang dikumpulkan dari 17 Puskesmas pada 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang dapat kami sajikan sebagai berikut:



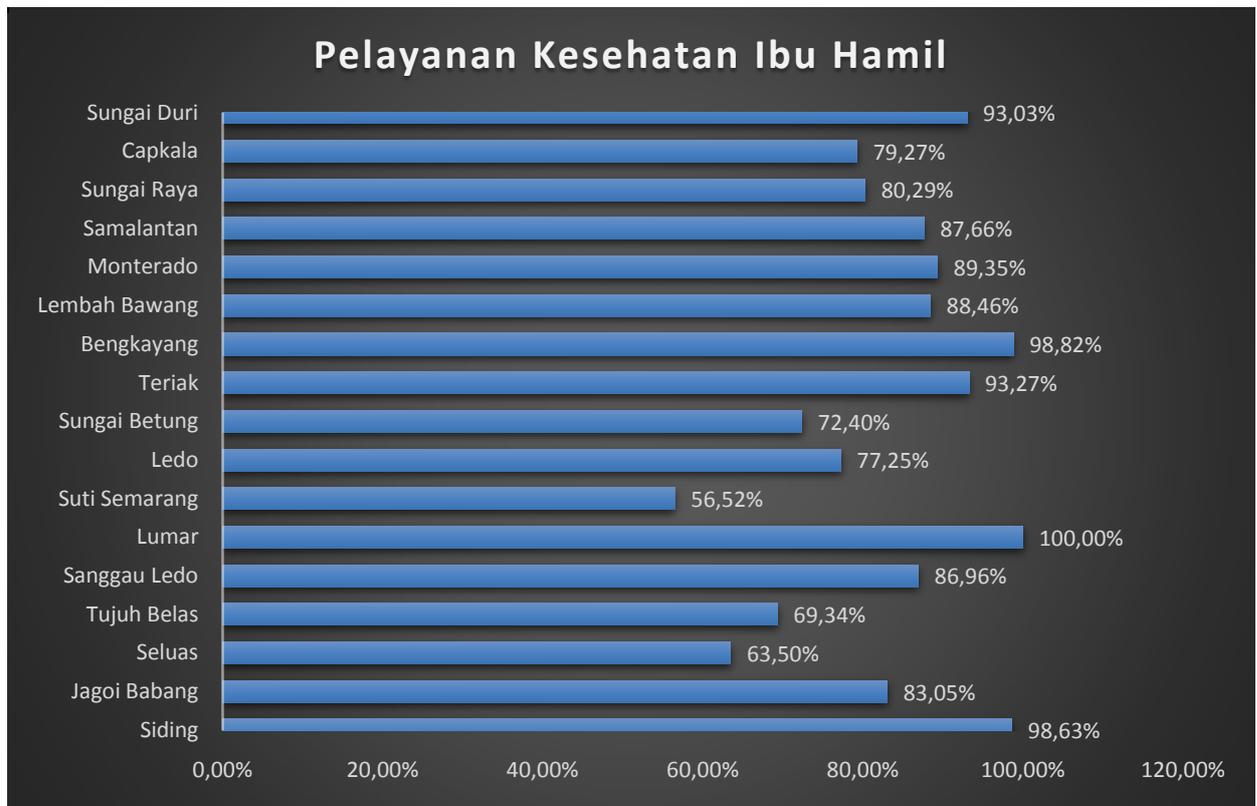
4.3 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	414	445	93,03%
2	Capkala	Capkala	153	193	79,27%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	440	548	80,29%
4	Samalantan	Samalantan	419	478	87,66%
5	Monterado	Monterado	537	601	89,35%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	115	130	88,46%
7	Bengkayang	Bengkayang	752	761	98,82%
8	Teriak	Teriak	291	312	93,27%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	160	221	72,40%
10	Ledo	Ledo	197	255	77,25%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	65	115	56,52%
12	Lumar	Lumar	153	153	100,00%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	260	299	86,96%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	199	287	69,34%
15	Seluas	Seluas	294	463	63,50%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	196	236	83,05%
17	Siding	Siding	144	146	98,63%
TOTAL			4.789	5.643	84,87%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Bengkayang adalah 4.789 orang ibu hamil dari target yang berjumlah 5.643 orang dengan presentase capaian sebesar 84,87%.



Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



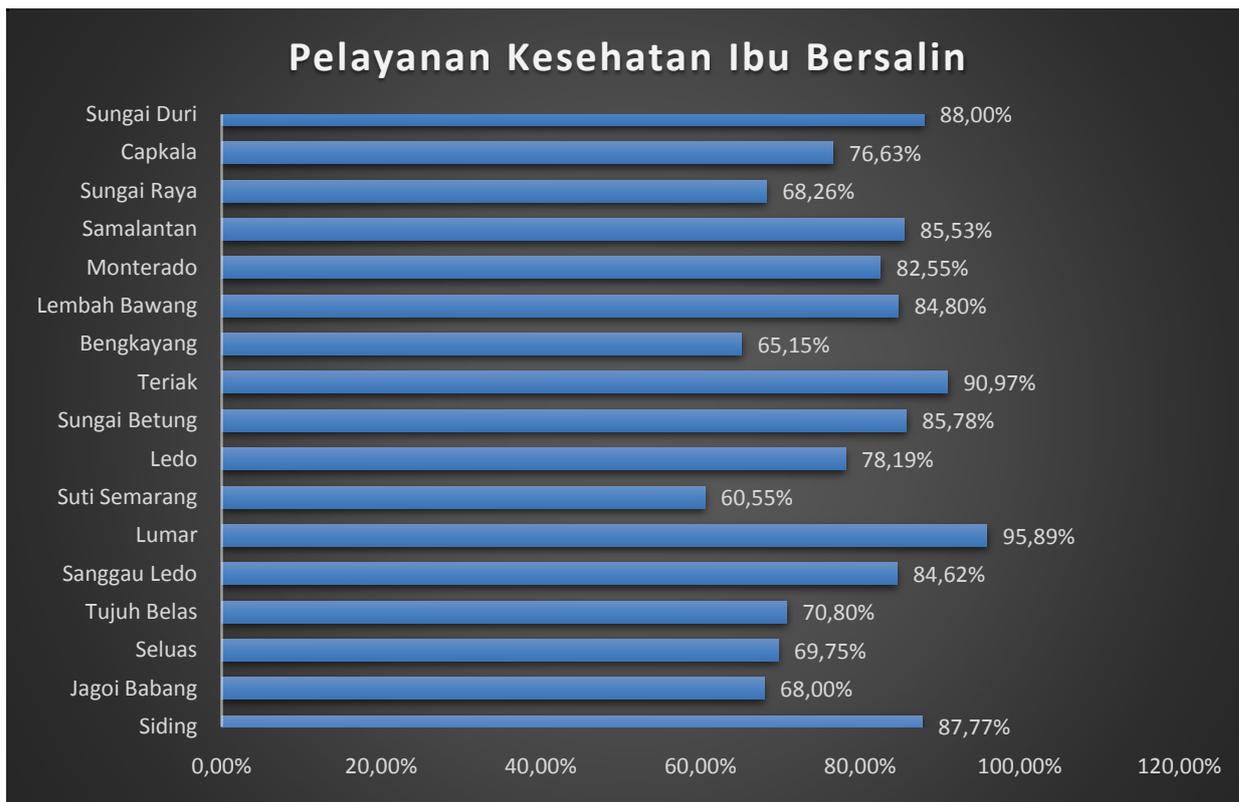


#### 4.4 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	374	425	88,00%
2	Capkala	Capkala	141	184	76,63%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	357	523	68,26%
4	Samalantan	Samalantan	390	456	85,53%
5	Monterado	Monterado	473	573	82,55%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	106	125	84,80%
7	Bengkayang	Bengkayang	473	726	65,15%
8	Teriak	Teriak	272	299	90,97%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	181	211	85,78%
10	Ledo	Ledo	190	243	78,19%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	66	109	60,55%
12	Lumar	Lumar	140	146	95,89%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	242	286	84,62%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	194	274	70,80%
15	Seluas	Seluas	309	443	69,75%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	153	225	68,00%
17	Siding	Siding	122	139	87,77%
TOTAL			4.183	5.387	77,65%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kabupaten Bengkayang adalah 4.183 orang ibu bersalin dari target yang berjumlah 5.387 dengan presentase capaian sebesar 77,65%.

Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



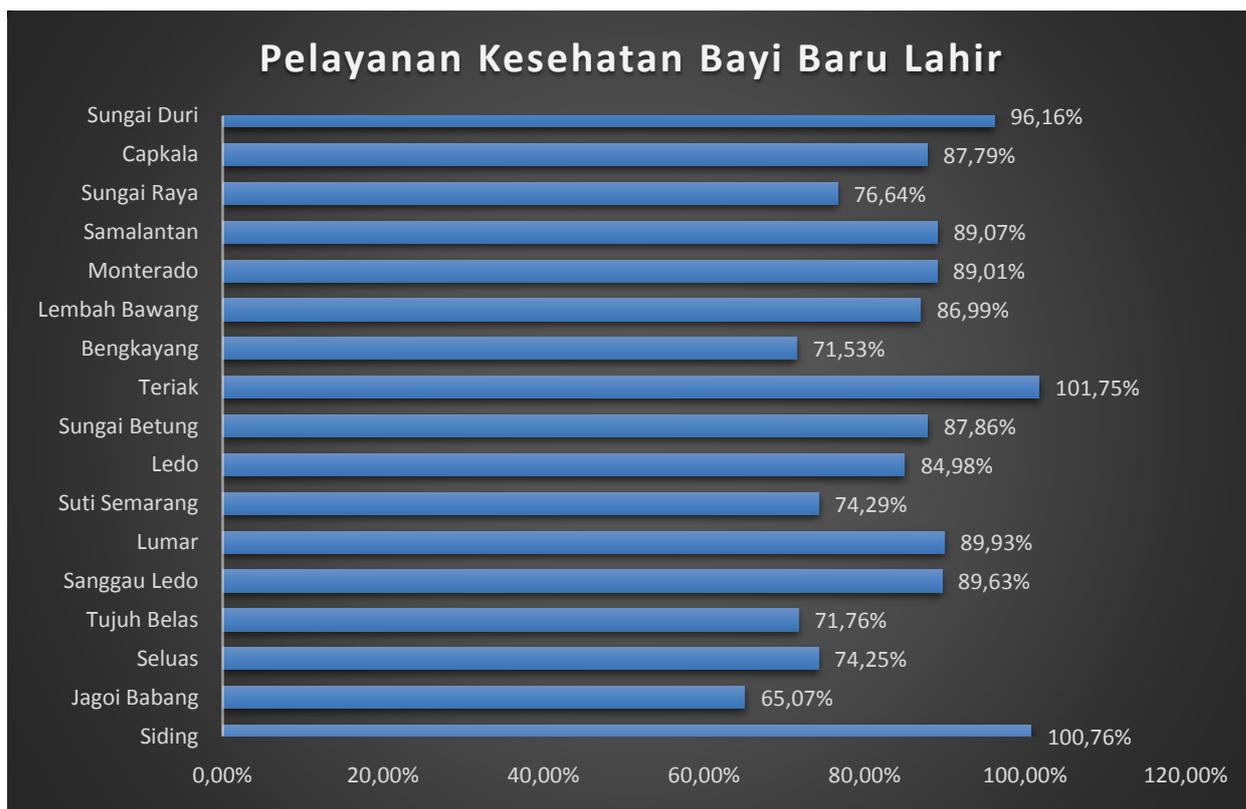
#### 4.5 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	Sungai Raya	Sungai Duri	376	391	96,16%
2	Capkala	Capkala	151	172	87,79%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	374	488	76,64%
4	Samalantan	Samalantan	391	439	89,07%
5	Monterado	Monterado	486	546	89,01%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	107	123	86,99%
7	Bengkayang	Bengkayang	485	678	71,53%
8	Teriak	Teriak	291	286	101,75%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	181	206	87,86%
10	Ledo	Ledo	198	233	84,98%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	78	105	74,29%
12	Lumar	Lumar	125	139	89,93%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	242	270	89,63%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	188	262	71,76%
15	Seluas	Seluas	320	431	74,25%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	149	229	65,07%
17	Siding	Siding	133	132	100,76%
TOTAL			4.275	5.130	83,33%



Total capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Bengkayang adalah 4.275 bayi baru lahir dari target yang berjumlah 5.130 dengan presentase capaian sebesar 83,33%.

Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



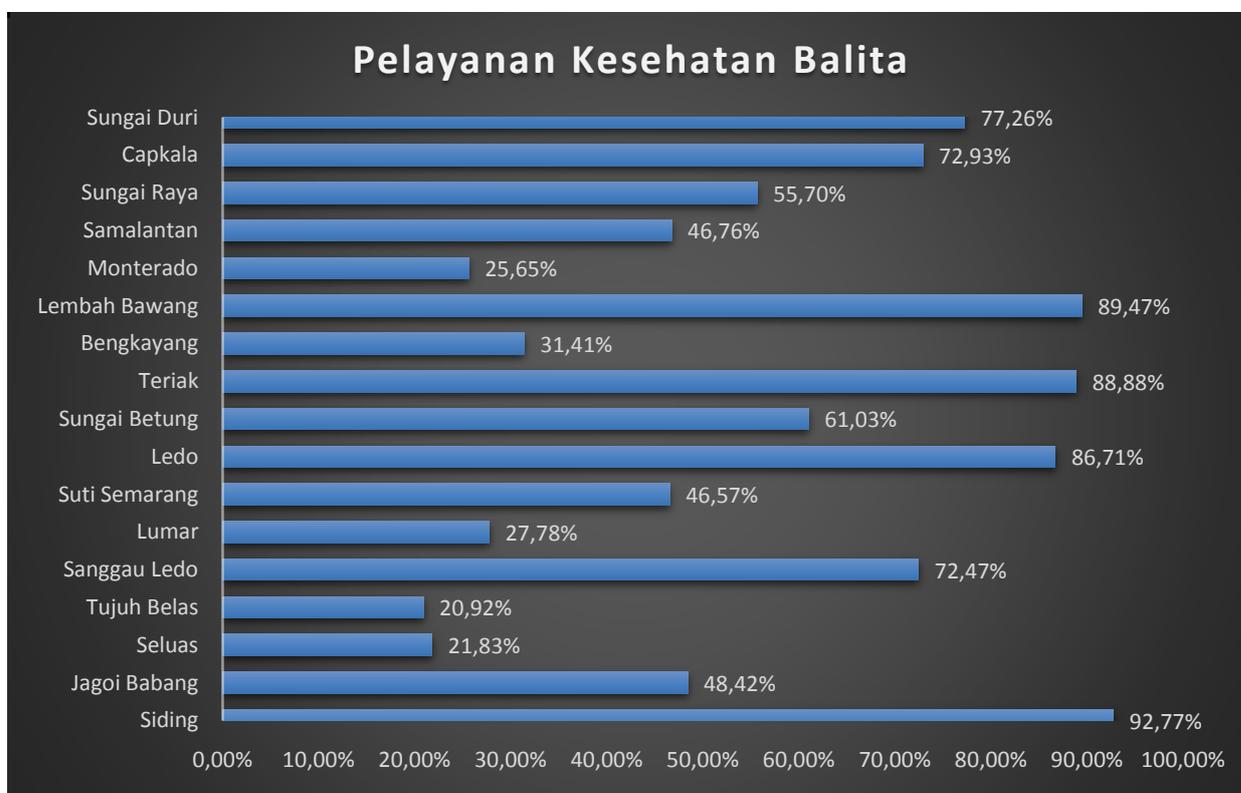


#### 4.6 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	Sungai Raya	Sungai Duri	1.172	1.517	77,26%
2	Capkala	Capkala	501	687	72,93%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	1.056	1.896	55,70%
4	Samalantan	Samalantan	795	1.700	46,76%
5	Monterado	Monterado	544	2.121	25,65%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	425	475	89,47%
7	Bengkayang	Bengkayang	826	2.630	31,41%
8	Teriak	Teriak	983	1.106	88,88%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	487	798	61,03%
10	Ledo	Ledo	783	903	86,71%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	190	408	46,57%
12	Lumar	Lumar	150	540	27,78%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	758	1.046	72,47%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	213	1.018	20,92%
15	Seluas	Seluas	365	1.672	21,83%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	430	888	48,42%
17	Siding	Siding	475	512	92,77%
TOTAL			10.153	19.917	50,98%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Bengkayang adalah 10.153 balita dari target yang berjumlah 19.917 dengan presentase capaian sebesar 50,98%.

Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





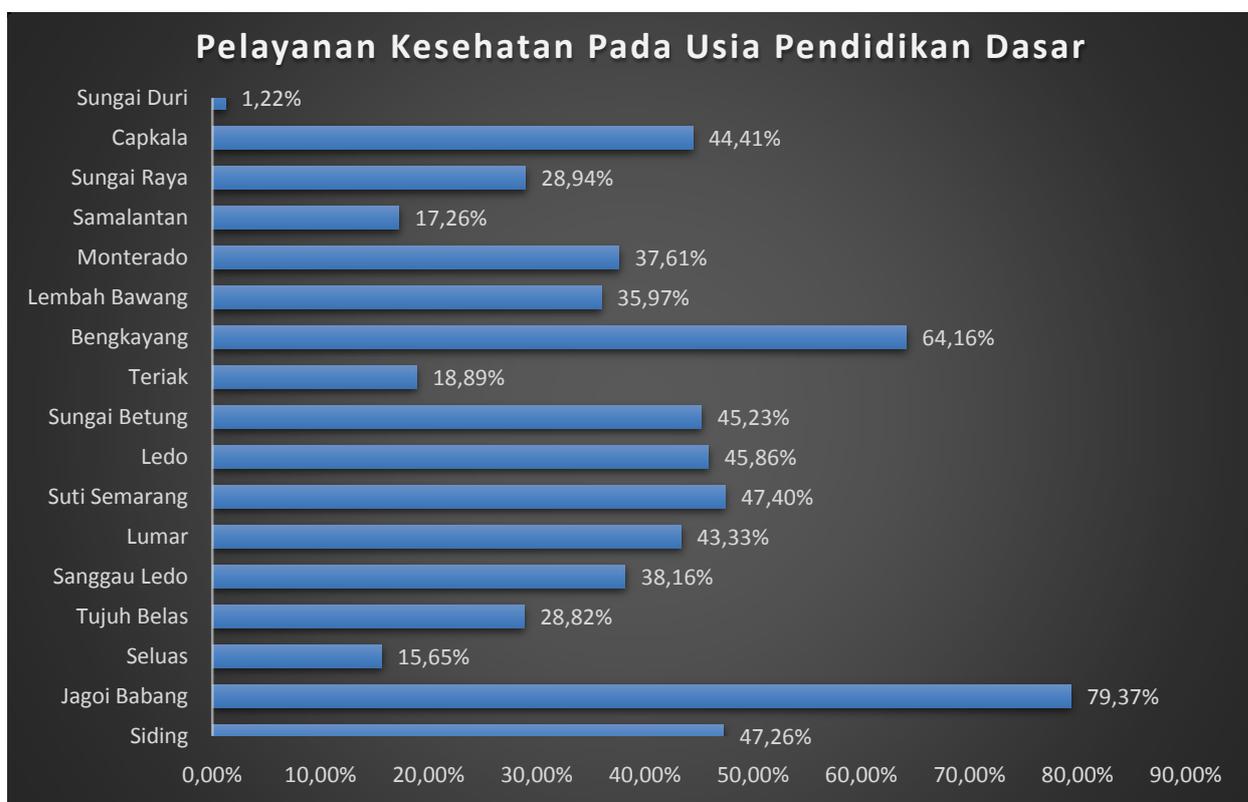
4.7 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	27	2.214	1,22%
2	Capkala	Capkala	445	1.002	44,41%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	801	2.768	28,94%
4	Samalantan	Samalantan	428	2.480	17,26%
5	Monterado	Monterado	1.164	3.095	37,61%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	250	695	35,97%
7	Bengkayang	Bengkayang	2463	3.839	64,16%
8	Teriak	Teriak	305	1.615	18,89%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	526	1.163	45,23%
10	Ledo	Ledo	604	1.317	45,86%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	283	597	47,40%
12	Lumar	Lumar	341	787	43,33%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	582	1.525	38,16%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	428	1.485	28,82%
15	Seluas	Seluas	382	2.441	15,65%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	1.031	1.299	79,37%
17	Siding	Siding	353	747	47,26%
<b>TOTAL</b>			<b>10.413</b>	<b>29.069</b>	<b>35,82%</b>

Total capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkayang adalah 10.413 anak dari target yang berjumlah 29.069 dengan presentase capaian sebesar 35,82%.



Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



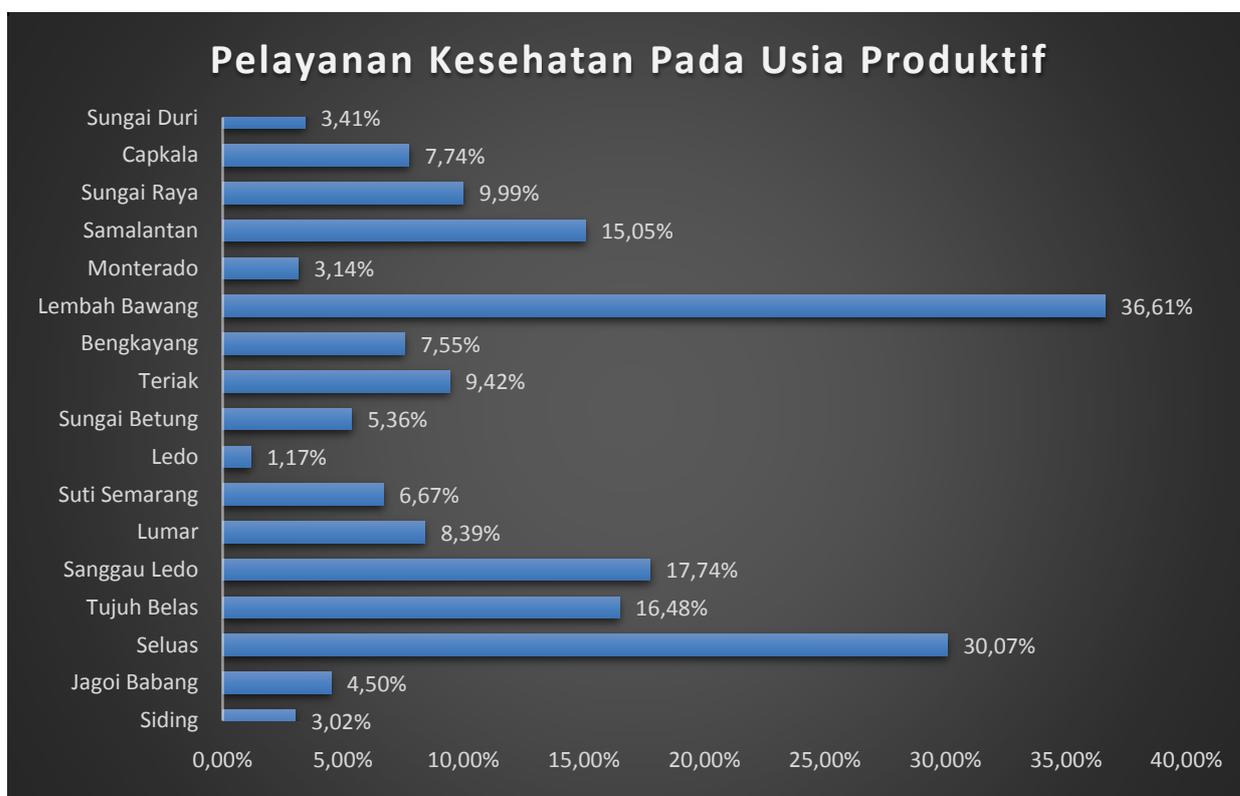
#### 4.8 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	Sungai Raya	Sungai Duri	435	12.751	3,41%
2	Capkala	Capkala	447	5.774	7,74%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	1.593	15.947	9,99%
4	Samalantan	Samalantan	2.153	14.310	15,05%
5	Monterado	Monterado	560	17.850	3,14%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	1.466	4.004	36,61%
7	Bengkayang	Bengkayang	1.670	22.112	7,55%
8	Teriak	Teriak	877	9.310	9,42%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	360	6.718	5,36%
10	Ledo	Ledo	89	7.598	1,17%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	229	3.434	6,67%
12	Lumar	Lumar	381	4.542	8,39%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	1.560	8.796	17,74%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	1.412	8.570	16,48%
15	Seluas	Seluas	4.236	14.086	30,07%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	337	7.494	4,50%
17	Siding	Siding	130	4.309	3,02%
TOTAL			17.935	167.605	10,70%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di Kabupaten Bengkayang adalah 17.935 jiwa dari target yang berjumlah 167.605 dengan presentase capaian sebesar 10,70%.



Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



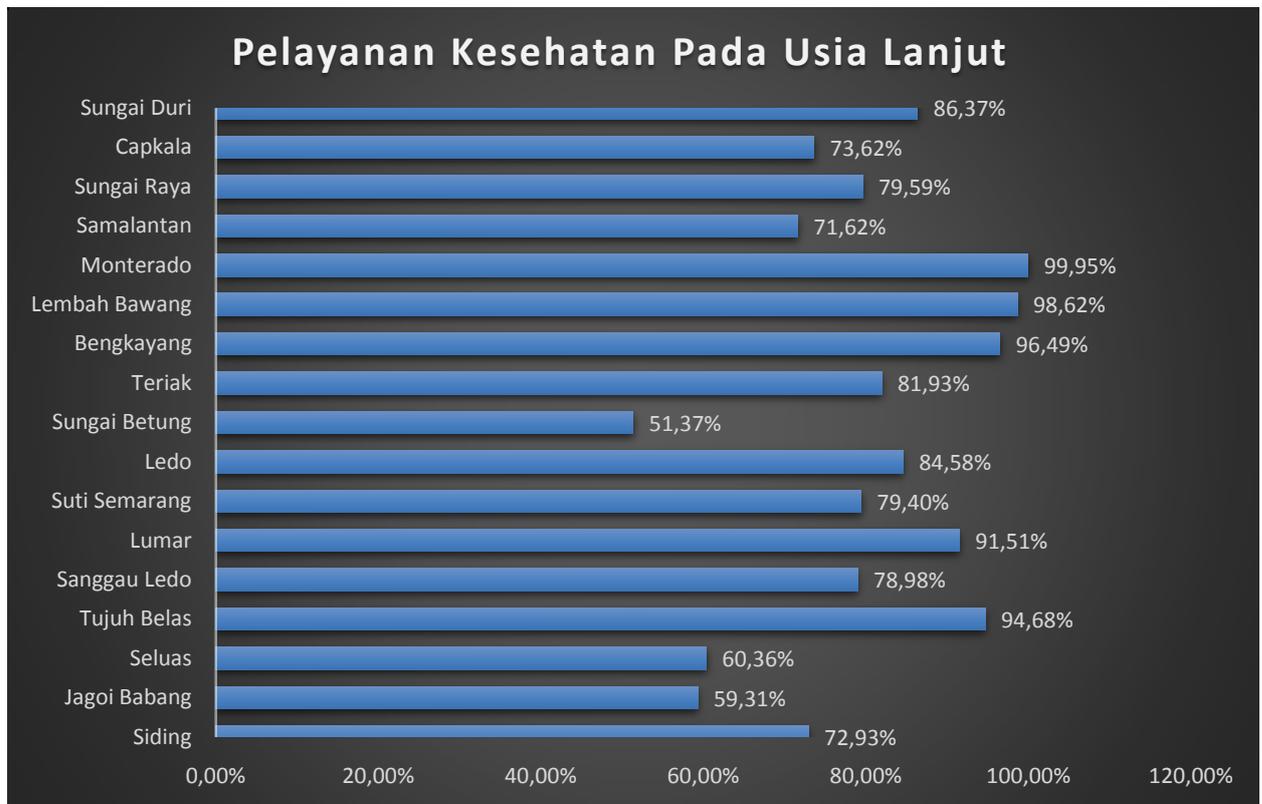
#### 4.9 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	Sungai Raya	Sungai Duri	1.400	1.621	86,37%
2	Capkala	Capkala	1.493	2.028	73,62%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	585	735	79,59%
4	Samalantan	Samalantan	1.625	2.269	71,62%
5	Monterado	Monterado	1.818	1.819	99,95%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	502	509	98,62%
7	Bengkayang	Bengkayang	824	854	96,49%
8	Teriak	Teriak	970	1.184	81,93%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	1.444	2.811	51,37%
10	Ledo	Ledo	488	577	84,58%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	767	966	79,40%
12	Lumar	Lumar	399	436	91,51%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	883	1.118	78,98%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	1.032	1.090	94,68%
15	Seluas	Seluas	1.081	1.791	60,36%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	325	548	59,31%
17	Siding	Siding	695	953	72,93%
TOTAL			16.331	21.309	76,64%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut di Kabupaten Bengkayang adalah 16.331 jiwa dari target yang berjumlah 21.309 dengan presentase capaian sebesar 76,64%.



Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



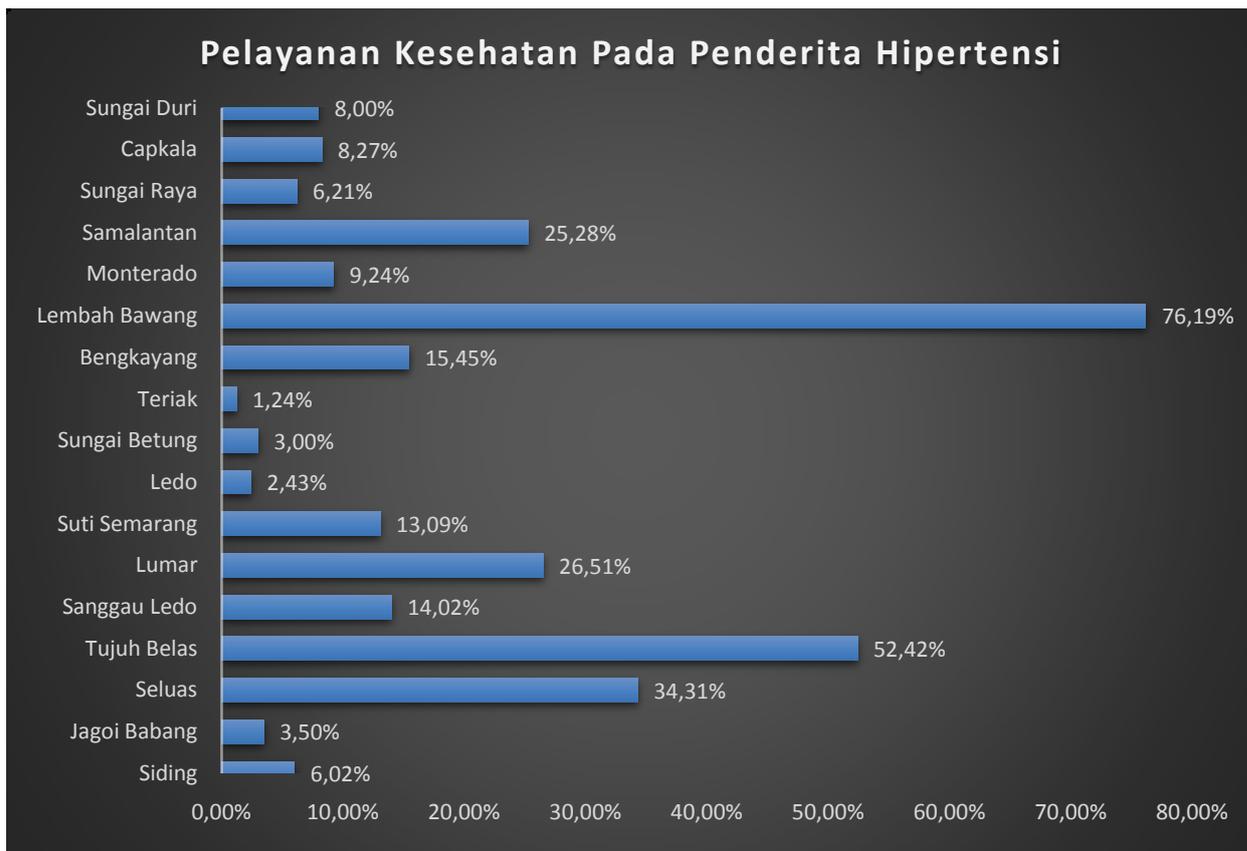


4.10 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	354	4.427	8,00%
2	Capkala	Capkala	166	2.008	8,27%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	344	5.537	6,21%
4	Samalantan	Samalantan	1.256	4.968	25,28%
5	Monterado	Monterado	573	6.198	9,24%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	1.059	1.390	76,19%
7	Bengkayang	Bengkayang	1.186	7.677	15,45%
8	Teriak	Teriak	40	3.232	1,24%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	70	2.332	3,00%
10	Ledo	Ledo	64	2.638	2,43%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	156	1.192	13,09%
12	Lumar	Lumar	418	1.577	26,51%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	461	3.289	14,02%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	1.560	2.976	52,42%
15	Seluas	Seluas	1.807	5.267	34,31%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	91	2.602	3,50%
17	Siding	Siding	90	1.496	6,02%
TOTAL			9.695	58.807	16,49%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi di Kabupaten Bengkayang adalah 9.695 jiwa dari target yang berjumlah 58.807 dengan presentase capaian sebesar 16,49%.

Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



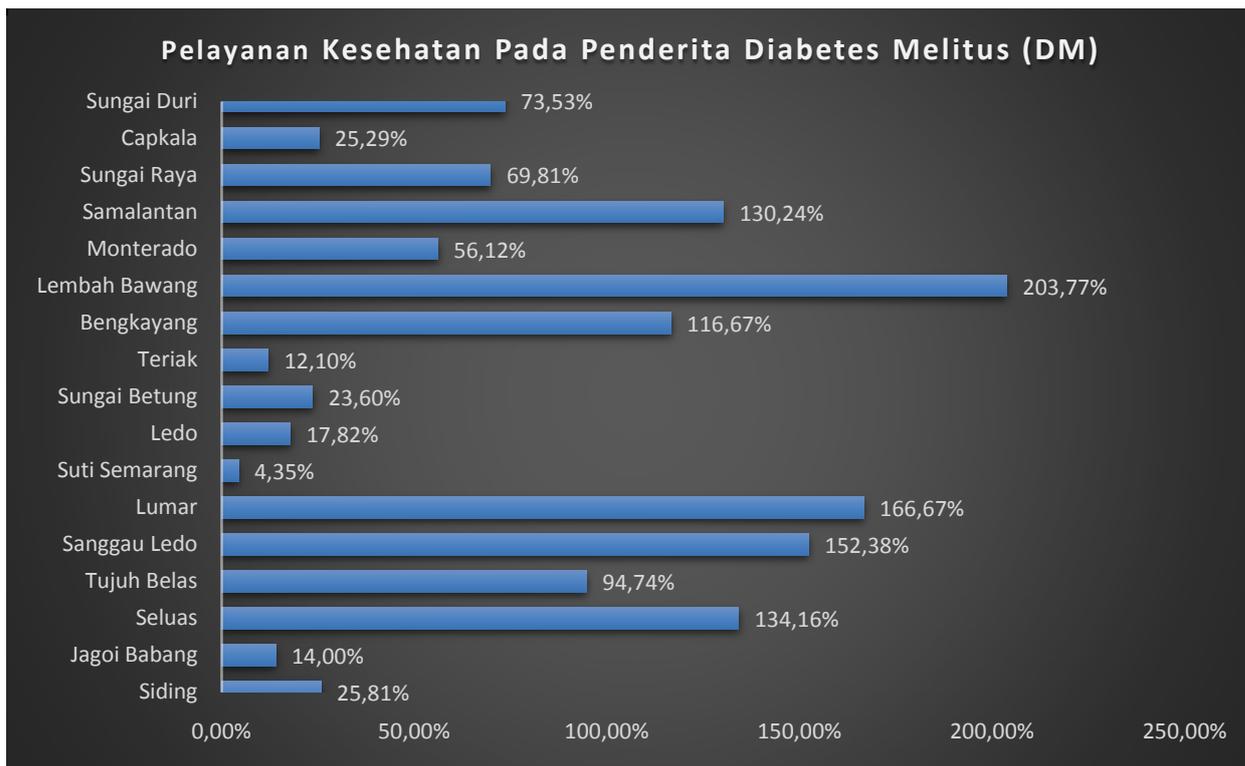
#### 4.11 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	125	170	73,53%
2	Capkala	Capkala	22	87	25,29%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	148	212	69,81%
4	Samalantan	Samalantan	267	205	130,24%
5	Monterado	Monterado	133	237	56,12%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	108	53	203,77%
7	Bengkayang	Bengkayang	343	294	116,67%
8	Teriak	Teriak	15	124	12,10%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	21	89	23,60%
10	Ledo	Ledo	18	101	17,82%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	2	46	4,35%
12	Lumar	Lumar	100	60	166,67%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	192	126	152,38%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	108	114	94,74%
15	Seluas	Seluas	271	202	134,16%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	14	100	14,00%
17	Siding	Siding	16	62	25,81%
TOTAL			1.903	2.282	83,39%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Bengkayang adalah 1.903 jiwa dari target yang berjumlah 2.282 dengan presentase capaian sebesar 83,93%.

Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



#### 4.12 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT (ODGJB) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT (ODGJB)		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	40	40	100%
2	Capkala	Capkala	15	19	80,18%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	49	48	102%
4	Samalantan	Samalantan	44	50	88,06%
5	Monterado	Monterado	28	58	48,16%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	11	14	77,42%
7	Bengkayang	Bengkayang	36	76	47,52%
8	Teriak	Teriak	42	31	134%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	25	22	115%
10	Ledo	Ledo	26	21	122%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	13	11	120%
12	Lumar	Lumar	15	14	107%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	24	27	88,67%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	27	26	102,13%
15	Seluas	Seluas	42	50	83,26%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	21	23	89,92%
17	Siding	Siding	5	13	37,80%
TOTAL			463	545	85,00%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) di Kabupaten Bengkayang adalah 463 jiwa dari target yang berjumlah 545 dengan presentase capaian sebesar 85,00%.

Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





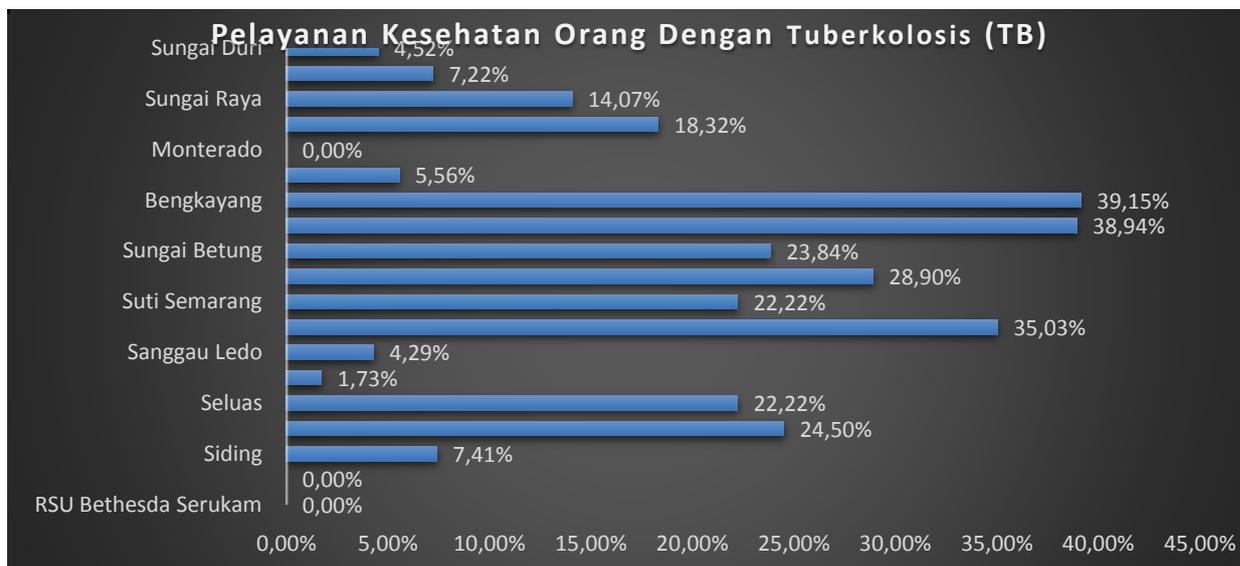
#### 4.13 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKOLOSIS (TB) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKOLOSIS (TB)		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	Sungai Duri	10	221	4,52%
2	Capkala	Capkala	7	97	7,22%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	19	135	14,07%
4	Samalantan	Samalantan	24	131	18,32%
5	Monterado	Monterado	0	119	0,00%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	3	54	5,56%
7	Bengkayang	Bengkayang	110	281	39,15%
8	Teriak	Teriak	44	113	38,94%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	36	151	23,84%
10	Ledo	Ledo	50	173	28,90%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	18	81	22,22%
12	Lumar	Lumar	55	157	35,03%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	7	163	4,29%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	3	173	1,73%
15	Seluas	Seluas	56	252	22,22%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	37	151	24,50%
17	Siding	Siding	4	54	7,41%
18	Bengkayang	RSUD Bumi Sebalu	280	0	0,00%
19	Serukam	RSU Bethesda Serukam	145	0	0,00%
TOTAL			908	2506	36,23%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkolosis (TB) di Kabupaten Bengkayang adalah 203 jiwa dari target yang berjumlah 2.506 dengan presentase capaian sebesar 8,10%.



Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



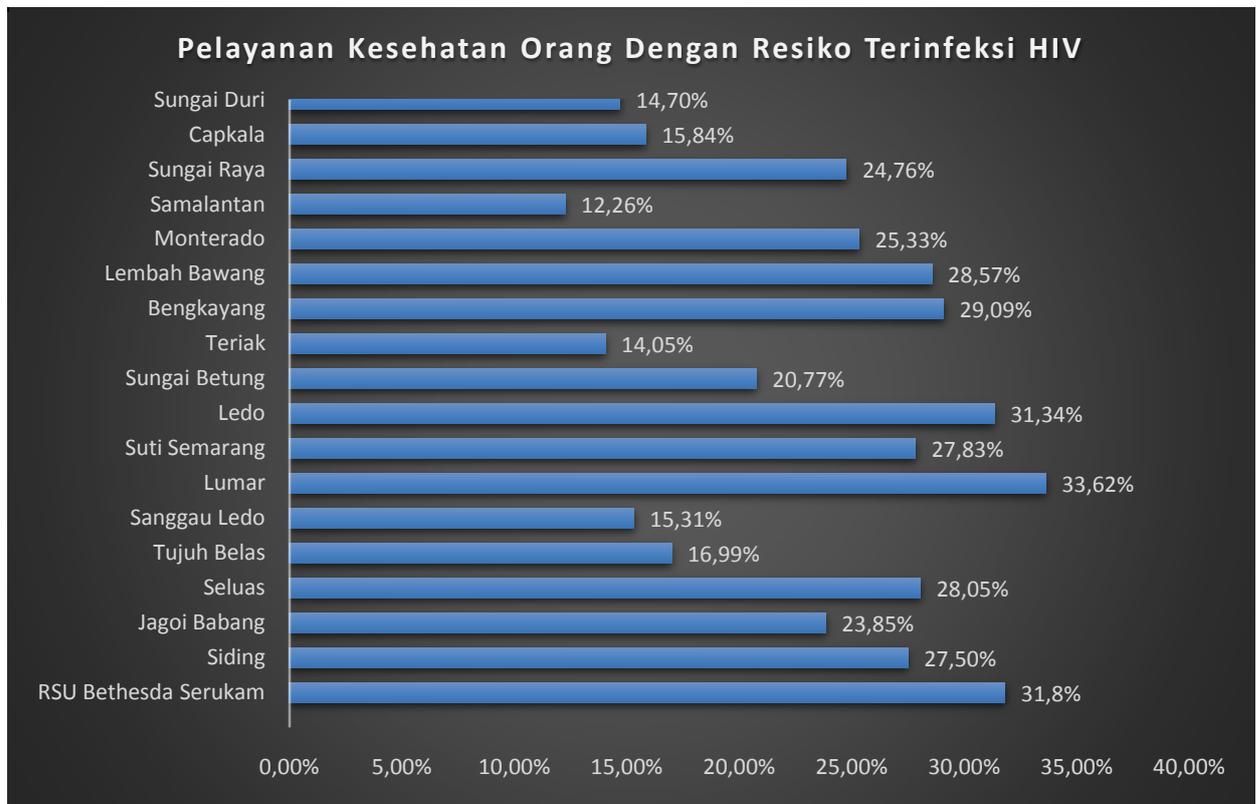
#### 4.14 CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINVEKSI HIV KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINVEKSI HIV		
			CAPAIAN	TARGET	PRESENTASE
1	Sungai Raya	Sungai Duri	61	385	15,84%
2	Capkala	Capkala	52	210	24,76%
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	66	449	14,70%
4	Samalantan	Samalantan	76	300	25,33%
5	Monterado	Monterado	69	563	12,26%
6	Lembah Bawang	Lembah Bawang	46	161	28,57%
7	Bengkayang	Bengkayang	84	598	14,05%
8	Teriak	Teriak	65	313	20,77%
9	Sungai Betung	Sungai Betung	80	275	29,09%
10	Ledo	Ledo	86	309	27,83%
11	Suti Semarang	Suti Semarang	33	120	27,50%
12	Lumar	Lumar	84	268	31,34%
13	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	77	229	33,62%
14	Tujuh Belas	Tujuh Belas	49	320	15,31%
15	Seluas	Seluas	79	465	16,99%
16	Jagoi Babang	Jagoi Babang	62	221	28,05%
17	Siding	Siding	31	130	23,85%
18	RSU Bethesda Serukam	RSU Bethesda Serukam	216	679	31,81%
TOTAL			1.316	5.995	21,95%

Total capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfksi HIV di Kabupaten Bengkayang adalah 1.316 jiwa dari target yang berjumlah 5.995 dengan presentase capaian sebesar 21,95%.



Presentase capaian per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





**REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN (SPM)  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021**

NO	JENIS PELAYANAN	Sungai Duri	Capkalla	Sungai Raya	Samalantan	Monterado	Lembah Bawang	Bengkayang	Teriak	Sungai Betung	Ledo	Suti Semarang	Lumar	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	Seluas	Jagoi Babang	Siding	RSUD Bumi Sebaloda	RSU Bethesda	TOTAL CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,03%	79,27%	80,29%	87,66%	89,35%	88,46%	98,82%	93,27%	72,40%	77,25%	56,52%	100,00%	86,96%	69,34%	63,50%	83,05%	98,63%			84,87%
2	Pelayanan Ibu Bersalin	88,00%	76,63%	68,26%	85,53%	82,55%	84,80%	65,15%	90,97%	85,78%	78,19%	60,55%	95,89%	84,62%	70,80%	69,75%	68,00%	87,77%			77,65%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96,16%	87,79%	76,64%	89,07%	89,01%	86,99%	71,53%	101,75%	87,86%	84,98%	74,29%	89,93%	89,63%	71,76%	74,25%	65,07%	100,76%			83,33%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	77,26%	72,93%	55,70%	46,76%	25,65%	89,47%	31,41%	88,88%	61,03%	86,71%	46,57%	27,78%	72,47%	20,92%	21,83%	48,42%	92,77%			50,98%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1,22%	44,41%	28,94%	17,26%	37,61%	35,97%	64,16%	18,89%	45,23%	45,86%	47,40%	43,33%	38,16%	28,82%	15,65%	79,37%	47,26%			35,82%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	3,41%	7,74%	9,99%	15,05%	3,14%	36,61%	7,55%	9,42%	5,36%	1,17%	6,67%	8,39%	17,74%	16,48%	30,07%	4,50%	3,02%			10,70%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	86,37%	73,62%	79,59%	71,62%	99,95%	98,62%	96,49%	81,93%	51,37%	84,58%	79,40%	91,51%	78,98%	94,68%	60,36%	59,31%	72,93%			76,64%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8,00%	8,27%	6,21%	25,28%	9,24%	76,19%	15,45%	1,24%	3,00%	2,43%	13,09%	26,51%	14,02%	52,42%	34,31%	3,50%	6,02%			16,49%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	73,53%	25,29%	69,81%	130,24%	56,12%	203,77%	116,67%	12,10%	23,60%	17,82%	4,35%	166,67%	152,38%	94,74%	134,16%	14,00%	25,81%			83,38%
10	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	100%	80,18%	102%	88,06%	48,16%	77,42%	47,52%	134%	115%	122%	120%	107%	88,67%	102,13%	83,26%	89,92%	37,80%			84,95%



	Berat																				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,52%	7,22%	14,07%	18,32%	0,00%	5,56%	39,15%	38,94%	23,84%	28,90%	22,22%	35,03%	4,29%	1,73%	22,22%	24,50%	7,41%	0,00%	0,00%	36,22%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	15,84%	24,76%	14,70%	25,33%	12,26%	28,57%	14,05%	20,77%	29,09%	27,83%	27,50%	31,34%	33,62%	15,31%	16,99%	28,05%	23,85%		31,81%	21,95%



Berikut disajikan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dan 2020 sebagai perbandingan tahun sebelumnya.

**REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PRESENTASE</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.984	6.135	81,24%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.294	5.856	73,33%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.280	5.577	76,74%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	14.994	21.906	68,45%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.658	31.198	30,96%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.320	158.333	9,04%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.598	12.189	119,76%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.206	35.925	28,41%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	3.003	12.151	24,71%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	96	119	80,67%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	988	1.912	51,67%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.484	6.500	38,22%



**REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PRESENTASE</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.107	6.107	83,63%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.416	5.830	75,75%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.563	5.552	82,19%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13.789	21.883	63,01%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.179	46.225	24,18%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.562	160.890	15,27%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.141	18.750	38,09%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11.622	62.372	18,63%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	1.794	2.389	75,09%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	354	545	64,95%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	852	2.295	37,12%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.857	6.520	43,82%

**REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PRESENTASE</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.789	5.643	84,87%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.183	5.387	77,65%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.275	5.130	83,33%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	10.153	19.917	50,98%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.413	29.069	35,82%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.935	167.605	10,70%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.331	21.309	76,64%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.695	58.807	16,49%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	1.903	2.282	83,39%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	463	545	84,95%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	908	2.507	36,22%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	1.316	5.995	21,95%

Dari hasil rekapitulasi laporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan per Puskesmas Tahun 2021 dapat dilihat bahwa capaian



SPM untuk 12 indikator belum berjalan dengan baik, dari 12 Indikator SPM hanya 7 Indikator yang capaiannya lebih dari 50%, sedangkan 5 Indikator SPM masih dibawah 50%, dengan indikator pelayanan terendah adalah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang hanya mencapai 10,70% cakupan pelayanan .Perbandingan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019-2021 (Semester I)**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN CAPAIAN		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81,24%	83,63%	84,87%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	73,33%	75,75%	77,65%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	76,74%	82,19%	83,33%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	68,45%	63,01%	50,98%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30,96%	24,18%	35,82%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9,04%	15,27%	10,70%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	119,76%	38,09%	76,64%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	28,41%	18,63%	16,49%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	24,71%	75,09%	83,39%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	80,67%	64,95%	84,95%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	51,67%	37,12%	36,22%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	38,22%	43,82%	21,95%



#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

### ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	JENIS PELAYANAN	Sungai Duri		Capkala		Sungai Raya		Samalantan		Monterado	
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 29.890.000	Rp 27.790.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 69.500.000	Rp 69.500.000	Rp 88.140.000	Rp 88.140.000	Rp 49.350.000	Rp 29.250.000
2	Pelayanan Ibu Bersalin	Rp 37.500.000	Rp 37.500.000	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	Rp -	Rp -	Rp 18.050.000	Rp 18.050.000	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000	Rp 9.450.000	Rp 8.800.000	Rp 18.050.000	Rp 18.050.000	Rp -	Rp -
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 123.550.000	Rp 123.550.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 84.100.000	Rp 83.950.000	Rp 187.350.000	Rp 187.350.000	Rp 215.400.000	Rp 180.800.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 8.970.000	Rp 8.970.000	Rp 21.000.000	Rp 12.900.000	Rp 35.150.000	Rp 33.500.000	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	Rp 37.200.000	Rp 37.200.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp 9.040.000	Rp 5.740.000	Rp 10.350.000	Rp 9.000.000	Rp 13.500.000	Rp 13.950.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp 24.624.900	Rp 24.513.000	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000	Rp 36.400.000	Rp 36.900.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 17.100.000	Rp 17.100.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.600.000	Rp 10.550.000	Rp 39.375.000	Rp 16.880.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Rp 23.400.000	Rp 23.400.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 10.600.000	Rp 10.550.000	Rp 39.375.000	Rp 16.880.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000
10	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	Rp 12.900.000	Rp 12.100.000	Rp 18.900.000	Rp 18.900.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000



11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 10.200.000	Rp 7.200.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 21.000.000	Rp 17.300.000	Rp 18.900.000	Rp 18.900.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Rp 3.000.000	Rp 300.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 13.800.000	Rp 13.800.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000
TOTAL		Rp 296.274.900	Rp 283.563.000	Rp 196.650.000	Rp187.200.000	Rp 306.100.000	Rp 299.500.000	Rp 489.190.000	Rp 444.200.000	Rp 420.550.000	Rp366.350.000

### ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

#### KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 (lanjutan)

NO	JENIS PELAYANAN	Lembah Bawang		Bengkayang		Teriak		Sungai Betung		Ledo	
		Alokasi Anggaran	Realisasi								
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 46.800.000	Rp 46.800.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp 121.934.600	Rp118.800.000	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000	Rp 82.450.000	Rp 79.250.000
2	Pelayanan Ibu Bersalin	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.400.000	Rp 68.750.000	Rp 68.750.000	Rp 9.000.000	Rp 8.475.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 9.000.000	Rp 8.475.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 61.300.000	Rp 61.300.000	Rp 18.300.000	Rp 18.300.000	Rp 221.100.000	Rp217.200.000	Rp 111.200.000	Rp110.600.000	Rp 133.350.000	Rp133.350.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 7.400.000	Rp 7.400.000	Rp 12.900.000	Rp 12.900.000	Rp 65.400.000	Rp 58.500.000	Rp 50.000.000	Rp 44.400.000	Rp 57.650.000	Rp 53.850.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp 5.600.000	Rp 5.600.000	Rp 6.600.000	Rp 6.600.000	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	Rp 37.600.000	Rp 37.600.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 38.550.000	Rp 38.550.000	Rp 56.550.000	Rp 56.550.000	Rp 21.200.000	Rp 21.200.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000



8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000	Rp 23.715.000	Rp 23.715.000	Rp 43.200.000	Rp 43.200.000	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000	Rp 9.450.000	Rp 9.375.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000	Rp 23.715.000	Rp 23.715.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000	Rp 9.450.000	Rp 9.375.000
10	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 18.900.000	Rp 18.900.000	Rp 20.100.000	Rp 20.100.000	Rp 14.400.000	Rp 13.500.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 8.100.000	Rp 810.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 30.600.000	Rp 25.800.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Rp 5.600.000	Rp 5.600.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 24.200.000	Rp 24.200.000
TOTAL		Rp 261.100.000	Rp261.100.000	Rp 211.980.000	Rp211.980.000	Rp 573.584.600	Rp551.760.000	Rp 372.750.000	Rp366.550.000	Rp 401.750.000	Rp387.850.000



**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 (lanjutan)**

NO	JENIS PELAYANAN	Suti Semarang		Lumar		Sanggau Ledo		Tujuh Belas		Seluas	
		Alokasi Anggaran	Realisasi								
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 74.700.000	Rp 74.700.000	Rp 78.000.000	Rp 78.000.000	Rp 83.900.000	Rp 74.200.000	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	Rp 55.200.000	Rp 55.200.000
2	Pelayanan Ibu Bersalin	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp -	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 41.400.000	Rp 41.400.000	Rp -	Rp -	Rp 26.000.000	Rp 10.700.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 40.200.000	Rp 40.200.000	Rp 78.000.000	Rp 78.000.000	Rp 38.500.000	Rp 28.400.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 19.500.000	Rp 19.500.000	Rp 11.600.000	Rp 11.600.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 28.200.000	Rp 28.200.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp 37.800.000	Rp 37.800.000	Rp -	Rp -	Rp 10.400.000	Rp 10.400.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp 37.800.000	Rp 37.800.000	Rp 22.200.000	Rp 22.200.000	Rp 34.800.000	Rp 34.800.000	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 10.400.000	Rp 10.400.000	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Rp -	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 10.400.000	Rp 10.400.000	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000
10	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat	Rp 37.800.000	Rp 28.350.000	Rp 17.250.000	Rp 17.250.000	Rp 16.400.000	Rp 9.900.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 18.200.000	Rp 18.200.000	Rp 28.950.000	Rp 28.950.000	Rp 15.500.000	Rp 15.500.000	Rp 15.600.000	Rp 15.600.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Rp 9.450.000	Rp 9.450.000	Rp 27.450.000	Rp 27.450.000	Rp 21.200.000	Rp 20.900.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000
TOTAL		Rp 320.550.000	Rp311.100.000	Rp 295.350.000	Rp295.350.000	Rp 294.100.000	Rp252.200.000	Rp 187.200.000	Rp187.200.000	Rp 288.000.000	Rp288.000.000



**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 (lanjutan)**

NO	JENIS PELAYANAN	Jagoi Babang		Siding		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		TOTAL	
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 64.410.000	Rp 64.410.000	Rp 45.600.000	Rp 45.600.000	Rp 91.870.500	Rp 91.870.500	Rp1.076.145.100	Rp1.037.910.500
2	Pelayanan Ibu Bersalin	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	Rp -	Rp -	Rp 91.870.500	Rp 91.870.500	Rp 326.570.500	Rp 325.445.500
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 2.200.000	Rp 1.400.000	Rp 7.600.000	Rp 7.600.000	Rp 91.870.500	Rp 91.870.500	Rp 280.770.500	Rp 261.995.500
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 31.400.000	Rp 31.400.000	Rp 180.300.000	Rp180.300.000	Rp 159.260.000	Rp159.260.000	Rp1.823.110.000	Rp1.773.760.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 32.100.000	Rp 32.100.000	Rp 27.100.000	Rp 27.100.000	Rp -	Rp -	Rp 435.620.000	Rp 409.570.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp 22.100.000	Rp 22.100.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	Rp 251.990.000	Rp 247.790.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 20.600.000	Rp 20.600.000	Rp -	Rp -	Rp 523.024.900	Rp 523.413.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 5.900.000	Rp 5.900.000	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000	Rp -	Rp -	Rp 267.890.000	Rp 245.270.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Rp 5.900.000	Rp 5.900.000	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000	Rp 21.200.000	Rp 21.155.000	Rp 251.190.000	Rp 228.525.000
10	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat	Rp 15.600.000	Rp 15.600.000	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 20.600.000	Rp 20.525.000	Rp 287.650.000	Rp 269.925.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 29.500.000	Rp 29.500.000	Rp 15.200.000	Rp 10.600.000	Rp -	Rp -	Rp 292.550.000	Rp 269.160.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Rp 5.750.000	Rp 5.750.000	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000	Rp 24.180.000	Rp 24.180.000	Rp 204.730.000	Rp 201.730.000
TOTAL		Rp 254.260.000	Rp253.460.000	Rp 351.000.000	Rp346.400.000	Rp 500.851.500	Rp500.731.500	Rp6.021.241.000	Rp5.794.494.500



#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas diperkuat oleh personil PNS maupun Non PNS yang tersebar pada 17 Puskesmas di 17 Kecamatan. Untuk tenaga non PNS diperkuat dari Dokter PTT, Dokter Gigi PTT dan Bidan PTT. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan personil dalam upaya pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) di tiap wilayah kerja puskesmas.

#### Data Tenaga Kesehatan Pada SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

DATA PERSONIL PER JABATAN DENGAN STATUS PNS DAN CPNS  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2021

NO	Jabatan	Sungai Duri	Capkala	Sungai Raya	Samalantan	Monterado	Lembah Bawang	Bengkayang	Teriak	Sungai Betung	Ledo	Suti Semarang	Lumar	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	Seluas	Jagoi Babang	Siding	Dinas Kesehatan dan KB	Gudang Farmasi	RSUD Bumi Sebalu	RSU Bethesda Serukam	Total
1	Dokter Umum	2	1	2	2	1	2	3	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	13	17	58
2	Dokter Gigi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	7
3	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	24
4	Perawat	22	12	19	53	28	22	34	24	31	21	21	18	35	14	35	25	21	13	0	128	93	669
5	Terapis Gigi dan Mulut	2	1	5	2	2	5	4	0	2	2	2	4	5	3	2	1	1	1	0	3	0	47
6	Bidan	10	20	13	29	28	15	32	35	20	23	13	27	28	22	19	20	16	5	0	32	7	414
7	Promkes (Kemas)	0	2	0	3	3	2	3	1	2	0	2	3	3	1	2	2	0	8	0	2	1	40
8	Gizi	2	1	3	1	3	1	4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	5	0	6	2	45
9	Analisis	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	2	1	2	1	1	1	0	0	3	3	26
10	Apoteker	1	2	1		2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	3	5	23
11	Ast. Apoteker	2	2	1	2		1	1	1	1	2	0	3	2	2	2	2	2	1	4	3	2	36
12	Kesling	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	3	3	2	2	1	1	2	5	0	1	0	37
13	Administrasi/Umum	15	7	7	9	3	3	2	5	2	6	3	3	5	5	5	5	7	15	0	104	78	289
14	Rekam Medis	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	3	16
15	Radiografer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8



16	Penata Anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Teknisi Pelayanan Darah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Psikologis Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
19	Fisioterapi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	
20	Elektro medis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
21	Struktural	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	21	0	10	0	38
22	Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
23	Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	20	
24	Supir Ambulan	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	3	4	22	

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

NO	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p>a. Puskesmas mengalami kendala dalam memberikan pelayanan <i>antenatal</i> dengan optimal di karenakan adanya pandemi COVID-19</p> <p>b. Kurangnya informasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga</p> <p>c. Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan masyarakat serta belum memahami sepenuhnya mengenai bahaya-bahaya pada masa kehamilan sehingga ibu hamil menganggap tidak perlu datang ke</p>	<p>a. Tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas mampu melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil apabila didapatkan ada ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan ulang (K4), supaya capaian <i>antenatal</i> sesuai standar dapat diberikan pada ibu hamil</p> <p>b. Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas mampu</p>



		<p>fasyankes untuk melakukan pemeriksaan apabila tidak ada keluhan dalam kehamilan</p> <p>d. Puskesmas dan desa belum optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yaitu kurang tenaga bidang yang tinggal di desa dan poskesdes</p> <p>e. Jarak tempuh Fasyankes yang jauh dari tempat tinggal ibu hamil</p> <p>f. Kerjasama Lintas Sektor belum optimal terjadi antar puskesmas di wilayah kerjanya.</p>	<p>memberika informasi sedini mungkin pada usia pra nikah kepada masyarakat terutama pasangan usia subur mengenai kesehatan reproduksi dan proses apa saja yang terjadi dalam masa kehamilan serta bahay-bahaya yang terjadi dalam masa kehamilannya dan informasi bahwa pentingnya memeriksa kehamilannya ke tenaga nakes di wilayahnya.</p> <p>c. Pemerintah dan desa menyiapkan transportasi terutama untuk akses jalan yang sulit / jauh.</p> <p>d. Tenaga Kesehatan di Puskesmas (pustu dan poskesdes) mampu melakukan kerjasama lintas sektor lebih optimal (pemangku</p>
--	--	--	---



			kepentingan / pengambilan kebijakan, tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat) di wilayah kerjanya dengan membentuk Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) salah satunya adalah pembentukan Desa Siaga.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p>a. Puskesmas mengalami kendala dalam memberikan pelayanan persalinan di fasyankes dengan optimal di karenakan adanya pandemi COVID-19</p> <p>b. Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar baik di pustu dan poskesdes sehingga tidak bisa melaksanakan pelayanan persalinan dan satu2 yg memenuhi standar persalinan fasyankes adalah Puskesmas</p> <p>c. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang</p>	<p>a. Puskesmas mampu melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil serta menjelaskan kepada ibu hamil yang akan melahirkan dan meyakinkan ibu hamil bahwa persalinan di fasyankes adalah persalinan yang paling aman untuk ibu dan bayinya.</p> <p>b. Memenuhi kurangnya tenaga bidan di puskesmas dan mengupayakan</p>



		<p>optimal dalam mempromosikan persalihan lebih aman di fasyankes</p> <p>d. Letak geografis yang sulit</p>	<p>supaya pustu dan poskesdes bisa memenuhi standar pelayanan untuk di jadikan fasyankes tempat menolong persalinan selain di puskesmas, khususnya pada desa yang jauh dan desa yang mengalami kendala dalam transportasi atau letak geografis yang sulit</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama secara optimal dengan lintas sektor yang terkait di wilayah kerja puskesmas dalam mempromosikan bahwa persalihan yang aman adalah di fasyankes.</p>
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<p>a. Puskesmas mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kunjungan neonatal dengan optimal di karenakan adanya pandemi COVID-19</p>	<p>a. Puskesmas mampu melakukan kunjungan rumah kepada bayi baru lahir serta menjelaskan kepada ibu dan keluarga</p>



		<p>b. Pertolongan persalihan masih banyak di tolong oleh dukun bayi di rumah dan tidak ada kunjungan oleh nakes.</p> <p>c. Kerja sama lintas sektor yang masih kurang optimal kurang dukungan desa dalam memotivasi ibu dan keluarga agar membawa anaknya untuk kunjungan neonatus sampai selesai</p> <p>d. Letak geografis yang sulit</p>	<p>bahwa kunjungan neonatus oleh tenaga kesehatan sangat lah penting serta untuk memenuhi hak-hak pada bayi baru lahir.</p> <p>b. Penambahan tenaga bidan di puskesmas dan mengupayakan supaya puskesmas dan poskesdes bisa memenuhi standar pelayanan untuk melakukan kunjungan kunjungan neonatus 1,2, dan 3</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama secara optimal dengan lintas sektor yang terkait di wilayah kerja puskesmas dengan dengan membentuk lebih banyak lagi posyandu</p> <p>d. Pemerintah dan desa mampu menyediakan transfortasi desa untuk akses jalan</p>
--	--	--	--



			yang sulit
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<p>a. Puskesmas mengalami kendala dalam memberikan pelayanan pada balita dan masih belum optimal di karenakan adanya pandemi COVID-19</p> <p>b. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga dalam pemenuhan hak anak balita yang harus di terimanya sehingga tidak lagi datang keposyandu untuk di timbang dan lainnya</p> <p>c. Kurangnya kemampuan pengelola program dalam memahami indikator dalam pencapaian kunjungan balita</p> <p>d. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang optimal</p> <p>e. Letak geografis yang sulit</p>	<p>a. Tenaga nakes di Puskesmas mampu melakukan kunjungan rumah, menjelaskan dan mengajarkan serta memotivasi ibu bagaimana memantau tumbuh kembang anak balitanya selama musim pandemi serta melaporkan hasil perkembangan anaknya ke tenaga kesehatan dan berkonsultasi ke tenaga nakes di wilayahnya apabila ada permasalahan yang terjadi pada balitanya.</p> <p>b. Memberikan pelatihan ulang untuk tenaga Nakes khususnya PJ anak dalam mengelola program anak khususnya Pj anak yang masih kurang dalam mengelola</p>



			<p>program anak</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor lebih optimal lagi dalam hal promosi bahwa pentingnya untuk datang keposyandu dalam pemenuhan hak anak balita bahwa balita berhak mendapatkan haknya yaitu pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya .</p>
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<p>a. Pelayanan kesehatan pada Usia Sekolah Dasar tidak optimal pada masa pandemi Covid-19</p> <p>b. Penyampaian Laporan belum tertib / tepat waktu</p> <p>c. Beberapa Petugas Puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan</p> <p>d. Pergantian Pengelola Program di Puskesmas setiap Tahun berubah</p> <p>e. Beberapa Pengelola Program Kesehatan Usia Sekolah Dasar di</p>	<p>a. Melakukan kunjungan rumah untuk pelayanan kesehatan Usia Sekolah Dasar</p> <p>b. Kepala Puskesmas mengontrol setiap laporan bulanan agar pengiriman laporan tepat waktu</p> <p>c. Konsultasi kepada pengelola program kesehatan Usia Sekolah Dasar di Kabupaten / supervisi pengelola</p>



		<p>Puskesmas masih belum mendapatkan pelatihan Upaya Kesehatan Sekolah</p> <p>f. Kerjasama Lintas Sektor masih belum berjalan maksimal dalam pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dasar</p> <p>g. Belum Tercovernya Penjaringan Kesehatan di Setiap Sekolah</p>	<p>program Kesehatan Usia Sekolah Dasar di Kabupaten ke Puskesmas</p> <p>d. Agar Pengelola Program kesehatan Usia Sekolah Dasar di puskesmas tidak di ganti setiap tahun</p> <p>e. Pengeloala Program Kesehatan Usia Sekolah Dasar di Puskesmas dapat dilatih</p> <p>f. Pembentukan Kader Kesehatan/Dokter Kecil di Setiap Sekolah</p> <p>g. Pembentukan Penjaringan Kesehatan Di Setiap Sekolah</p>
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<p>a. Skrining faktor risiko pada usia produktif sangat terbatas pada masa pandemi COVID-19;</p> <p>b. Pelayanan Posbindu PTM tidak berjalan selama masa pandemi COVID-19;</p> <p>c. Belum semua Posbindu memiliki kader (masih petugas kesehatan);</p>	<p>a. Melakukan skrining maupun pemeriksaan PTM di Puskesmas dengan menerapkan protokol kesehatan;</p> <p>b. Merekrut kader Posbindu PTM untuk menjalankan kegiatan di Posbindu</p>



		<p>d. Kader posbindu PTM belum terlatih;</p> <p>e. Belum semua desa mempunyai posbindu PTM;</p> <p>f. Belum semua posbindu mempunyai posbindu KIT;</p> <p>g. Masyarakat kurang berminat memeriksakan diri ke Posbindu karena di Posbindu tidak ada pengobatan;</p> <p>h. Masyarakat belum sadar pentingnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular;</p> <p>i. Pemerintah desa belum optimal mendukung kegiatan posbindu;</p> <p>j. Inovasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan;</p> <p>k. Pengelola program setiap tahun berganti.</p>	<p>sehingga kegiatan dapat berjalan secara kontinyu;</p> <p>c. Memberikan OJT atau pelatihan kepada Kader Posbindu PTM;</p> <p>d. Penyediaan alat dan BHP untuk kegiatan Posbindu PTM oleh desa;</p> <p>e. Mengadvokasi Kepala Desa untuk mendukung kegiatan Posbindu PTM;</p> <p>f. Promosi kesehatan pentingnya deteksi dini PTM melalui penyuluhan inovatif;</p> <p>g. Memperkuat kerjasama lintas program di Puskesmas sehingga program dapat berjalan dengan baik;</p> <p>h. Membuat pojok tensi dan pengukuran gula darah setiap pengunjung yang berkunjung ke Puskesmas.</p>
--	--	---	---



7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>a. Pelayanan kesehatan lansia tidak optimal pada masa pandemi Covid-19</p> <p>b. Penyampaian Laporan belum tertib / tepat waktu</p> <p>c. Beberapa Petugas Puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan</p> <p>d. Pergantian Pengelola Program di Puskesmas setiap Tahun berubah</p> <p>e. Beberapa Pengelola Program Kesehatan Lansia di Puskesmas masih belum mendapatkan pelatihan Kesehatan Lansia</p> <p>f. Kerjasama Lintas Sektor masih belum erjalan maksimal dalam pelayanan Kesehatan Lansia</p> <p>g. Belum tercovernya Posyandu Lansia di setiap desa</p>	<p>a. Melakukan kunjungan rumah untuk pelayanan kesehatan lansia</p> <p>b. Kepala Puskesmas mengontrol setiap laporan bulanan agar pengiriman laporan tepat waktu</p> <p>c. Konsultasi kepada pengelola program kesehatan lansia di Kabupaten / supervisi pengelola program Kesehatan Lansia di Kabupaten ke Puskesmas</p> <p>d. Agar Pengelola Program kesehatan lansia di puskesmas tidak di ganti setiap tahun</p> <p>e. Pengeloala Program Kesehatan lansia di Puskesmas dapat dilatih</p> <p>f. Pembentukan Caregiver PJP bagi Lansia</p> <p>g. Cakupan pelayanan penderita hipertensi masih rendah →</p>
---	--------------------------------------	---	--



			18,63 h. Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus (DM) → 75,09
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<p>a. Penyandang hipertensi yang datang ke Puskesmas untuk mengambil obat atau memeriksakan diri secara mandiri terbatas karena kondisi Pandemi COVID – 19</p> <p>b. Penyandang hipertensi tidak rutin datang ke Puskesmas untuk mengambil obat</p> <p>c. Kesadaran penyandang hipertensi untuk datang ke Puskesmas masih rendah</p> <p>d. Persepsi penyandang hipertensi menganggap penyakit hipertensi bukan penyakit yang parah dan tidak menyebabkan kematian</p> <p>e. Keterbatasan petugas untuk melakukan kunjungan rumah kepada penyandang hipertensi</p>	<p>a. Kunjungan rumah penderita hipertensi</p> <p>b. Promosi kesehatan tentang perlunya terapi kepada penderita hipertensi</p> <p>c. Melakukan penyuluhan personal kepada penyandang hipertensi agar tekanan darah terkontrol</p> <p>d. Modifikasi gaya hidup dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik</p>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita	a. Penyandang DM yang datang ke Puskesmas	a. Melakukan kunjungan rumah



	Diabetes Melitus (DM)	<p>untuk mengambil obat atau memeriksakan diri secara mandiri terbatas karena kondisi Pandemi COVID – 19</p> <p>b. Penyandang DM tidak rutin datang ke Puskesmas untuk mengambil obat</p> <p>c. Keterbatasan petugas untuk melakukan kunjungan rumah</p>	<p>b. KIE kepada penyandang DM untuk rutin konsumsi obat</p> <p>c. Melakukan edukasi terhadap keluarga</p> <p>d. Modifikasi gaya hidup dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik</p>
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	<p>a. Pelayanan penderita pada ODGJ tidak optimal pada masa pandemic COVID-19</p> <p>b. Penyampaian laporan belum tertib/tepat waktu</p> <p>c. Tidak semua petugas puskesmas mengirimkan laporan ke pengelola program Kesehatan jiwa kabupaten</p> <p>d. Beberapa petugas puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan</p> <p>e. Pergantian pengelola program Kesehatan jiwa di puskesmas setiap tahun berubah</p> <p>f. Pengelola program di</p>	<p>a. Melakukan kunjungan rumah ke pasien ODGJ agar mendapatkan pelayanan Kesehatan</p> <p>b. Kepala puskesmas mengontrol setiap laporan bulanan agar pengiriman laporan tepat waktu</p> <p>c. Konsultasi kepada pengelola program keswa di kabupaten/supervise pengelola program keswa di Kabupaten ke Puskesmas</p> <p>d. Agar pengelola program setiap</p>



		<p>puskesmas belum mendapatkan pelatihan Kesehatan jiwa bagi perawat jiwa</p> <p>g. Kerjasama lintas sector masih belum berjalan maksimal dalam penanganan kasus ODGJ</p>	<p>tahun tidak berganti</p> <p>e. Pengelola program Kesehatan jiwa dapat dilatih</p> <p>f. Pembentukan tim TPKJM di Kecamatan</p>
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	<p>a. Pada tahun 2021 tidak adanya anggaran Program TB Paru di Dinas Kesehatan dan KB.</p> <p>b. Masih banyak pengelola program belum mengentry di Aplikasi Online SITB</p> <p>c. Cakupan penemuan dini TB berkurang disebabkan masa pandemic Covid-19</p> <p>d. Pengelola program setiap tahunnya selalu berganti-ganti.</p>	<p>a. Diharapkan tahun yang akan datang adanya anggaran Program TB Paru di Dinas Kesehatan dan KB</p> <p>b. Diharapkan untuk dilakukan OJT/Supervisi di Faskes yang belum Mengentry Data Online SITB</p> <p>c. Diharapkan masa pandemic Covid-19 cepat selesai sehingga petugas di Faskes dapat focus melakukan deteksi dini penyakit TB Paru.</p> <p>d. Diharapkan pergantian Pengelola Program minimal 5 tahun baru bisa</p>



			diganti.
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	<p>a. Pada tahun 2021 tidak adanya anggaran program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan dan KB</p> <p>b. Masih banyak pengelola program belum mengentry di aplikasi</p> <p>c. Cakupan penemuan dini HIV/AIDS berkurang disebabkan masa pandemic COVIDS-19</p> <p>d. Pengelola program setiap tahunny selalu berganti-ganti.</p>	<p>a. Diharapkan tahun yang akan datang adanya anggaran Program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan</p> <p>b. Diharapkan untuk dilakukan OJT-OJT di Faskes yang belum Mengentry Data</p> <p>c. Diharapkan masa pandemic COVID-19 cepat selesai sehingga petugas di faskes dapat focus pada program HIV/AIDS</p> <p>d. Diharapkan pergantian Pengelola Program minimal 5 Tahun baru bisa diganti.</p>

### 4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perangkat Daerah Pemangku : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun Jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.



#### 4.3.2 Target Capaian SPM

Target Capaian SPM pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian capaian per indikator yaitu :

No	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN (%)
	INDIKATOR	TAHUN 2021	SATUAN	
1	2	3	4	5
I.	<b>PemenuhanKebutuhanPokok Air MinumSehari-hari</b>			
I.1	Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	725	SR	100
II.	<b>PenyediaanPelayananPengelolaan Air LimbahDomestik</b>			
II.1	Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang memadai	2195	SR	100

#### 4.3.3 Realisasi

No	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN (%)
	INDIKATOR	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5
I.	<b>PemenuhanKebutuhanPoko k Air MinumSehari-hari</b>			
I.1	Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	633	725	100
II.	<b>PenyediaanPelayananPengelolaan Air LimbahDomestik</b>			
II.1	Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang memadai	187	2195	100



#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Tahun 2021 untuk pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. **387.809.078.204,00** dapat dilihat pada rincian tabel berikut ini :

NO	PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA (Rp.)		REALISASI	(%)
			APBN (Rp.)	APBD (Rp.)		
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	8.311.757.645,00	3.589.000.100,00	4.722.757.545,00	7.400.380.750,00	89,04
1.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota</b>					
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					
1.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					
1.1.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	2.727.842.050,00	2.421.250.000,00	306.592.050,00	2.486.709.500,00	98,37
2.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2.2	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota					

#### 4.3.5 Dukungan Personil



Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah:

PNS : 10 orang

Non PNS : 4 orang

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	SDM Pelayanan Masih Belum memenuhi Standarisasi Pelayanan	Mengikutsertakan Personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang ke Pelatihan/Diklat Standarisasi Pelayanan dalam Pekerjaan dan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai	1. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana baru. 2. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik.

#### 4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(OPD Pemangku : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup)

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota, diprioritaskan pada:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten Bengkayang.



2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

#### 4.4.2 Target Pencapaian SPM

Adapun target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021, yaitu :

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian (%)
		Indikator	Target		
1.	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten Bengkayang	Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana	100	2021	100
	2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	100	2021	100

#### 4.4.3 Alokasi Anggaran

Dalam rangka memenuhi capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup dialokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut ;



No.	Kegiatan	Plafond Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>I</b>	<b>Program pengembangan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>		
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten		
1.	Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana	Rp. 0	Rp. 0
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		
1.	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Rp. 0	Rp. 0
<b>Total</b>		<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>

#### 4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebanyak:

PNS : 6 orang

Non PNS : 2 orang

#### 4.4.5 Permasalahan dan Solusi

No.	Indikator	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	4.4.5.1.1.1 Tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan program kegiatan sesuai	4 Terkait dengan perencanaan dan Data penunjang



	bagi korban bencana kabupaten	<p>dengan indikator SPM Bidang Perumahan yang ada.</p> <p>4.4.5.1.1.2 Penanganan Korban Bencana yang secara langsung ditanda tangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mana dana taktis untuk penanganan korban bencana ada pada OPD tersebut serta penanganan korban bencana yang wajib untuk dibantu secara cepat.</p> <p>4.4.5.1.1.3 Bencana yang terjadi dipemukiman masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, menjadi kendala pertentangan aturan bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi mereka, sementara masyarakat tersebut tidak terkena apabila dimasukan dalam program relokasi ke lokasi yang lain di luar kawasan hutan.</p>	<p>kegiatan telahtersedia namun perlu komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang terutama dalam upaya pembiayaan dan penganggaran.</p> <p>5 Untuk masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan wajib untuk dilakukan relokasi ke kawasan yang berada diluar kawasan hutan.</p> <p>6 Pemerintah daerah (Bappeda) wajib mempercepat proses pengurusan pelepasan status kawasan hutan bagi pemukiman masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan.</p>
2.	Fasilitasi penyediaan	4.4.5.1.1.7 Tidak terlaksananya anggaran untuk	Terkait dengan perencanaan dan



rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	melaksanakan program kegiatan sesuai dengan indikator SPM Bidang perumahan yang ada. 4.4.5.1.1.8 Penataan pemukiman di kawasan kumuh dan kawasan sempadan sungai apabila ingin dilaksanakan wajib memerlukan komitmen besar dari pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan sumberdaya pendukung kegiatan, hal ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan relokasi pemukiman masyarakat di kawasan kumuh.	Data penunjang kegiatan telah tersedia namun perlu komitmen pemerintah daerah kabupaten bengayang terutama dalam upaya pembiayaan dan penganggaran
---	---	--

#### 4.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bagian Keenam, Pasal 9 poin ke tiga Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan jenis pelayanan tersebut di atas terdapat dua OPD Pengampu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:



## A. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGAMPU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### 1) Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

### 2) Target Pencapaian SPM oleh Daerah Kabupaten Bengkayang

Adapun target Penerapan jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terakomodir dalam Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang terdiri dalam 2 (dua) sub bidang kegiatan yakni Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota adapun capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan rinciannya di bawah ini.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	33.578

### 3) Realisasi

No	Uraian Program dan Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2019	2020	2021
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.133.689.132	3.609.612.479	3.243.105.430
a.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan	216.993.000	685.148.603	223.323.000



	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota			
	1 Pencegahan . Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawala.	101.696.000	564.310.200	79.020.000
	2 Penindakan atas . gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penetiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masaa.	81.690.000	81.893.403	38.132.000
	3 Koordinasi . penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota.	0	0	44.932.000
	4 Pemberdayaan . Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	33.607.000	38.945.000	27.444.000
	5 Kerjasama antar . Lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	0	0	33.795.000
b.	Penegakan Peraturan Daerah	2.916.696.132	2.924.463.876	3.019.782.430



	Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.			
	1 Sosialisasi . penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	0	0	42.980.000
	2 Pengawasan atas . kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.	158.496.207	0	10.975.000
	3 Penanganan atas . pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota.	2.758.199.925	2.924.463.876	2.965.828.114

#### 4) Alokasi Anggaran

NO	Program dan Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>287.322.000</b>	<b>277.278.000</b>
1.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota	230.247.000	223.323.000
1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	79.020.000	79.020.000
1.1.2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perdadan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	33.822.000	33.795.000
1.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.432.000	44.932.000



	serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
1.1.4	PemberdayaanPerlindungan MasyarakatdalamrangkaKetentraman dan Ketertiban Umum	27.520.000	27.444.000
1.1.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.453.000	38.132.000
1.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	57.075.000	53.955.000
1.2.1	Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan Bupati/Walikota	44.275.000	42.980.000
1.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12.800.000	10.975.000

#### 5) Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah 43 orang termasuk Kasi Trantib di setiap Kecamatan.
- b. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang di dukung oleh 111 orang merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpolpp), dan Anggota Linmas sebanyak 620 Orang.

Tabel Dukungan Personil SPM Trantibum



No	STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		IV	III	II	I	LAINNYA	
1.	PNS	4	12	9	1	0	26
2.	Kasi Trantib Kec.	0	17	0	0	0	17
3.	Honor Daerah	0	0	5	0	0	5
4.	BANPOLPP	0	0	106	0	0	106
5.	Total	21	29	120	1	0	154

## 6) Permasalahan Dan Solusi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum</li><li>- Kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perda dan perkara</li><li>- Kurangnya kapasitas dan kemampuan anggota Satpol PP dan Linmas</li><li>- Kurangnya dukungan operasional penegakan perda</li><li>- Kurangnya anggaran untuk menunjang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dalam perda dan perkara kepada masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.</li><li>- Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten; dan</li><li>- diiperlukan</li></ul>



		berbagai program dan kegiatan di Satpol PP	<p>pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada <i>frontliners</i> / petugas layanan secara continue /berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas</li><li>- Memaksimalkan potensi anggota yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga trantibum.</li><li>- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam upaya peningkatan ketertiban ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.</li><li>- Memaksimalkan anggaran yang ada dan didukung dengan komitmen anggota dalam melaksanakan penegakan perda dan perkasa.</li></ul>
--	--	--	--

**B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGAMPU BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



## 1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

## 2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Kabupaten Bengkayang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	TARGET	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	289.875	100
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	289.875	100
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	1.978	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	18	100

## 3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%) TAHUN 2021
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	289.875	249.171	99,80
2.	Pelayanan pencegahan	Jumlah warga negara yang	289.875	65.054	22,44



	dan kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.			
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	1.978	1.569	79,32
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	18	6	33,33

#### 4. Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran pelaksanaan penerapan SPM pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum bersumber pada APBD Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 46.382.400</b>	<b>Rp. 46.289.600</b>
	1.1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota 1.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)		
2.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Rp. 533.162.700</b>	<b>Rp. 527.809.299</b>
	2.1 Pengendalian Operasi dan		



No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota 2.2 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2.3 Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota 2.4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Rp. 73.466.400</b>	<b>Rp. 73.437.750</b>
	3.1 Penyediaan Logistik Penyelematan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		
<b>4.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 93.477.600</b>	<b>Rp. 93.457.600</b>
	4.1 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran 4.2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 4.3 Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		



## 5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang adalah :

PNS : 17 orang  
Non PNS : 31 oran

## 6. Permasalahan dan Solusi

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Terbatasnya penyediaan dana/anggaran untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator SPM seksi rehabilitasi dan rekontruksi yang ada	Perlu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terutama dalam upaya pembiayaan dan penganggaran
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terbatasnya sarana dan prasarana pedeteksi bencana untuk melakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sesuai dengan indikator pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam yang ada	Perlu komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pendeteksi bencana
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Terbatasnya kendaraan operasional dan alat berat untuk menyalurkan bantuan pengadaan logistik dan obat-obatan	Perlu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk menambah kendaraan operasional dan alat



			berat guna menunjang kegiatan yang ada
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Terbatasannya sarana dan prasarana alat kebakaran dalam menangani bencana kebakaran	Perlu komitmen Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang untuk menambah kendaraan Operasional pemadam kebakaran dan alat peraga kebakaran

#### 4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

(OPD Pengampu :Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang)

##### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memulihkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka pemenuhan dasarnya dapat ditingkatkan, jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 meliputi :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

##### 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah Kabupaten Bengkayang



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di luar Panti.	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	522	2021
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20	2021
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	155	2021
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	2	2021
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	15.000	2021

#### 4.6.3 Realisasi

No	Jenis	Indikator	Persentase
----	-------	-----------	------------



		Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan		(%)	
1	2	3	4	5	
1		Jenis Pelayanan Dasar: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di luar Panti.			
	a	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Penyandang Disabilitas terlantar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama satu tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan dikali 100% (seratus persen)	0 X 100% = <b>0%</b> 423	0 X 100% = <b>0%</b> 522
2		Jenis Pelayanan Dasar: Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis di luar Panti.			
	b	Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi PMKS di kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar	71 X 100% = <b>2,77%</b> 2.564	65 X 100% = <b>0,045%</b> 144.319



			di luar panti dikali 100% (seratus persen)		
	c	Penanganan Permasalahan Sosial melalui Pelayanan Shelter Daerah	PMKS yang ditangani permasalahan sosialnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi PMKS yang membutuhkan penanganan permasalahan sosial melalui shelter daerah dikali 100% (seratus persen)	40 $\times 100\% = 27,77\%$ 144	19 $\times 100\% = 63,33\%$ 30
5		Jenis Pelayanan Dasar: Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten.			
	d	Sub Kegiatan: Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada	2.318 $\times 100\% = 100\%$ 2.318	14.145 $\times 100\% = 100\%$ 14.145



			saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100% (seratus persen)		
--	--	--	--	--	--

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian SPM Bidang Sosial, dialokasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. **1.526.050.469,-**terdiri dari, 4 Program dan 12 Kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
I.	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74.278.000,00	74.205.900,00
II.	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>		
2.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
2.1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	17.965.000,00	17.900.800,00
III.	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
3.1.	Penyediaan Permakanan	5.000.000,00	4.980.000,00
3.2.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.006.000,00	9.870.300,00
3.3.	Penyediaan Alat Bantu	1.572.569,00	00,00
3.4.	Penyediaan Sandang	2.000.000,00	1.995.000,00



3.5.	Pemberian Layanan Rujukan	9.998.000,00	9.989.500,00
4.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial		
4.1.	Pemberian Layanan Rujukan	981.274.000,00	161.051.414,00
4.2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	195.000.000,00	195.000.000,00
IV.	<b>Program Penanganan Bencana</b>		
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
4.1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	103.498.400,00	101.019.300,00
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
5.1.	Penyediaan Sandang	11.329.500,00	3.492.000,00
5.2.	Penyediaan Makanan	114.129.000,00	81.448.850,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.526.050.469,00</b>	<b>660.953.064,00</b>

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial adalah:

1. ASN berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf.
2. Non ASN atau staf honor berjumlah 3 orang yang terdiri atas 1 orang Staf Honorer, 1 orang diperbantukan dari Pendamping PKH dan 1 orang dari Pekerja Sosial.

#### 4.6.6 Permasalahan Dan Solusi

Pada penerapan SPM di bidang Sosial, masih ditemukan kendala yang sangat mendasar tetapi sangat signifikan yaitu sebagai berikut:

Permasalahan	Solusi
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bidang Sosial, hal tersebut berdampak pada penerapan SPM yang tidak	- Pengalokasian anggaran Bidang Sosial yang mencukupi sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Penyusunan anggaran dibuat



<p>maksimal, seperti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial, baik dari anggaran APBD maupun anggaran APBN.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Refocusing anggaran terjadi pada waktu kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan, sehingga untuk mengakomodir pemangkasan tersebut harus mengurangi anggaran kegiatan yang sedang berjalan. Apabila hal ini terus terjadi, maka penerapan SPM tidak akan tercapai.</li><li>- Jumlah personil yang menangani administrasi kegiatan dan pengelolaan gudang logistik tidak memadai, sehingga pembagian tugas masih tumpang tindih.</li><li>- Minimnya fasilitas pendukung layanan sosial.</li><li>- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bidang Sosial, hal tersebut berdampak pada penerapan SPM yang tidak maksimal, seperti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan</li></ul>	<p>berdasarkan pertimbangan bahwa Bidang Sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan kegiatan di awal tahun anggaran untuk menghindari terjadinya refocusing anggaran. Segala bentuk kegiatan dilaksanakan pada semester pertama tahun anggaran berjalan.</li><li>- Penempatan personil/pegawai/staf harus sesuai dengan kebutuhan, apabila staf dimutasi ke tempat lain, seharusnya segera diberikan staf pengganti dengan status kepegawaian minimal sama, sehingga untuk pembagian tugas tidak akan menemui kendala.</li><li>- Pembangunan atau peningkatan fasilitas pendukung layanan sosial, seperti peningkatan gudang logistik dan revitalisasi Rumah Singgah.</li></ul>
---	--



pengemis di luar panti sosial, baik dari anggaran APBD maupun anggaran APBN.	
--	--

## 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

### 4.7.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Adapun Program Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan
1	<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>
1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru
1.2	Pembangunan Laboratorium
1.3	Pembangunan Asrama Sekolah
1.4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/penjaga Sekolah
1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.6	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.7	Pengadaan Mebel Sekolah
1.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP
1.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP
1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
1.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
2	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>
2.1	Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD
2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2.3	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru



	PAUD
2.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
2.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
2.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
2.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>
3.1	Pembanguna Gedung /Ruang Kelas /Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
3.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan
3.4	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa Nonformal /Kesetaraan
3.5	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan
3.6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal /Ke
3.7	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non
3.8	Pengolalaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal /Kesetaraan
3.10	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Kesetaraan
3.11	Pengolalaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
<b>4.</b>	<b>Pengolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>
4.1	Penambahan Ruang Kelas Baru
4.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4.3	Pembangunan Saranan , Prasaranan dan Utilitas Sekolah
4.4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
4.5	Rebalitasi Sedang /Berat Ruang Kelas



4.6	Pengadaan Mebel Sekolah
4.7	Pengadaan Perlengkapan Siswa
4.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
4.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
4.10	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
4.11	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan
4.12	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar
4.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar

## B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Adapun Program dan Kegiatan pada Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan
1	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan dan upaya kesehatan
	1.1 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.1.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	1.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	1.1.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	1.1.4 Pelayanan Kesehatan Balita
	1.1.5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
	1.1.6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	1.1.7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	1.1.8 Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
	1.1.9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
	1.1.10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat



	1.1.11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)
	1.1.12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

### C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Adapun Program dan Kegiatan pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan
<b>I.</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	1. Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan Teknis SPAM
	2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
<b>II.</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1. Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah
	2. Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

### D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Program dan Kegiatan
<b>I</b>	<b>Program pengembangan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>
	Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
1.	Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
1.	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah



	yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten
--	---

## E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Program dan Kegiatan
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota
	1.1 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	1.2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertibandan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa
	1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	1.4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteriban Umum
	1.5 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
<b>2.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>
	2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	2.2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

### 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Program dan Kegiatan
-----	----------------------



No.	Program dan Kegiatan
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>
	1.1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
	1.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>
	2.1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
	2.2 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	2.3 Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota
	2.4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>
	3.1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
<b>4.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	4.1 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
	4.2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
	4.3 Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Adapun program dan kegiatan Bidang Urusan Sosial yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 adalah:

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN
<b>1.</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> 1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
<b>2.</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>



	2.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3.	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> 4.8 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 4.9 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial



## BAB V

# PENUTUP

Sebagai penutup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2021, perlu kami sampaikan hal-hal yang dianggap penting sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021 merupakan realisasi pemenuhan kewajiban Bupati Bengkayang selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021. LPPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang menuju tata pemerintahan yang baik (good governance)
2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) cukup mencerminkan kondisi Kabupaten Bengkayang saat ini. Dengan demikian diharapkan evaluasi capaian IKK untuk Kabupaten Bengkayang dapat mendorong perbaikan dan peningkatan program dan kegiatan untuk masyarakat.
3. Dengan adanya Pandemi Covid-19 di Tahun 2021 ini sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang serta berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang.
4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021 diharapkan menjadi bahan evaluasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan keara



h yang  
lebih baik serta dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pada tahun mendatang.